

BAB 5

MODEL PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT ORANG RIMBA

5.1. Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba.

Konsep pembangunan sosial merupakan suatu model alternatif yang ditawarkan karena model pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tidak juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tangdilintin (1999) bahwa pembangunan yang sangat berfokus pertumbuhan memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran, tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya.

JFX.Paiva dalam Aris Munandar (2002) mengemukakan pembangunan sosial adalah *“development of the capacity of people to work continuously for their own and society’s welfare.”* Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial menekankan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Midgley dan Hardiman (1995:25) mendefinisikan pembangunan sosial adalah *“a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development”* Definisi ini menekankan bahwa pembangunan sosial merupakan suatu proses perencanaan perubahan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan proses dinamika pembangunan ekonomi.

Dari beberapa konsep pembangunan sosial yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial Orang Rimba adalah proses perubahan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba yang harus direncanakan sedemikian rupa dimana dalam proses tersebut peranan manusia menjadi pusat dari proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang diikuti oleh proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Dalam hal ini pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba lebih menitikberatkan kepada proses pemberdayaan masyarakat sebagai kuncinya, dan perubahan sosial yang direncanakan.

Dalam kaitannya dengan konsep pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba, proses pembangunan sosial harus dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan sosial komunitas Orang Rimba dengan menempatkan Orang Rimba sebagai pelaku utama proses perubahan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan kondisi sosial budaya dan lingkungan hidup mereka guna meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dan komunitas Orang Rimba yang diiringi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Proses pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba harus dilakukan dengan memperhatikan potensi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup komunitas Orang Rimba serta keterbatasan yang mereka miliki. Perencanaan perubahan sosial yang dimaksud disini adalah perencanaan sosial yang menekankan pada upaya pencegahan dampak buruk dari faktor yang mempercepat perubahan itu sendiri, untuk menjamin kelangsungan hidup komunitas Orang Rimba sesuai dengan kemampuan tingkat adaptasi menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik.

Proses perubahan sosial pada komunitas Orang Rimba akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal komunitas. Proses ini akan berjalan secara alamiah dan berpengaruh langsung terhadap perkembangan budaya masyarakat. Nilai-nilai, norma, kebiasaan, tata kelakuan, sikap, semangat kerja, serta paradigma berpikir masyarakat akan ikut berubah. Proses seperti ini juga menerpa pada komunitas adat Orang Rimba. Proses perubahan sosial tidak dilawan atau dihentikan, akan tetapi masyarakat harus dipersiapkan sedemikian rupa agar perubahan yang terjadi tidak berdampak buruk bagi masyarakat yang bersangkutan. Disinilah pentingnya perencanaan sosial untuk menghadapi perubahan sosial.

Pendekatan komunitas dalam pembangunan sosial juga dikemukakan oleh Korten (1986) dengan memberikan ciri-ciri pendekatan berbasis komunitas yakni (1) bahwa keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang didalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipan yang dihargai; (2) pendekatan ini mencapai tujuan pembangunan sosial melalui proses belajar sosial (social learning) yang dalam

proses tersebut individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris, dan tuntutan oleh kesadaran kritis individual dan (3) jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, dan pemerintah daerah, akan menjadi basis tindakan-tindakan lokal yang diarahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar yang luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber daya mereka.

Masyarakat adat Orang Rimba merupakan suatu komunitas yang terpinggirkan atau kalah (*the looser*) dalam proses pembangunan. Proses pembangunan tidak saja akan menghasilkan kemajuan tetapi juga menghasilkan ketimpangan yang terjadi akibat mereka yang mampu memanfaatkan pembangunan dan mereka yang tidak mampu memanfaatkan sebagaimana yang dialami oleh komunitas adat Orang Rimba.

Penyebab utama kegagalan Orang Rimba memanfaatkan pembangunan lebih disebabkan faktor struktural dimana kebijakan pembangunan pemerintah itu sendiri lebih berpihak kepada kelompok yang lebih siap membangun dan dominan (*mainstream*). Meskipun demikian ada faktor kultural dalam budaya komunitas Orang Rimba misalnya budaya melangun dan tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk melakukan pekerjaan selain berburu dan meramu dan berladang turut menjadi penyebab kegagalan dalam memanfaatkan pembangunan.

Gunawan Sumodiningrat (2005) mengemukakan bahwa pembangunan sosial itu sendiri memiliki dua makna yaitu makro dan mikro. Dalam makna makro bermakna pembangunan manusia Indonesia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia fokusnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan sosial. Dalam makna mikro pembangunan sosial difokuskan pada mereka mereka yang kalah dalam proses pembangunan. Ada banyak varian yang menjadi penyebab kegagalan mulai dari yang bersifat struktural (adanya keberpihakan pada kelompok yang siap membangun), seperti dalam teori (*trickle down efek*) hingga yang bersifat kultural (karena mengidap budaya miskin yakni pasif dan fatalistis atau serba (*nrimo*)).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba adalah pembangunan sosial secara mikro hal ini disebabkan komunitas ini termasuk mereka yang kalah dalam proses pembangunan itu sendiri. Pendekatan pembangunan yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi masyarakat adat Orang Rimba, karena umumnya desain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (*mainstream*) dalam masyarakat. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat adat Orang Rimba masuk dalam kategori masyarakat yang tidak diuntungkan dalam struktur masyarakat. Ketika mereka berbeda dalam arti budaya, identitas, sistem ekonomi, bahkan sistem politik dari kelompok dominan lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu prinsip-prinsip seperti pengakuan pada harkat dan martabat, hak untuk menentukan diri sendiri, kesempatan yang sama dan tanggung jawab sosial dalam pembangunan sosial harus diterapkan.

Masyarakat adat Orang Rimba seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau tidak mendapatkan keuntungan dari proses itu. Padahal sebagai warga negara, masyarakat adat harus pula menikmati hak dan kewajiban yang adil dan sejajar dengan segmen masyarakat lainnya, masyarakat adat harus diberikan keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi kehidupannya. Oleh karena itu proses pembangunan sosial Orang Rimba juga harus mengacu kepada deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, deklarasi ini memberi penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual; hak atas *free, prior and informed consent* (FPIC); dan hak atas penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri.

Hal penting yang harus ada dalam menunjang pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba adalah kebijakan *affirmative* yang harus dilakukan oleh PEMDA khususnya dalam bidang pelayanan pembangunan sosial dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini dari hasil penelitian merupakan sektor yang kondisinya paling marjinal di komunitas Orang Rimba, hal ini disebabkan karena rendahnya akses pelayanan dan hambatan kondisi sosial budaya (misalnya

melangun, melahirkan, pola hidup dan konsumsi yang tidak sehat) yang ada dalam komunitas adat Orang Rimba.

Kebijakan *affirmative* dalam pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba yang harus diambil oleh PEMDA baik tingkat provinsi dan kabupaten berkaitan erat dengan otonomi daerah dimana partisipasi daerah menjadi *mainstream* perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat adat. Kebijakan *affirmative* yang harus dilakukan adalah membuat prioritas program pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba khususnya bidang pelayanan sosial dasar pendidikan dan kesehatan yang didanai secara khusus dalam Anggaran Belanja Daerah melalui satuan kerja terkait. Kebijakan *affirmative* lainnya yang dapat dilakukan adalah penambahan struktur kelembagaan yang khusus untuk menangani komunitas Orang Rimba di setiap unit satuan kerja pemerintah daerah agar penanganan perencanaan program pembangunan sosial pada komunitas Orang Rimba dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan.

Pembangunan sosial bagi masyarakat adat seharusnya tidak harus tergantung dari dana pusat seperti yang terjadi selama ini, sehingga tidak menjadi hambatan dalam kelanjutan program pemberdayaan terhadap komunitas adat Orang Rimba. Koordinasi dan pembagian kewenangan mutlak diperjelas masing-masing pihak sehingga efektifitas program dapat ditingkatkan untuk menghindari sejumlah bias program seperti penentuan kelompok sasaran dan kebutuhan program bagi komunitas adat Orang Rimba.

Pelaksanaan program pembangunan sosial masyarakat adat haruslah lebih mengedepankan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat/LSM, dan dunia usaha. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan komunitas adat di kawasan TNBD telah ada partisipasi dari pihak LSM dan perusahaan perkebunan swasta yang berada di sekitar kawasan TNBD dalam melakukan program pemberdayaan. Namun hal ini belum dapat mencapai hasil yang optimal dikarenakan masih terbatasnya cakupan program, rendahnya efektifitas pelaksanaan, program masih bersifat *charity*, tidak adanya komunikasi yang efektif antara para pihak yang melakukan program pemberdayaan, dan tidak ada program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas adat Orang Rimba.

Oleh karena itu diperlukan forum kemitraan bagi para pihak yang memiliki program pemberdayaan bagi komunitas adat Orang Rimba yang dilandasi atas prinsip saling percaya, keanekaragaman dan keberlanjutan sosial. Forum kemitraan ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi, saling menukar informasi, berbagi sumberdaya, merencanakan, dan evaluasi program masing-masing pihak untuk lebih mendorong keberhasilan dalam pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba.

5.2. Kebijakan Nasional Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Dasar kebijakan pemberdayaan KAT secara nasional dituangkan dalam suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas adat terpencil. Dalam Keppres tersebut pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya, dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Selain Keppres kebijakan pemberdayaan KAT tertuang dalam Kepmensos No.06/PEGHUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan KAT dan Peraturan setingkat Dirjen. Dalam petunjuk pelaksanaan pemberdayaan KAT kebijakan dan strategi Pemberdayaan tercantum pada BAB IV pasal 12 disebutkan bahwa kebijakan umum pembinaan kesejahteraan sosial pemberdayaan komunitas adat terpencil di arahkan pada upaya pengembangan kemandirian komunitas adat terpencil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya agar mampu menanggapi perubahan sosial budaya dan lingkungan hidupnya.

Dari keppres dan kepmensos diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan KAT bertujuan untuk mendorong peran aktif KAT sebagai pelaku utama dalam pembangunan dengan memperhatikan adat istiadat yang dimiliki oleh KAT untuk mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan mereka.

Sesuai dengan Keppres No.111/1999 pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil dilakukan dalam bidang: a) Permukiman, b) Adminitrasi kependudukan, c) Kehidupan beragama, d) Pertanian, e) Kesehatan, f) Pendidikan, g) Bidang lainnya. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui kegiatan: a) Penyuluhan, b) Bimbingan, c) Pelayanan, dan d) Bantuan.

Pemerintah telah mengeluarkan dasar kebijakan dalam pemberdayaan KAT namun dalam implementasi kebijakan tersebut ternyata tidak mudah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor permasalahan dalam proses pemberdayaan KAT diantaranya adalah : (1) Terbatasnya pemahaman tentang eksistensi dan program pemberdayaan KAT. (2) Rendahnya kualitas SDM dan persepsi yang beragam terhadap KAT diantara para pelaksana program sehingga mengakibatkan proses pemberdayaan kurang sistematis atau tidak sesuai tahapan (pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut). (3). Lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dan belum proporsionalnya prioritas program PKAT di daerah, mengakibatkan kurang optimalnya keterpaduan pelaksanaan program pemberdayaan KAT. (4). Rendahnya pemantauan terhadap KAT yang sedang maupun sudah diberdayakan, mengakibatkan kurang terukurnya kinerja PKAT dan berdampak pada rentannya kondisi KAT terhadap upaya provokasi luar.

Dari beberapa permasalahan pemberdayaan KAT yang ada secara nasional yang dikemukakan di atas dalam kaitannya dengan pembangunan sosial Orang Rimba hal tersebut juga menjadi masalah ditingkat daerah sehingga proses pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak pada kualitas hidup komunitas Orang Rimba yang dapat digolongankan sangat rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini sebagaimana yang telah dikemukakan di atas harus dilakukan pembangunan sosial melalui perencanaan perubahan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas Orang Rimba.

5.3. Perspektif, Prinsip dan Pendekatan Pembangunan Sosial Orang Rimba.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba akan mengacu pada karakteristik sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang eksis dalam kehidupan komunitas mereka, oleh karena itu pembangunan sosial Orang Rimba di kawasan TNBD dikembangkan dengan mengambil perpaduan dua perspektif dalam pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) yaitu perspektif ekologi dan perspektif keadilan sosial/HAM.

Perspektif ekologis mengedepankan visi pengembangan masyarakat yang dapat hidup dalam jangka panjang, perspektif dilandasi oleh prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman dan keseimbangan dari lingkungan hidup. Dengan kata lain perspektif ini lebih mengedepankan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya perspektif keadilan sosial dan HAM memiliki visi dari aspek sosial yang menginginkan sebuah masyarakat yang didasarkan atas prinsip defenisi dan penjaminan hak-hak, kesetaraan, pemberdayaan, yang mengalahkan operasi struktural dan keadaan yang merugikan, kebebasan menentukan kebutuhan dan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Perspektif pengembangan lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang lebih mengedepankan keadilan sosial.

Penggunaan dua perspektif ini dalam pembangunan masyarakat adat Orang Rimba berdasarkan kondisi sosial budaya dan lingkungan yang mereka miliki. Orang Rimba hidup di kawasan hutan konservasi yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip perspektif ekologi disisi yang lain keberadaan Orang Rimba yang lebih dulu mendiami kawasan hutan tersebut jauh sebelum ditetapkan kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan taman nasional menjadi pertimbangan tersendiri yang harus diperhatikan. Dengan memadukan dua perspektif pengembangan masyarakat ini diharapkan gesekan ataupun benturan kepentingan para pihak dalam proses pembangunan dapat dihindari, yang diharapkan justru sebaliknya yaitu akan tercipta suatu sinergi yang kuat antara para pihak dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Argumen lain dari penggunaan penggabungan dua perspektif tersebut diatas adalah munculnya konsep “komunitas” sebagai basis dari pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adat Orang Rimba dengan pendekatan komunitas sangat cocok dengan pola kehidupan dan budaya mereka yang hidup secara berkelompok atau dalam “rombong”. Orang Rimba hidup dalam kelompok atau rombongan yang jumlahnya tidak terlalu besar sehingga interaksi mereka sangat solid. Rombongan atau kelompok yang terdiri dari anggota yang memiliki kekerabatan yang dekat akan menjadi identitas mereka, sehingga mereka akan mempunyai rasa memiliki dan menjadi bagian anggota rombongan dan akan setia pada aturan dan komitmen yang berlaku dalam kelompok.

Berdasarkan perpaduan dua perspektif ini beberapa prinsip pembangunan dipilih untuk menjadi dasar acuan dalam menyusun kebijaksanaan dan program pembangunan sosial komunitas adat Orang Rimba. Adapun prinsip-prinsip tersebut terdiri dari :

- 1. Berbasis Komunitas,** Prinsip ini mengutamakan peran kelompok (komunitas) Orang Rimba untuk turut berpartisipasi dalam setiap proses tahapan pembangunan sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi dan komitmen yang lebih besar terhadap pembangunan.
- 2. Keberlanjutan Sosial**
Prinsip keberlanjutan sosial dimaksudkan tidak saja dalam hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang terus dapat diperbaharui tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem dan norma sosial yang berlaku dalam komunitas adat Orang Rimba khususnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.
- 3. Keanekaragaman**
Prinsip keanekaragaman dalam aspek ekologi dan sosial dalam kaitan mengatasi ancaman ekologis pada budaya monokultur ataupun ancaman memaksakan keseragaman dalam segala sesuatu, baik berupa peraturan dan kebijakan dalam sistem pengelolaan kawasan hutan.
- 4. Saling Percaya (*Trust*)**
Prinsip saling percaya, mengacu kepada sikap dan perilaku untuk saling memahami; mengerti mengenai posisi masing-masing pihak baik Orang

Rimba, Balai TNBD, PEMDA, LSM dan para pihak yang terlibat dalam interaksi sehingga akan dapat mengembangkan hubungan yang kokoh dan dapat diandalkan sebagai sarana untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama.

5. Menghargai Pengetahuan Lokal

Prinsip ini lebih mengutamakan ide perubahan dari bawah atau pembangunan “bottom-up” yang menghargai pengetahuan lokal, budaya lokal dan sumberdaya lokal dalam proses pembangunan sosial.

6. Kemitraan

Prinsip yang akan menjadi semangat para pihak (*stakeholders*) yang akan terlibat dalam pembangunan sosial Orang Rimba dikawasan hutan TNBD untuk saling membangun sinergi yang efektif, produktif dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sosial Orang Rimba sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki.

Selain prinsip diatas Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Pemberdayaan KAT (PKAT) juga telah mengembangkan prinsip dasar pekerjaan sosial pengembangan sumber daya manusia KAT yaitu: (a). Pengakuan pada harkat dan martabat, (b) Hak untuk menentukan diri sendiri, (c) Kesempatan yang sama dan (d). Tanggung jawab sosial. Selain prinsip dasar pengembangan SDM KAT ada pula prinsip operasional dalam pengembangan KAT yaitu : (a). Responsif dan Kesesuaian. (b) KAT Sebagai Aktor Utama (c) Prinsip Pengembangan Budaya Lokal dan (d) Prinsip Keberlanjutan.

Pelaksanaan pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba dapat mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas. Proses perubahan sosial yang akan dilakukan terhadap komunitas Orang Rimba baik secara individu maupun keluarga harus memprioritaskan Orang Rimba sebagai pelaku utama perubahan tersebut dengan penyesuaian terhadap pengetahuan dan budaya yang mereka miliki, namun demikian pihak luar tetaplah dibutuhkan sebagai pendamping yang akan menjalankan peran fasilitator dan katalisator dalam proses perubahan sosial dengan mengedepankan prinsip kemitraan dan kesetaraan.

Pengembangan KAT dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain melalui: (1) Penguatan Individu merupakan pengembangan untuk penguatan potensi dan kapasitas diri. (2) Penguatan Keluarga 3. Penguatan Kelompok dan (4). Penguatan Organisasional. Dari 4 bentuk pengembangan yang ada ini 2 bentuk pengembangan dirasa lebih efektif bagi pengembangan masyarakat adat Orang Rimba yaitu melalui penguatan keluarga, kelompok hal ini lebih sesuai dengan karakteristik komunitas Orang Rimba yang selalu bermukim secara berkelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat.

Secara nasional program pemberdayaan KAT dilaksanakan dalam empat bidang yaitu (a) pemberdayaan sumberdaya manusia; kegiatan peningkatan kualitas SDM yang meliputi warga KAT, pendamping serta para pelaksana program pemberdayaan KAT di tingkat pusat dan daerah. (b) pemberdayaan lingkungan sosial; rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam serta lingkungan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan warga. (c) kerjasama pengembangan sosial; kegiatan membangun jalinan atau jaringan kerjasama (networking) antar berbagai pihak terkait yang meliputi lembaga/instansi sektoral pemerintah dan masyarakat dalam arti luas seperti dunia usaha, perguruan tinggi, Orsos/LSM. (d) perlindungan komunitas adat terpencil; kegiatan yang berkaitan dengan upaya advokasi, regulasi dan legislasi dalam rangka penguatan pratama dan kelembagaan sosial, ekonomi dan kebudayaan warga KAT.

Pelaksanaan empat bidang program diatas bagi komunitas masyarakat adat Orang Rimba belum optimal, dari hasil penelitian didapatkan informasi yang baru dilaksanakan adalah program pemberdayaan lingkungan sosial khususnya berupa pembangunan pemukiman secara eksitu bagi Orang Rimba yang pada akhirnya program ini kurang berhasil dikarenakan tidak sesuai dengan karakteristik budaya Orang Rimba. Sebagai contoh kasus pembangunan pemukiman eksitu di daerah penelitian ditinggalkan oleh beberapa keluarga Orang Rimba hal ini disebabkan mereka tidak betah menempati rumah yang diberikan karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan perilaku hidup mereka. Ada juga kasus rumah jatah dijual kepada

warga desa dan uang hasil penjualan rumah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini mereka lakukan karena pada umumnya keluarga Orang Rimba yang menempati tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Salah satu kelemahan program pemberdayaan lingkungan sosial ini adalah tidak disertai dengan program lainnya yaitu pengembangan sosial ekonomi dan pengembangan pranata sosial bagi keluarga Orang Rimba.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa program pemberdayaan sumberdaya manusia yang meliputi pelatihan keterampilan hidup (*life skill*), pelatihan keterampilan sosial (*social skill training*), peragaan lapangan (Demplot) dan penguatan ekonomi dan sosial masyarakat lokal belum pernah dilaksanakan pada keluarga Orang Rimba di lokasi penelitian, dari hasil wawancara pada dasarnya mereka sangat membutuhkan peningkatan kapasitas *life skill* yang sesuai dengan kondisi sumberdaya alam yang ada disekitar mereka.

5.4. Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Sosial Orang Rimba

5.4.1. Permasalahan Pokok dan Implikasi Pembangunan Sosial Orang Rimba

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Orang Rimba khususnya bagi kelompok transisi, pengembara dan bediom dan implikasi pembangunan sosial di peroleh selama penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi yang marjinal disebabkan sumber matapencaharian dari berburu, meramu hasil hutan yang semakin sulit dan harga jual yang rendah dan fluktuatif.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan terbatasnya akses pada pelayanan proses pendidikan dan hambatan kondisi sosial budaya
3. Masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi disebabkan pola hidup dan konsumsi yang tidak sehat serta rentan terhadap penyakit karena sanitasi lingkungan yang buruk.
4. Mulai melemahnya adat-istiadat dalam penegakan sangsi dan hilangnya proses ritual adat disebabkan pengaruh dari terbukanya interaksi sosial dengan warga masyarakat luar.

5. Maraknya terjadi pembukaan dan penjualan lahan dan kebun kepada masyarakat desa hal ini disebabkan dorongan perilaku yang konsumtif terhadap kendaraan bermotor dan handphone.
6. Belum optimalnya program bantuan perumahan.
7. Masalah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan dan rekonstruksi tata batas Taman Nasional Bukit Dua Belas.

Secara lebih rinci permasalahan komunitas Orang Rimba berdasarkan masing-masing karakteristik kelompok disajikan dalam Tabel 5.1.



Tabel 5.1.

Rangkuman Temuan Pokok Permasalahan dan Implikasi Pembangunan Sosial Orang Rimba Berdasarkan Karakteristik Kelompok Orang Rimba di Dalam Kawasan dan Daerah Penyangga Taman Nasional Bukit Dua Belas

Karakteristik Kelompok OR	Temuan Pokok	Permasalahan	Implikasi Pembangunan	Program Pembangunan Yang Pernah Dilaksanakan
1. Tradisional				
2. Transisi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah • Angka Kematian Bayi Relatif Tinggi • Usia Harapan Hidup Rendah • Rentan terhadap penyakit • Melemahnya Adat Istiadat • Masih memegang budaya melangun • Pendapatan Rendah • Sebagian besar belum di registrasi sebagai penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses pendidikan formal dan non formal • Hambatan Adat istiadat • Rendahnya pendapatan • Pola hidup tidak sehat • Pola makan tidak sehat • Standar Gizi Buruk • Sanitasi Lingkungan Buruk • Tidak tegasnya sanksi adat • Kebutuhan hidup meningkat • Berkurang dan sulitnya mendapat hewan buruan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan memperluas akses pendidikan • Kebijakan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan • Kebijakan Pengembangan ekonomi kreatif • Kebijakan Penyuluhan kesehatan dan sanitasi • Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak • Revitalisasi adat • Pengembangan budaya dan pranata sosial • Peningkatan ketrampilan teknologi budidaya pertanian dan perkebunan(<i>agroforestry</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pemukiman/Perumahan Eksitu dari Kemensos dan Kemeneg PDT • Program Pos Yandu dan Pengobatan Gratis PEMDA Sarolangun • Program Pendidikan Alternatif dari LSM dan Perusahaan • Program ASKESKIN • Program RASKIN

Tabel 5.1. Lanjutan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan areal kawasan lindung dan daerah penyangga • Jual beli lahan • Semakin sempitnya lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurang dan sulit memperoleh rotan, getah jernang, madu, getah balam/Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) • Pemukiman yang jauh di pedalaman hutan • Frekuensi mobilitas adat melangun • Faktor teknis pendataan • Belum ada pola zonasi pengelolaan kawasan TN • Kebutuhan hidup konsumtif yang meningkat dan tawaran pemilik modal untuk membeli lahan • Rendahnya keterampilan teknologi bercocok tanam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketrampilan pengolahan hasil hutan non kayu • Program Registrasi Penduduk Orang Rimba • Pengakuan status hukum atas pemukiman Orang Rimba • Kebijakan peraturan zonasi pengelolaan kawasan yang mengakomodir kepentingan budaya dan pengetahuan lokal Orang Rimba • Kebijakan Peraturan tentang ketentuan pemanfaatan dan pengelolaan lahan di kawasan penyangga taman nasional • Kebijakan Reformasi Redistribusi Lahan bagi Orang Rimba • Penegakan Hukum atas masalah status pemilikan lahan di wilayah TN dan pemukiman Orang Rimba 	
--	--	---	---	--

Tabel 5.1. Lanjutan				
<p>3. Pengembara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rentan terhadap penyakit • Tercerabut Adat Istiadat • Pendapatan Rendah • Sebagian besar belum di registrasi sebagai penduduk • Tidak memiliki lahan • Hidup nomaden di areal perkebunan penduduk dan perusahaan perkebunan • Matapencaharian mengemis, pemulung • Kadang melakukan tindakan pencurian hasil kebun 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses pendidikan formal dan non formal • Rendahnya pendapatan • Pola hidup tidak sehat • Pola makan tidak sehat • Standar Gizi Buruk • Sanitasi Lingkungan Buruk • Kebutuhan hidup meningkat • Berkurang dan sulitnya mendapat hewan buruan • Rendahnya keterampilan teknologi budidaya tanaman • Rendahnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan memperluas akses pendidikan • Kebijakan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan • Kebijakan Pengembangan ekonomi kreatif • Kebijakan Penyuluhan kesehatan dan sanitasi • Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak • Pengembangan budaya dan pranata sosial • Peningkatan ketrampilan teknologi budidaya pertanian dan perkebunan (<i>agroforestry</i>) • Program Registrasi Penduduk Orang Rimba • Pengembangan Lingkungan Sosial khususnya pemukiman • Kebijakan Reformasi Redistribusi Lahan bagi Orang Rimba • Pengembangan Keterampilan Hidup (<i>Life Skill</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pemukiman/Perumahan Eksitu dari Kemensos • Program Pemberian Seragam Sekolah dari PEMDA dan LSM • Program Pengobatan Gratis PEMDA Sarolangun

Tabel 5.1. Lanjutan				
4. Bediom	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah • Pendapatan Rendah • Pembukaan areal kawasan lindung dan daerah penyangga • Jual beli lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya motivasi untuk bersekolah • Rendahnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) • Rendahnya keterampilan teknologi budidaya tanaman • Mulai mengenal kebutuhan konsumtif sekunder (motor, hp, chainsaw) • Tidak memiliki lahan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan • Kebijakan Pengembangan ekonomi kreatif • Peningkatan ketrampilan teknologi budidaya pertanian dan perkebunan (<i>agroforestry</i>) • Peningkatan ketrampilan pengolahan hasil hutan non kayu • Kebijakan Peraturan tentang ketentuan pemanfaatan dan pengelolaan lahan di kawasan penyangga taman nasional • Kebijakan Reformasi Redistribusi Lahan bagi Orang Rimba • Penegakan Hukum atas masalah status pemilikan lahan di wilayah TN dan pemukiman Orang Rimba • Pengembangan Keterampilan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pemukiman/Perumahan Eksitu dari Kemensos • Program Pengobatan Gratis PEMDA Sarolangun • Program RASKIN
5. Berkampung				

5.4.2. Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan Sosial Orang Rimba

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang karakteristik kelompok Orang Rimba dapat di kelompokkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu kelompok tradisional, transisi, pengembara, bediom dan berkampung. Masing-masing kelompok khususnya pada 3 kelompok yaitu kelompok transisi, pengembara dan bediom telah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 5.1. Tentu saja permasalahan yang dihadapi ketiga kelompok di atas harus diatasi dengan pelaksanaan program pembangunan sosial.

Dalam penelitian ini strategi kebijakan pembangunan sosial Orang Rimba di kawasan TNBD akan difokuskan pada kelompok transisi, dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) kelompok ini sedang mengalami proses transisi baik budaya maupun perilaku hidup sehingga memiliki tingkat kerentanan sosial budaya dan ekonomi. (2) kelompok ini bermukim di kawasan hutan yang berstatus Taman Nasional yang memiliki peraturan tersendiri dalam pengelolaan kawasan sehingga berpotensi timbulnya konflik kepentingan terhadap sumberdaya alam hutan.

Penyusunan strategi kebijakan pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba dilakukan berdasarkan identifikasi masalah dan temuan lapangan yang telah dipaparkan sebelumnya, mengingat adanya beberapa aspek permasalahan temuan hasil penelitian maka dilakukan pemilihan aspek masalah berdasarkan skala prioritas masalah yang harus ditangani dalam komunitas Orang Rimba pada kelompok transisi adalah pada bidang pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan dan kesehatan, , aspek budaya (pranata sosial), aspek pengembangan ekonomi dan aspek pembangunan zonasi kawasan TNBD.

5.4.2.1. Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial dalam Bidang Pendidikan

Faktor pendidikan dapat merupakan faktor penyebab dan sekaligus dapat menjadi faktor yang disebabkan oleh perubahan sosial di bidang lain, seperti dari bidang ekonomi dan politik. Perubahan sosial melalui pendekatan proses pendidikan bukan merupakan perubahan yang berlangsung secara alamiah, tetapi di dalamnya diperlukan perencanaan, kemudian dilaksanakan, dan selanjutnya dievaluasi untuk melihat perubahan pendidikan yang terjadi dalam satu periode. Paling tidak ada 3 pendekatan indikator yang dapat digunakan untuk menilai

keberhasilan perubahan sosial yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, yaitu; (a) perubahan input seperti tingkat alokasi anggaran yang digunakan ke dalam sektor pendidikan; (b) perubahan output atau pendekatan efektivitas pelayanan, yakni dinilai dari tingkat realisasi program-program pelayanan pendidikan dalam suatu periode; (c) perubahan outcomes antara lain dapat dideteksi melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan rata-rata lama pendidikan penduduk di suatu komunitas.

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan gratis untuk memperluas pelayanan akses pendidikan untuk semua anak usia sekolah namun kebijakan tersebut belum dapat dinikmati oleh masyarakat adat Orang Rimba. Kebijakan PEMDA untuk membentuk seksi khusus pembinaan dan pendidikan Orang Rimba pada bidang program pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun belum dapat berfungsi secara optimal memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi komunitas adat Orang Rimba.

Pembangunan sosial dalam bidang pendidikan dasar merupakan suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Pendidikan penting untuk melawan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, mempromosikan demokrasi dan HAM, melestarikan lingkungan, dan mengontrol pertumbuhan penduduk (UNICEF 1999 *dalam* Hall dan Midgley, 2004).

Tujuan pembangunan sosial bidang pendidikan bagi komunitas Orang Rimba adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Orang Rimba agar dapat lebih memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari. Sasaran program pendidikan Orang Rimba lebih diutamakan kepada anak usia sekolah dan anak usia remaja, hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong terjadinya proses perubahan sosial. Namun demikian program pendidikan informal diperlukan bagi kelompok orang dewasa untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup, dan keterampilan teknologi tepat guna dalam pengolahan sumberdaya alam hutan.

Permasalahan di bidang pendidikan bagi Orang Rimba adalah rendahnya motivasi dan partisipasi untuk mengikuti proses pendidikan, rendahnya akses mengikuti pendidikan, adanya budaya melangun, lemahnya institusi keluarga dan masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak usia sekolah Orang Rimba kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah memperluas akses pelayanan pendidikan bagi Orang Rimba, melalui penyediaan anggaran dana pendidikan khusus untuk Orang Rimba dan membangun model penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup masyarakat adat Orang Rimba.

Adapun beberapa strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang dapat dilakukan adalah :

1. Melaksanakan program pendidikan alternatif dengan metode dan kurikulum khusus bagi pendidikan dasar anak usia sekolah di komunitas adat Orang Rimba khususnya yang masih tinggal di dalam kawasan hutan. Program pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan Orang Rimba seperti LSM dan pihak swasta.
2. Melaksanakan pendidikan keterampilan hidup (*life skill*) bagi anak-anak remaja dan orang dewasa di komunitas Orang Rimba terutama keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi Hasil Hutan Non Kayu maupun keterampilan lainnya.
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan sekolah dasar dan lembaga pendidikan non formal yang melaksanakan pendidikan bagi Orang Rimba yang telah menetap, khususnya yang berkaitan dengan penambahan tenaga guru dan penyusunan program khusus penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.
4. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan LSM dan komunitas dalam menyusun program pendidikan bagi masyarakat adat Orang Rimba.

Berdasarkan strategi yang telah dipaparkan dapat dilaksanakan beberapa program sebagai berikut :

1. Program identifikasi dan pendataan jumlah anak usia sekolah dan usia remaja di setiap kelompok Orang Rimba di kawasan TNBD.

2. Program Sekolah Rimba bagi anak usia sekolah dengan kurikulum yang digali dari kearifan budaya Orang Rimba dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan modern.
3. Program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) khususnya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup komunitas Orang Rimba.
4. Program pelatihan teknologi budidaya tanaman dan hewan hutan misalnya rotan, jernang, babi dan lebah madu.
5. Program Beasiswa Pendidikan bagi anak-anak Orang Rimba.

5.4.2.2. Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Bidang Kesehatan

Pembangunan sosial dalam bidang pendidikan harus dipandang sebagai sistem pelayanan kesehatan yang melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian untuk pelayanan promosi, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi bagi masyarakat (Basch, 1999 *dalam* Midgley and Hall, 2004).

Pembangunan sosial di bidang kesehatan merupakan salah satu unsur dalam pembangunan sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP dalam salah satu program pembangunan millenium. Terdapat berbagai indikator pembangunan dan perubahan sosial yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI), di antaranya adalah Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Persentase Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, Persentase Angka morbiditas, Persentase Penduduk yang melakukan pengobatan sendiri, dan Persentase Kelahiran yang ditolong tenaga medis.

Pembangunan Sosial di bidang kesehatan bagi komunitas Orang Rimba bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Orang Rimba sehingga dapat hidup secara sehat dan lebih layak. Kebijakan yang harus diambil adalah memperluas akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi komunitas Orang Rimba.

Upaya pembangunan kesehatan bagi Orang Rimba yang telah dilakukan oleh PEMDA Sarolangun baru pada tahap pelayanan penyembuhan, dengan menggunakan strategi berobat gratis melalui penggunaan kartu sehat pada sarana pelayanan kesehatan baik level satu pada tingkat desa dan kecamatan dan level dua pada tingkat kabupaten.

Strategi ini belum dapat melayani kesehatan Orang Rimba secara optimal, beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi komunitas Orang Rimba adalah buruknya sanitasi lingkungan hidup, perilaku hidup tidak sehat misalnya jarang mandi, perokok berat), akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan karena letak pemukiman mereka yang jauh di dalam hutan, dan pemahaman mereka tentang sanitasi dan kesehatan yang minim. Terkait pembangunan sosial dibidang kesehatan Orang Rimba selain beberapa masalah kesehatan Orang Rimba, hal yang harus mendapat perhatian adalah kearifan lokal Orang Rimba dalam bidang pengobatan tradisional. Orang Rimba memiliki Malim atau dukun yang dapat melakukan upacara pengobatan atau penyembuhan bagi anggota kelompok yang menderita sakit. Pengobatan tradisional Orang Rimba menggunakan khasiat ramuan dan tanaman hutan yang terdapat di lingkungan pemukiman mereka sejumlah tanaman hutan yang banyak dijumpai di kawasan TNBD diyakini oleh Orang Rimba dapat dijadikan obat menyembuhkan penyakit.

Untuk itu diperlukan perubahan strategi program pelayanan kesehatan bagi Orang Rimba sebagai berikut :

1. Memperluas dan mempermudah akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi Orang Rimba.
2. Melaksanakan promosi kesehatan dan sanitasi lingkungan
3. Merekrut dan melatih lebih kader POS YANDU dan Dukun Beranak yang berasal dari perempuan remaja dan dewasa Orang Rimba..
4. Menggali dan mengembangkan potensi teknik pengobatan dan pengetahuan tanaman obat Orang Rimba.

Berdasarkan strategi di atas dapat dikembangkan beberapa program sebagai berikut :

1. Program pelayanan kesehatan bergerak/jemput bola berupa POS YANDU khusus bagi Orang Rimba dengan program yang diperluas tidak hanya proses imunisasi tetapi juga disertai dengan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta program pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita Orang Rimba.
2. Program Penyuluhan Sanitasi dan Kesehatan
3. Program pelatihan kader kesehatan, pos yandu dan persalinan.

4. Program identifikasi dan budidaya tanaman yang dapat dijadikan bahan baku obat-obatan.

5.4.2.3. Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial dalam Bidang Ekonomi

Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dalam proses penerapannya diiringi dengan pembangunan bidang ekonomi. Sesuai dengan tujuannya pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba pada akhirnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup ke taraf yang lebih sejahtera dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.

Proses pembangunan ekonomi komunitas Orang Rimba harus dilakukan sesuai dengan potensi dan peluang ekonomi yang dimiliki komunitas adat Orang Rimba yang dilandasi prinsip pembangunan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam hutan dikawasan TN. Kebijakan pembangunan ekonomi bagi komunitas Orang Rimba haruslah mengedepankan pengembangan sumber ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam dengan kreatif yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi komunitas Orang Rimba. Saat ini dalam menunjang ekonominya Orang Rimba menggunakan pola yang ekstraktif dalam memanfaatkan HHNK, hal ini harus dirobah ke pola pemanfaatan yang lestari sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi untuk menunjang kesejahteraan komunitas Orang Rimba sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha industri kerajinan pengolahan hasil hutan non kayu (HHNK) seperti rotan, tebu-tebu, getah jernang, dan buah-buahan.
2. Mengembangkan budidaya tanaman hutan dan perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi dan konservasi dengan sistem "*hompongan*"
3. Mengembangkan potensi pariwisata kawasan hutan hujan tropis dataran rendah yang dimiliki kawasan TNBD dengan beragam jenis species flora dan fauna endemik.

Dari strategi yang telah ditetapkan dapat dikembangkan beberapa program pembangunan ekonomi komunitas Orang Rimba sebagai berikut :

1. Program pelatihan keterampilan pengolahan bahan baku HHNK menjadi produk industri kerajinan
2. Program pengembangan industri kerajinan berbahan baku HHNK
3. Program pelatihan teknologi budidaya tanaman hutan dan perkebunan
4. Program pengembangan budidaya tanaman hutan rotan dan jernang dengan sistem agroforestry (sistem wanatani) yang diselenggarakan dengan sistem kearifan lokal Orang Rimba dalam pemanfaatan SDA.
5. Program pengembangan budidaya tanaman karet dan buah dengan sistem "hompongan".
6. Program pengembangan paket ekowisata di kawasan TNBD

Pengembangan ekonomi komunitas adat Orang Rimba harus disertai dengan kebijakan pemberian kepastian hak akan sumberdaya lahan dan hak pengelolaan sumberdaya hutan yang justru selama ini menjadi salah satu faktor struktural dalam proses marginalisasi ekonomi masyarakat adat pada umumnya dan komunitas adat Orang Rimba khususnya. Untuk itu perlu dikeluarkan sejumlah produk hukum (PP, Permen, PERDA) yang berkaitan dengan hak atas lahan dan hak pengelolaan sumberdaya alam hutan bagi masyarakat adat.

5.4.2.4. Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Bidang Budaya

Pembangunan sosial bidang kebudayaan masyarakat adat Orang Rimba bertujuan menimbulkan perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya yang selanjutnya berpengaruh kepada sikap mental, pola pikir, dan pola perilaku anggota keluarga dan komunitas Orang Rimba. Perencanaan perubahan sosial budaya dilakukan dengan sangat cermat mengingat perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya di satu sisi dapat menjadi pendorong ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain dapat menjadi bumerang yang memosisikan manusia sebagai objek yang kehilangan nilai kemanusiaannya, bahkan melanggar hak asasinya.

Kebijakan pembangunan budaya masyarakat adat Orang Rimba diarahkan untuk melakukan identifikasi dan penguatan nilai-nilai budaya masyarakat adat Orang Rimba yang menunjang perbaikan kehidupan komunitas. Dalam masyarakat adat Orang Rimba ditemukan nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan

dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup komunitas diantaranya adalah nilai-nilai budaya dalam pola pemanfaatan sumberdaya alam, nilai-nilai budaya dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Komunitas Orang Rimba mengenal institusi/lembaga pengulu yang mengatur tata perilaku kehidupan anggota kelompok. Kondisi institusi pengulu saat ini mulai melemah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di komunitas khususnya semenjak terbukanya akses komunikasi dan interaksi dengan masyarakat Orang Terang. Namun lembaga pengulu masih dihormati oleh para anggota kelompok untuk dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas misalnya dalam penyelesaian perselisihan antar anggota kelompok, penyelenggaraan perkawinan, dan pembukaan ladang baru.

Lembaga pengulu juga dilemahkan dengan munculnya atau dipilihnya Temenggung baru dengan cara kurang demokratis yang hanya dipilih atau disetujui oleh beberapa orang anggota kelompok. Dari hasil wawancara dengan informan saat ini ada 12 orang temenggung di kawasan TNBD. Banyaknya temenggung ini dikarenakan pengaruh dari interaksi dengan pihak luar terutama untuk kepentingan ekonomi dan politik praktis misalnya dalam hal distribusi bantuan pemerintah, jual beli lahan, dan pemilihan kepala desa.

Pada prinsipnya lembaga pengulu memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sistem lembaga pengaturan komunitas secara formal yang dapat diakui oleh pemerintah sebagai satu kesatuan warga setingkat rukun tetangga atau desa pada pemerintahan formal. Fungsi dan kewenangan yang diatur dalam institusi pengulu sudah sangat efektif terbagi dalam bidang urusan tertentu dalam pengaturan tata kelola komunitas Orang Rimba. Untuk itu perlu dilakukan aktualisasi fungsi institusi pengulu pada komunitas Orang Rimba dalam rangka pengembangan masyarakat adat Orang Rimba.

Strategi pengembangan potensi nilai budaya masyarakat adat Orang Rimba yang perlu dilakukan adalah :

1. Menggali dan melakukan identifikasi nilai-nilai kearifan budaya Orang Rimba yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kehidupan Orang Rimba.
2. Melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidupnya.

3. Mengakomodasi atau mengakui keberadaan sistem institusi pengulu sebagai lembaga tata kelola komunitas Orang Rimba oleh pemerintah daerah

Strategi kebijakan dalam mengatasi melemahnya penerapan adat-istiadat di masyarakat adat Orang Rimba adalah :

- (1) Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan dan kearifan lokal yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan dan kelestarian lingkungan menuju kemajuan, kemandirian, keharmonisan, ketahanan budaya, dengan partisipasi aktif anggota komunitas khususnya dikalangan anak-anak muda masyarakat adat Orang Rimba;
- (2) Melindungi, memelihara, mengembangkan serta memanfaatkan seluruh potensi nilai budaya, ilmu pengetahuan dan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat adat Orang Rimba.

Berdasarkan strategi pembangunan sosial bidang kebudayaan dapat dikembangkan beberapa program sebagai berikut :

1. Program revitalisasi lembaga pengulu di komunitas Orang Rimba
2. Program revitalisasi nilai budaya kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

5.4.2.5. Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Berkaitan dengan Keberadaan Orang Rimba di dalam kawasan TNBD.

Keberadaan Orang Rimba di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi. Kawasan hutan dataran rendah tersebut mulai ditetapkan pertama kali sebagai kawasan konservasi pada tahun 1987 melalui SK Menteri Kehutanan No.461/Kpts-II/1987 sebagai kawasan Cagar Biosfer (CB), status kawasan tersebut ditingkatkan sebagai taman nasional pada tahun 2000 melalui SK MENHUTBUN Nomor : 258/Kpts-II/2000. Kedua kebijakan tersebut dalam pertimbangan dan tujuan penetapan kawasan adalah untuk melindungi kehidupan Orang Rimba. Jadi jelas dalam hal ini sudah ada keberpihakan pemerintah terhadap pengakuan wilayah kehidupan Orang Rimba.

Namun pengakuan hak wilayah tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik dilapangan, dikarenakan ada kebijakan pemerintah lainnya yang

mengatur sistem pengelolaan taman nasional yang membuat terjadinya benturan kepentingan antara hak-hak adat Orang Rimba dan kewenangan negara dalam pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini berdampak pada terjadinya konflik kepentingan antara pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan komunitas adat Orang Rimba pada tahun 2005. Untuk itu perlu dilakukan terobosan pendekatan yang akan memediasi potensi konflik yang lebih besar dan berkepanjangan yang akan menyebabkan kerugian pada pihak Orang Rimba.

Untuk permasalahan ini penulis memilih “pendekatan harmoni” yang dikemukakan oleh Harry Hikmat¹⁰⁴ yaitu melakukan kajian secara proporsional antara aspek positif (benefit) dan aspek negatif (resiko), sehingga fokus tim kerja akan mengkaji tantangan ke depan, peluang yang ada, kekuatan/ potensi yang ada dan kelemahan yang terjadi. Pendekatan ini merupakan alternatif dari pendekatan resolusi konflik yang cenderung gagal dalam memediasi.

Keterkaitan kehidupan antara masyarakat adat Orang Rimba dan hutan di kawasan TNBD mengharuskan sistem pengelolaan yang mengakui sekaligus melindungi eksistensi hak-hak azasi masyarakat adat Orang Rimba. Memang tidak mudah untuk mengakomodir kepentingan para pihak dalam sistem pengelolaan taman nasional, diperlukan kemauan politik dan komitmen tanggungjawab yang tinggi serta saling mengedepankan prinsip kesetaraan, kemitraan dan keberlanjutan sosial.

Dari diskusi dan wawancara dengan berbagai pihak selama penelitian mengenai sistem pengelolaan taman nasional yang lestari dan tercapainya kesejahteraan komunitas adat Orang Rimba pengelolaan kawasan dengan “*Sistem Zonasi*” diyakini dapat mengakomodir kepentingan para pihak, dengan sejumlah catatan yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan implementasi sistem zonasi sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki kesadaran konseptual tentang hahekat pelestarian sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat pemukiman masyarakat adat.

¹⁰⁴ Harry Hikmat, Perencanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Era Otonomi Daerah (*Pengelolaan Kawasan Dengan Sistem Zonasi*).

2. Melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (*multi stakeholders*) secara kolaboratif dan partisipatif dalam penetapan penataan ruang sesuai dengan fungsi zonasi.
3. Pembagian zonasi mempertimbangkan *existing condition* dan faktor-faktor penyebab kerusakan yang terjadi di berbagai zonasi yang ada di wilayah kawasan dan sekitarnya.
4. Menggunakan sejumlah peraturan berikut sebagai landasan menyusun sistem pengelolaan zonasi yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 18 B ayat ke2, UU No. 39/1999 tentang HAM khususnya pasal 6, UU No.41/1999 tentang Kehutanan khususnya pasal 67, PP No.34/2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tap MPR No XVII/1998 Pasal 14 tentang HAM, Tap MPR No IX/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/ 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan UU No.12/2005 Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.

Sasaran perubahan yang akan dicapai dalam sistem pengelolaan TNBD lebih bertumpu pada perubahan fungsional (non konflikual). Pendekatan fungsional tersebut akan menjadi berguna jika dilakukan analisis kebijakan yang tersebut diatas secara optimal dengan memperhatikan keselarasan kawasan masyarakat adat (mikro), strategi pengelolaan regional (meso), dan kebijakan dan perundang-undangan (makro).¹⁰⁵ Pendekatan fungsional ini dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan TNBD dikarenakan pada msyarakat adat Orang Rimba memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang hutan yang disesuaikan dengan peruntukan fungsi pemanfaatan dan fungsi konservasi. Kearifan lokal ini dapat diakomodir dalam sistem pengelolaan TN karena selaras dengan sistem zonasi yang diatur dalam kebijakan peraturan perundangan formal.

Berbagai model pengelolaan kawasan hutan lestari dapat dijadikan acuan yang relevan dalam kaitan pemberdayaan masyarakat adat Orang Rimba dapat dipilih dan diterapkan dalam suatu harmoni interaksi dinamis antara ekosistem,

¹⁰⁵ Op.Cit. Harry Hikmat.

kearifan budaya lokal dan intitusi lokal yang didukung penuh oleh kebijakan nasional.

Adapun usulan dalam upaya pengelolaan kawasan hutan TNBD dengan keberadaan Orang Rimba dengan sistem zonasi adalah sebagai berikut:

1. Zona Inti/Hutan Dewa, adalah suatu kawasan yang diperuntukan untuk melindungi kelestarian hutan alam dan menjaga proses alami dalam kondisi yang tidak terganggu dengan fungsi ekologis yang mewakili lingkungan alami. Dari aspek konservasi kawasan ini diperuntukkan untuk berkembangnya plasma nufh secara alami dan berfungsi sebagai tempat pencadangan sumber air dan karbon. Kawasan ini diselaraskan dengan mengakomodir peruntukan areal hutan dewa oleh komunitas Orang Rimba. Kawasan hutan dewa bagi Orang Rimba dianggap tempat tinggalnya para dewa menurut kepercayaan mereka sehingga wilayah ini tidak boleh diganggu sama sekali karena dianggap memiliki kekuatan magis

Kawasan ini memiliki fungsi sosial budaya dan religi bagi Orang Rimba. Pada umumnya masyarakat adat Orang Rimba sangat menjaga wilayah ini dari kerusakan dan ancaman dari luar. Dalam wilayah ini juga umumnya sebagai daerah yang keramat dan mempunyai nilai-nilai sakral karena kepercayaan mereka terhadap 'penghuni' dan kebendaan di dalamnya yang dikeramatkan (*hutan terlarang*). Gangguan terhadap wilayah ini akan membuat mereka marah dan semakin 'memusuhi' komunitas luar.

Zona inti merupakan wilayah konservasi yang sangat ketat. Pada zona inti tersebut hanya untuk keperluan ritual dan religi Orang Rimba, dan penelitian diawasi ketat oleh pengelola dan komunitas adat Orang Rimba pihak luar tidak diperkenankan masuk wilayah tersebut. Jika dikaji lebih dalam kawasan tersebut secara topografi dan vegetasi merupakan wilayah yang memiliki kelerengan yang cukup tinggi dan ditumbuhi oleh vegetasi hutan dengan diameter pohon yang besar dan memiliki fungsi konservasi yang tinggi. .

2. Zona Rimba, adalah kawasan konservasi untuk menjamin kondisi alami yang perlu bagi perlindungan spesies, dan sumber-sumber plasma nutfah dan sumber daya hayati penting lainnya. Pada zona ini merupakan tempat pemukiman Orang Rimba, pada zona ini diperlukan pengelolaan yang spesifik untuk

menjaga kelestariannya. Zona ini secara terbatas dapat dimasuki pengunjung, tetapi tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan permanen, kawasan harus dipertahankan keasliannya secara alami. Kawasan ini dapat mengkomodir kearifan lokal Orang Rimba yaitu kawasan yang diperuntukan sebagai tanah kelahiran (*tano peranokon*), dan tanah pekuburan (*tano pasohon*),

- 3. Zona Pemanfaatan Tradisional**, pada zona ini merupakan kawasan aktifitas pemanfaatan tradisional yakni meramu dan berburu secara terbatas bagi Orang Rimba dan sebagai tempat pemukiman. Zona ini dikelola secara spesifik dengan kegiatan pengayaan atau budidaya keanekaragaman hayati dengan menanam komoditi unggulan berupa hasil hutan non kayu seperti rotan, jernang dan getah-getahan. Zona ini merupakan kawasan penunjang ekonomi Orang Rimba yang dikelola berdasarkan kearifan ekologi yang ada pada komunitas Orang Rimba, maupun kearifan lingkungan komunitas lain yang diintrodusir kepada komunitas Orang Rimba. Kawasan ini juga dapat mengakomodir peruntukan kawasan tanah subon/inumon menurut Orang Rimba.
- 4. Zona Pariwisata** merupakan kawasan hutan wisata atau ekowisata. Kawasan ini diperuntukkan bagi kepentingan rekreasi, penelitian, dan pendidikan. Kawasan ini dirancang untuk rekreasi dan para pengunjung yang intensif. Kawasan ini tercakup di dalamnya daerah rekreasi, jalan, tempat parkir, bangunan-bangunan, daerah camping dll. Namun daerah tersebut harus dibuat batas yang jelas. Dalam pengelolaan zona ini, pelaku utama adalah warga komunitas Orang Rimba yang sudah beradaptasi dengan komunitas luar dan petugas / pendamping sosial, sehingga mereka yang harus menerima manfaat yang paling besar. Pada zona ini telah seringkali terjadi tumpang tindih dengan wilayah paling intensif dan mengandung potensi terbesar sumber daya alam seperti, batu bara, minyak dan gas bumi dan dan desa-desa penduduk di sekitarnya (termasuk daerah transmigrasi). Konflik penggunaan tanah hak ulayat seringkali terjadi di kawasan ini. Oleh karenanya, kegiatan pemanfaatan zona ini, sekiranya tidak dapat dipindahkan dari kawasan, maka aktifitas apapun harus mendukung penuh fungsi hutan wisata atau ekowisata, serta

merupakan *wilayah antara* kehidupan komunitas adat Orang Rimba dengan komunitas luar. Pembangunan pemukiman di wilayah ini dapat dilakukan sejauh masih dalam lingkungan hak ulayat komunitas adat Orang Rimba.

5. **Zona Rehabilitasi**, merupakan kawasan untuk memperbaiki keadaan vegetasi atau habitat yang pernah rusak. Misalnya, karena kebakaran hutan, perambahan hutan atau bekas permukiman. Kawasan ini dapat ditanami oleh pohon yang memiliki nilai konservasi dan tumbuhan yang berfungsi untuk pengobatan yang daun, bunga, dan buahnya disenangi warga komunitas adat Orang Rimba dan fauna yang ada. Sebaiknya jenis pohon dan tumbuhan yang ditanam dipilih jenis-jenis tumbuhan hutan asli di kawasan hutan daerah tersebut (*indigenous plants*) agar dapat mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi.
6. **Zona Penyangga**, merupakan kawasan yang terletak di antara kawasan konservasi dengan kawasan budidaya serta pemukiman di sekitarnya yang dirancang untuk melindungi kawasan konservasi sumber daya dan kehidupan komunitas adat Orang Rimba di dalamnya dari pengaruh negatif dari luar. Sebaliknya zona ini dimaksudkan pula untuk melindungi kawasan budidaya dan permukiman atau penduduk dan sumber daya miliknya terhadap pengaruh negatif yang berasal dari kawasan konservasi.

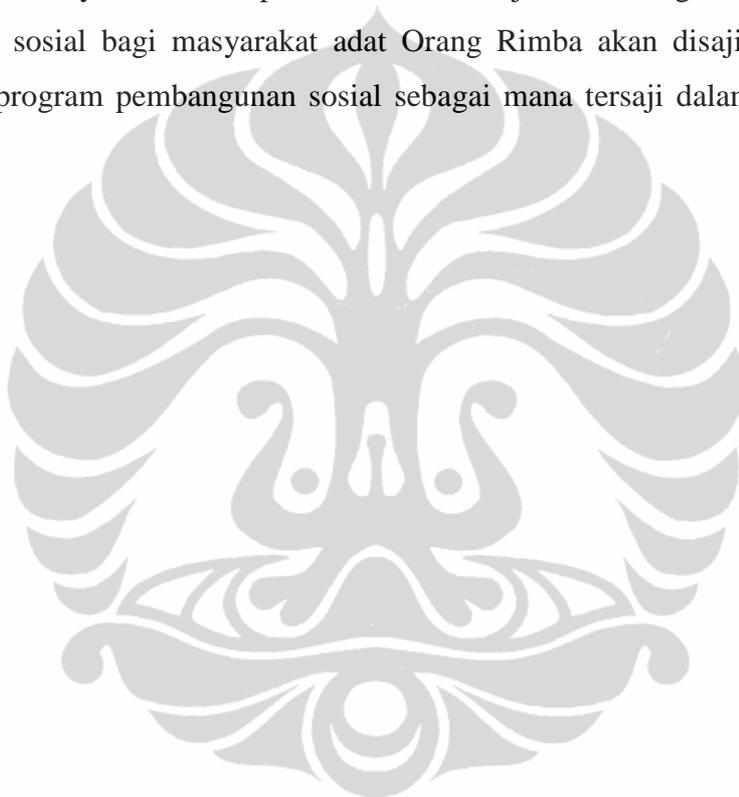
Pada kawasan zona penyangga dapat dikembangkan berupa daerah hutan atau perkebunan yang sebut “hompongan” di sepanjang titik batas kawasan TN sehingga dapat berupa sabuk hijau (*green belt*). Model “hompongan” dapat disempurnakan dengan berbagai pola wanatani (*agroforestry*) untuk memberikan manfaat ekonomi dan konservasi bagi Orang Rimba dan kawasan.

Tujuan hompongan ini untuk melindungi atau mengurangi tekanan penduduk terhadap daerah konservasi dan mencegah gangguan ke dalam kawasan yang didiami komunitas Orang Rimba. Pembangunan hompongan dapat dilakukan bersama oleh Orang Rimba dan para pihak yang ingin membantu baik dari segi teknologi dan pendanaan. Hompongan tidak bisa dimiliki secara individu tetapi dimiliki oleh komunitas sehingga tidak dapat diperjual belikan. Sejumlah aturan dan payung hukum harus ditetapkan untuk mengatur sistem pengelolaan kawasan ini. Di kawasan ini dapat pula dibangun pemukiman Orang Rimba secara

terbatas sebagai kawasan transisi bagi anggota komunitas yang akan memilih untuk menetap (*bediom*) diluar kawasan hutan dengan keinginan sendiri.

Zona ini memiliki fungsi strategis terhadap proses perubahan sosial yang diharapkan dari kehidupan masyarakat adat Orang Rimba. Wilayah ini juga merupakan wilayah pemantauan keberhasilan program pemberdayaan transisi bagi Orang Rimba yang akan melakukan proses adaptasi dengan kehidupan diluar kawasan hutan atau sebagai warga desa pada umumnya.

Secara menyeluruh baik permasalahan, kebijakan, strategi dan program pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba akan disajikan dalam sebuah tabel program pembangunan sosial sebagai mana tersaji dalam tabel 5.2 berikut ini:



Tabel 5.2. Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba

Karakter Kelompok	Bidang Pembangunan	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program Prioritas
1. Tradisional					
2. Transisi	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses dan partisipasi pendidikan formal dan non formal • Hambatan Adat istiadat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program pendidikan alternatif 2. Melaksanakan pendidikan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) 3. Meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan pendidikan 4. Mengembangkan kemitraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendidikan alternatif 2. Meningkatkan Alokasi Dana Pendidikan Bagi Orang Rimba 3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) 4. Memberikan dana insentif khusus bagi SD yang melaksanakan pendidikan bagi Orang Rimba 5. Mengembangkan kerjasama dengan para pihak yang peduli terhadap pendidikan Orang Rimba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi model pendidikan 2. Menyusun kurikulum alternatif 3. Pendataan Anak Usia Sekolah pada komunitas Orang Rimba 4. Identifikasi para pihak yang melakukan program pendidikan bagi Orang Rimba 5. Melakukan program penyuluhan sosial bagi Orang Rimba akan pentingnya pendidikan.

Tabel 5.2. Lanjutan

	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pola hidup tidak sehat • Pola makan tidak sehat • Standar Gizi Buruk • Sanitasi Lingkungan Buruk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan 2. Memantapkan dan merealisasikan Komitmen Bersama untuk Pembangunan Kesehatan OR 3. Meningkatkan alokasi dana APBD 4. Meningkatkan kualitas hidup Orang Rimba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Upaya Pelayanan Bermutu yang Merata dan Terjangkau 2. Melaksanakan promosi kesehatan dan sanitasi lingkungan 3. Memperluas akses pelayanan kesehatan 4. Merekrut dan melatih kader POS YANDU dan Dukun Beranak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan promosi/penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan ke pemukiman kelompok Orang Rimba. 2. Menambah POS YANDU khusus 3. Melakukan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta program pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita 4. Merekrut dan melatih kader POS YANDU dan Dukun Beranak yang berasal dari remaja dan perempuan Orang Rimba
--	------------------	---	---	---	---

Tabel 5.2. Lanjutan

	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi yang marjinal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan peluang dan peningkatan kemampuan usaha ekonomi yang berbasis kelestarian lingkungan 2. Menciptakan kepastian hak pengelolaan sumberdaya hutan bagi Orang Rimba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan usaha ekonomi berbasis HHNK 2. Mengembangkan kebun karet dengan sistem hompongan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi komoditi HHNK yang memiliki nilai ekonomi dan konservasi tinggi 2. Identifikasi lahan/lokasi budidaya 3. Identifikasi peluang dan jaringan pasar 4. Membentuk kelompok untuk tujuan peningkatan keterampilan produksi dan diversifikasi komoditi HHNK
	Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai melemahnya adat-istiadat dan institusi pengulu 2. Adanya Aktivitas Melangun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan dan pengembangan institusi pengulu bagi pengembangan komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi, sosialisasi dan penguatan nilai-nilai kerarifan budaya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan kapasitas pranata sosial 2. Kajian Revitalisasi Lembaga Pengulu

Tabel 5.2. Lanjutan.....					
		3.	2. Melakukan pengembangan kearifan budaya lokal yang berpotensi untuk pengembangan kelestarian hutan dan penunjang ekonomi	2. Mengidentifikasi potensi, merancang dan mengemas budaya sebagai paket ekowisata	3. Kajian Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan SDA
	Zonasi kawasan TNBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Zonasi TN 2. Rekonstruksi Tata Batas 3. Akses terhadap hutan 	1. Menciptakan sistem pengelolaan kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan	1. Mengakomodir pengelolaan kawasan TN dengan berdasarkan kearifan lokal Orang Rimba dalam pemanfaatan sumberdaya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan forum konsultasi para pihak dalam menyusun RPTNBD 2. Sosialisasi draft RPTNBD kepada para pihak 3. Pembuatan peta sistem zonasi secara partisipatif
3. Pengembara	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pola hidup tidak sehat • Pola makan tidak sehat • Standar Gizi Buruk 	1. Memantapkan dan merealisasikan Komitmen Bersama untuk Pembangunan Kesehatan OR	1. Meningkatkan Upaya Pelayanan Bermutu yang Merata dan Terjangkau	1. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan ke pemukiman Orang Rimba.

Tabel 5.2. Lanjutan

		<ul style="list-style-type: none"> • Sanitasi Lingkungan Buruk 		2. Melaksanakan promosi kesehatan dan sanitasi lingkungan	2. Penyuluhan cara hidup sehat
	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses pendidikan formal dan non formal • Rendahnya motivasi mengikuti pendidikan 	1. Memberikan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan pendanaan yang cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah akses pelanaan pendidikan 2. Merubah perilaku hidup nomaden (mengembara) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Sosial tentang pentingnya pendidikan 2. Penyuluhan Sosial tentang pentingnya hidup menetap 3. Pemberian beasiswa pendidikan bagi anak usia sekolah
	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki lahan • Perilaku hidup nomaden 	Memberi pelayanan pemukiman dan lingkungan yang layak huni bagi Orang Rimba	Membangun pemukiman yang layak huni dengan pola eksitu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kelompok sasaran 2. Pelatihan Keterampilan Sosial 3. Pembangunan perumahan dan lahan usaha produktif
	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurang dan sulitnya sumber bahan makanan 	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Orang Rimba agar dapat hidup secara layak	1. Meningkatkan keterampilan hidup (<i>life skill</i>)	1. Pelatihan Keterampilan hidup

Tabel 5.2. Lanjutan					
		<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya keterampilan teknologi budidaya Rendahnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) 		2. Meningkatkan keterampilan usaha	3. Pelatihan budidaya pertanian, pertukangan 4. Pelatihan teknologi tepat guna
4. Bediom	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya motivasi mengikuti pendidikan 	1. Memberikan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan	1. Mempermudah akses pelayanan pendidikan 2. Merobah pola pikir untuk hidup lebih layak	1. Penyuluhan Sosial pentingnya pendidikan 2. Pemberian beasiswa pendidikan
	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya keterampilan teknologi budidaya • Rendahnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) • Tidak memiliki lahan usaha produktif 	1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Orang Rimba agar dapat hidup secara layak dan wajar	1. Meningkatkan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) 2. Memberikan lahan usaha produktif 3. Meningkatkan keterampilan usaha	1. Pelatihan Keterampilan hidup 2. Pelatihan teknologi budidaya pertanian 3. Pelatihan teknologi tepat guna
5. Berkampung					

5.5. Model Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai topik pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba bahwa pelaku utama dalam proses pembangunan sosial adalah Orang Rimba itu sendiri. Meskipun demikian dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan Orang Rimba dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan yang terjadi maka diperlukan pihak luar yang akan berperan sebagai mitra yang sejajar dalam melakukan adaptasi dan menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Peran pihak luar baik itu individu maupun lembaga adalah sebagai fasilitator, mediator dan katalisator yang mendampingi komunitas Orang Rimba dalam melakukan identifikasi kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki komunitas Orang Rimba sekaligus untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan perubahan sosial ke arah peningkatan kualitas hidup yang lebih layak dan sejahtera.

Berdasarkan hasil kajian analisis peran berbagai *stakeholders* yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat adat Orang Rimba, dengan melihat kewenangan dan program yang dilaksanakan baik dari kalangan pemerintah, perusahaan swasta dan kalangan LSM terlihat bahwa masing-masing memiliki perhatian sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang ada pada lembaga atau instansi masing-masing. Oleh karena itu penulis membuat model pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba sebagaimana terlihat dalam gambar 5.1.

Pada gambar 5.1. tahap pertama dari proses pembangunan sosial adalah perlunya melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) dan mengidentifikasi kebutuhan (*need assesment*) bukannya daftar keinginan (*list of want*). Hal ini penting agar didapatkan informasi yang cukup mengenai situasi dan kondisi sosial budaya ekonomi, lingkungan, politik, hukum dan HAM yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung daripada masyarakat adat Orang Rimba serta adanya informasi yang akurat mengenai daftar kebutuhan dari komunitas yang akan dirunut berdasarkan skala prioritas rencana program. Proses pemetaan sosial dan identifikasi kebutuhan ini harus dilakukan oleh komunitas Orang Rimba

dengan di fasilitasi oleh setiap instansi dan lembaga yang memiliki kewenangan dan keterkaitan program bagi komunitas adat Orang Rimba.

Tahap selanjutnya adalah komunitas Orang Rimba menentukan skala prioritas program yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak. Setelah ditentukan prioritas program yang dibutuhkan komunitas membangun kerjasama kemitraan dengan para stakeholders untuk mematangkan rencana program secara teknis dan lebih rinci untuk kemudian dilaksanakan, dan dievaluasi secara bersama guna mengukur pencapaian hasil program dengan indikator yang telah ditetapkan. Masing-masing para pihak dalam hal ini yang berhasil diidentifikasi adalah pihak pemerintah baik PUSAT, PEMPROV dan PEMKAB, Balai TNBD, LSM, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan Swasta yang memiliki kepentingan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan komunitas Orang Rimba bertemu dalam forum kemitraan untuk melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi untuk melakukan sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan program masing-masing lembaga sesuai dengan tujuan dan kapasitas lembaga. Forum kemitraan ini diinisiasi oleh komunitas Orang Rimba dan difasilitasi oleh para pihak yang memiliki kepentingan bagi peningkatan kesejahteraan komunitas Orang Rimba.

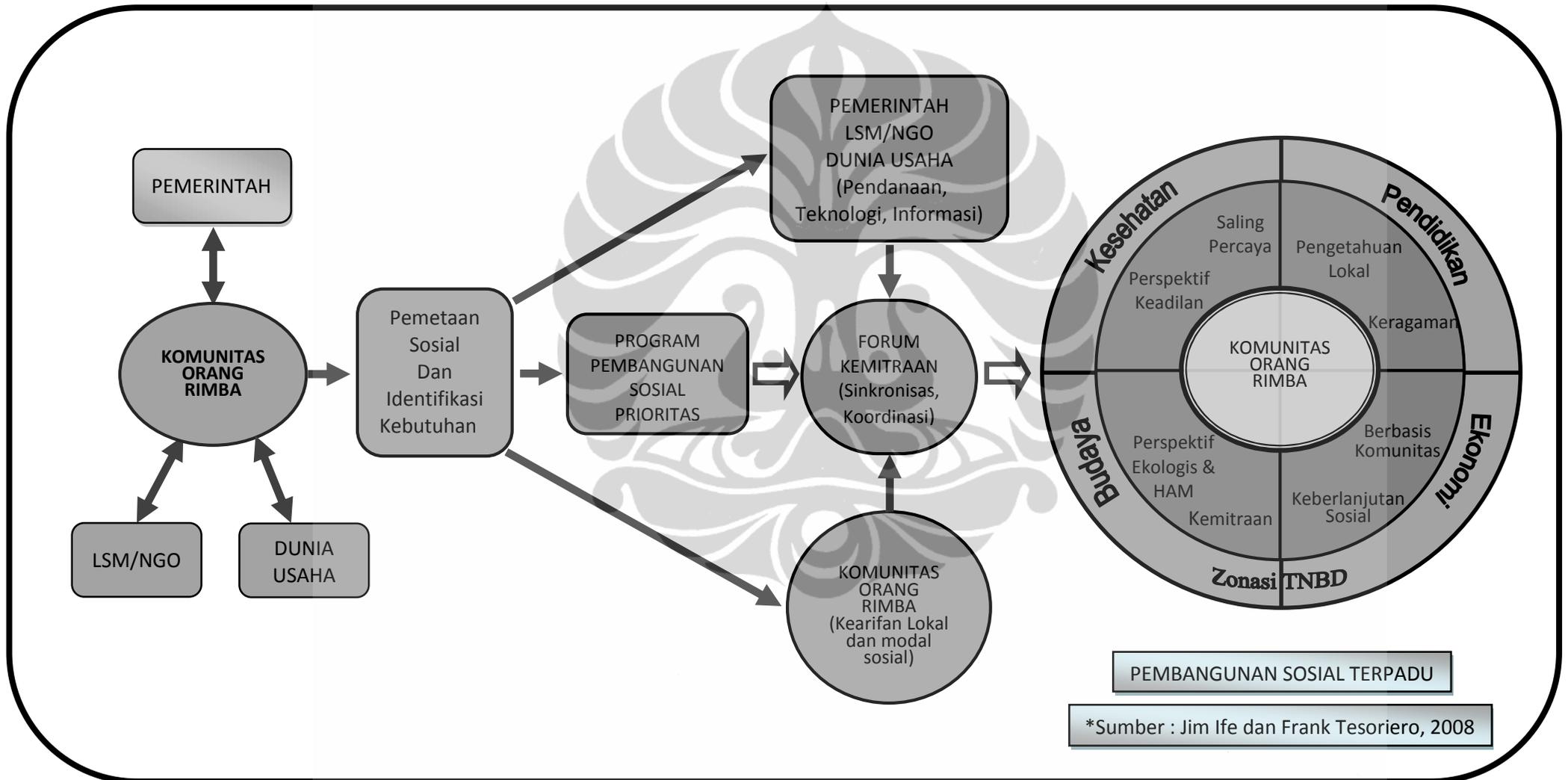
Tahap selanjutnya pelaksanaan pembangunan sosial oleh komunitas Orang Rimba bersama masing-masing para pihak yang memfasilitasi dalam pelaksanaan implementasi program. Pada gambar tersebut terlihat pada bagian tengah adalah komunitas Orang Rimba yang akan menjadi pelaku utama. Sebagai pelaku utama komunitas Orang sudah memiliki potensi modal sosial berupa jaringan komunitas dan kekuatan kerjasama antar anggota serta kearifan lokal yang sudah ada dalam kehidupan budaya mereka. Bagian berikutnya adalah perspektif pengembangan masyarakat yaitu perspektif ekologi dan perspektif keadilan sosial dan HAM yang akan menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan program sehingga tujuan pembangunan sosial dapat dicapai. Selain perspektif pengembangan ada prinsip yang lahir dari perpaduan dua perspektif tersebut yaitu prinsip berbasis komunitas, keanekaragaman, keberlanjutan sosial, saling percaya (*trust*), kemitraan, dan menghargai pengetahuan lokal yang akan semakin mendorong dan acuan dalam proses implementasi pembangunan sosial.

Bagian terluar dari lingkaran adalah aspek pelayanan program pembangunan sosial yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, dan perumahan.

Bagian terakhir dari gambar adalah tercapainya tujuan pembangunan sosial yaitu kesejahteraan komunitas adat Orang Rimba. Untuk melihat pencapaian tingkat kesejahteraan digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Tingkat Kemiskinan.



Diagram 5.1. Model Pembangunan Sosial Terpadu Masyarakat Adat Orang Rimba



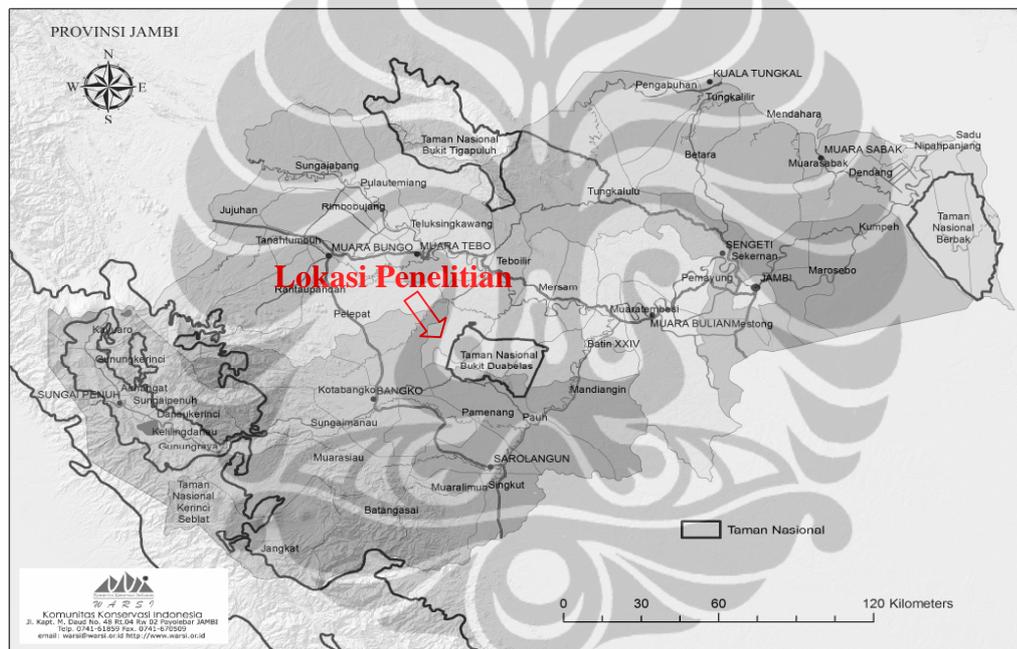
BAB 4 ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Karakteristik Daerah Penelitian

4.1.1. Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD)

4.1.1.1. Status Kawasan dan Sistem Pengelolaan

Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas disingkat TNBD, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh pemerintah pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000, tertanggal 23 Agustus 2000. Luas areal



Sumber Peta : KKI-

Gambar 4.1. Lokasi Penelitian di Kawasan TN. Bukit Dua Belas (TNBD)

keseluruhan kawasan TNBD seluas 60.500 hektar yang terletak di Kabupaten Batanghari \pm 65% (37.000 Ha), Kabupaten Sarolangun \pm 15% (9000 Ha) dan Kabupaten Tebo \pm 20% (11.500 Ha).

Salah satu tujuan penetapan kawasan TNBD secara khusus adalah untuk melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya Orang Rimba yang sejak lama berada di dalam kawasan taman nasional. Untuk pengelolaan kawasan taman nasional ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.29/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006 membentuk Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan TNBD dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Proses perubahan status kawasan hutan dataran rendah Bukit Dua Belas dari Cagar Biosfer ke Taman Nasional pada hakekatnya telah mengurangi ruang hidup komunitas Orang Rimba. Jika pada awalnya dalam penetapan status kawasan hutan menjadi Cagar Biosfer pertimbangan utamanya secara tegas diperuntukan untuk kawasan hidup Orang Rimba sedangkan dalam surat keputusan penunjukkan kawasan TNBD tidak ada bagian yang menyebutkan peruntukkan TNBD untuk kelangsungan hidup orang rimba meskipun hal ini menjadi salah satu bagian pertimbangan dalam penetapan perubahan status kawasan menjadi kawasan TNBD.

Perubahan status kawasan hutan dataran rendah Bukit Dua Belas menjadi Taman Nasional menjadikan kawasan ini berfungsi utama sebagai kawasan konservasi yang menimbulkan dampak pada timbulnya konflik kepentingan antara pengelola kawasan dan komunitas Orang Rimba. Bagi pihak pemerintah pengelolaan TNBD dikembangkan melalui “sistem zonasi” dimana terdapat 6 sistem zonasi kawasan, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona pemanfaatan terbatas, zona pemanfaatan pariwisata alam, dan zona rehabilitasi. Sementara bagi komunitas Orang Rimba sistem zonasi kawasan justru mempersempit bahkan menghilangkan hak pengelolaan dan pemanfaatan tradisional mereka.

Sejak tahun 2006 sampai saat ini pengelolaan kawasan sudah dibawah kelembagaan Balai Taman Nasional, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai TNBD rencana pengelolaan TNBD belum juga ditetapkan secara resmi dikarenakan draft RPTN masih dalam proses finalisasi dan selanjutnya akan dilakukan konsultasi publik sebelum ditetapkan menjadi suatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

⁶ Buku Informasi Mengenal Taman Nasional Bukit Dua Belas, Balai TNBD-Ditjen PHKA DEPHUT RI, 2007.

Berdasarkan peraturan perundangan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem RPTN akan dilakukan dengan sistem zonasi, dari 6 sistem zonasi yang direncanakan, yang berkaitan dengan keberadaan komunitas Orang Rimba adalah zona inti berfungsi untuk aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan budaya Orang Rimba, zona rimba berfungsi untuk ruang kehidupan dan penghidupan Orang Rimba dan zona pemanfaatan tradisional diperuntukkan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan kehidupan dan penghidupan komunitas Orang Rimba untuk fungsi ruang budidaya tanaman pangan, komoditi jual dan biota obat hutan (*agroforestry*), dan ruang interaksi komunitas Orang Rimba dengan masyarakat luar, dan ruang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan komunitas Orang Rimba.⁷

Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang telah pernah disusun oleh BKSDA seharusnya menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi Balai TNBD untuk menghindari konflik kepentingan dengan komunitas Orang Rimba. RPTN seharusnya dapat mengakomodir atau menghargai nilai-nilai kearifan tradisional yang positif dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan yang dimiliki dalam kebudayaan Orang Rimba. Komunitas Orang Rimba seharusnya menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan, mengingat kawasan hutan tersebut adalah ruang kehidupan mereka yang selama ini telah mereka buktikan sejak ratusan tahun bahwa norma dan perilaku mereka mampu untuk menjaga dan memanfaatkan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan hutan dataran rendah yang tersisa di Provinsi Jambi ini.

Visi lembaga TNBD terlihat jelas keberpihakan terhadap Orang Rimba yakni “Bekerja secara profesional untuk mewujudkan fungsi TNBD sebagai kawasan pelestarian alam dan kawasan budaya komunitas Orang Rimba melalui pengelolaan dan pengembangan sistem zonasi, yang memberikan sumbangan optimal bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat adat dan lokal serta pembangunan daerah dan nasional, yang mengangkat citra pengelolaan konservasi nasional” Hal ini diperkuat oleh misi Balai TNBD yang

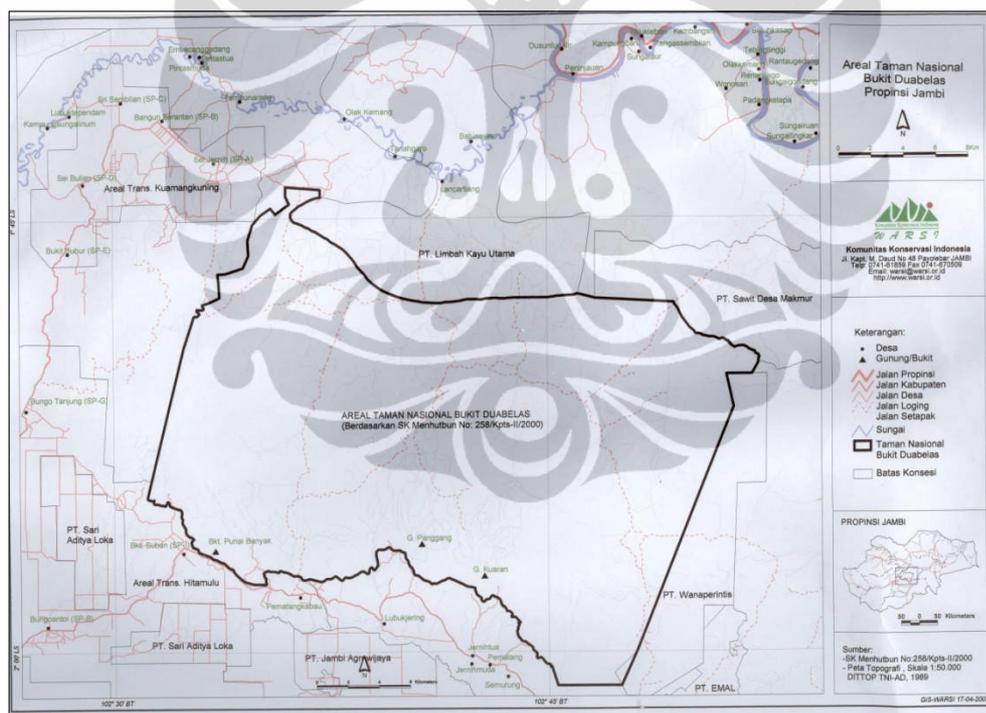
⁷ Ibid, Balai TNBD.

berkaitan dengan Orang Rimba yaitu “menjamin kelangsungan eksistensi kawasan sebagai kawasan budaya dan sumber kehidupan ekonomi alternatif bagi komunitas Orang Rimba dan menyelenggarakan kemandirian dan keberdayaan masyarakat adat dan lokal serta kemitraan usaha dalam pemanfaatan sumber daya kawasan”.⁸

Visi dan misi lembaga TNBD seharusnya dapat dijadikan dasar pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba, bukan hanya sekedar slogan lembaga yang lebih mengutamakan pembangunan konservasi daripada pembangunan manusia.

4.1.1.2. Letak Geografis dan Potensi Kawasan

Secara geografis TNBD terletak diantara arah Utara $01^{\circ}44'35''$ LS, arah Selatan $2^{\circ}03'15''$ LS, arah Timur $102^{\circ}31'37''$ BT dan arah Barat $102^{\circ}48'27''$ BT.



Sumber Peta : KKI-WARSI

Gambar 4.2. Peta Letak Geografis TN. Bukit Dua Belas

Kawasan TNBD merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan tropis dataran rendah dan merupakan daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS)

⁸ Op.Cit. Balai TNBD, 2007.

Batanghari. Kawasan ini memiliki keanekaragaman flora yang bernilai tinggi, termasuk jenis tanaman yang tergolong langka dan dilindungi. Jenis flora yang terdapat di kawasan TNBD antara lain tumbuhan obat meliputi 128 jenis yang terbagi atas 101 jenis tanaman obat dan 27 jenis cendawan obat. Jenis-jenis tumbuhan obat ini telah dimanfaatkan oleh komunitas Orang Rimba untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit.

Sebagian besar tumbuhan obat masih tergolong tumbuhan liar yang belum di budidayakan. Komunitas Orang Rimba telah melakukan pemeliharaan terhadap sebagian kecil tumbuhan obat. Keberadaan jenis tumbuhan obat ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk memberdayakan komunitas Orang Rimba baik sebagai sumber pendapatan dan ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan alternatif.

Kawasan TNBD memiliki tidak kurang dari 41 jenis anggrek dari 18 marga yang hidup di TNBD. Berbagai ragam jenis pohon penghasil getah, kayu, daun dan penghasil buah juga banyak di temukan seperti pohon jelutung (*Dyera costulata*) pohon ini disadap oleh Orang Rimba dan getahnya (*styrax benzoin*) memiliki nilai ekonomis untuk di jual, pohon tembesu (*Fragraea fragrans*) kayu ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diburu oleh para penebang kayu illegal. Nilai ekonomis kayu ini yang dapat menjadi ancaman bagi kawasan TNBD dan komunitas Orang Rimba.

Komunitas Orang Rimba dapat saja melakukan penebangan pohon yang dilindungi dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena adanya relasi dengan para penebang kayu yang berperan sebagai pembeli kayu hasil tebangan atau pemberi modal untuk aktivitas penebangan. Hasil wawancara dengan informan aktivitas penebangan pohon yang dilindungi oleh Orang Rimba untuk kepentingan ekonomi uang atau barang kebutuhan sekunder harus dibatasi dan tidak boleh atau dilarang.⁹

Dalam kawasan hutan TNBD terdapat pohon penghasil buah seperti durian (*Durio sp*), sebutan Orang Rimba pohon *Tengguli* (*Gardenia augusta*), pohon

⁹ Hasil Wawancara dengan RD, 12 November 2009.

penghasil daun yang dipergunakan untuk atap rumah dapat bertahan 4-5 tahun seperti pohon manggis atau dalam sebuta Orang Rimba pohon *bengkal* (*Garcinia nervosa*) pohon palem langka yang dikenal Orang Rimba sebagai *Nengah Gajah* dan tumbuhan rotan yang juga memiliki nilai ekonomi cukup tinggi untuk dijual.

Selain keragaman flora, kawasan TNBD juga memiliki keragaman fauna yang dilindungi dan langka seperti Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Tapir (*Tapirus indicus*), Ayam Hutan (*Gallus gallus*) dan Enggang Gading (*Rhinoplax vigil*) dan beragam jenis fauna lainnya. Kawasan TNBD dengan keragaman flora dan fauna dan kelangkaan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah serta keberadaan komunitas Orang Rimba memiliki potensi wisata yang sangat tinggi.

Kawasan TNBD merupakan kawasan hutan hujan dataran rendah Sumatera yang masih tersisa dan merupakan daerah tangkapan air untuk daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, dengan Sub DAS Air Hitam Hulu, Sub DAS Kejasung, dan Sub DAS Makekal. Nama Bukit Duabelas diperoleh dari keberadaan duabelas bukit yang membujur dari timur ke barat. Bukit tertinggi adalah bukit Kuran dengan ketinggian 438 dari permukaan laut. Secara administratif TNBD tercakup dalam tiga wilayah kabupaten, yakni Sarolangun, Batanghari dan Tebo. Kecamatan yang mencakup wilayah Daerah Penyangga TNBD adalah Kecamatan Air Hitam di Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Tebo Iilir, Tebo Ulu dan Muara Tabir di Kabupaten Tebo dan Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Batin XXIV di Kabupaten Batanghari.

4.1.1.3. Karakteristik Daerah Penyangga TNBD

Secara umum karakteristik daerah penyangga TNBD terdiri atas beberapa peruntukan sebagai berikut : 1. Daerah Penyangga Bagian Utara, sebagian besar merupakan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Limbah Kayu Utama (PT. LKU), areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Desa Makmur (PT. SDM) dan lahan pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Sei. Ruan I, Desa Sei. Ruan II, Desa Peninjauan, Desa Sungai Lingkar, Desa Kembang Seri, Desa Batu Sawar,

Desa Padang Kelapo dan Desa Kampung Baru. 2. Daerah Penyangga Bagian Selatan terdiri atas areal transmigrasi Hitam Ulu Desa Pematang Kabau dan Desa Bukit Suba, areal perkebunan kelapa sawit PT. Sari Aditya Loka (PT.SAL), areal perkebunan kelapa sawit PT. Jambi Agro Wiyana (PT.JAW), areal perkebunan sawit PT. Era Mitra Agro Lestari A (PT.EMAL A) dan lahan pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Baru, Desa Semurung, Desa Jernih, dan Desa Lubuk Jering. 3. Daerah Penyangga Bagian Timur merupakan areal HTI PT. Wana Perintis(PT.WP), areal perkebunan sawit PT. Era Mitra Agro Lestari B (PT. EMAL B), lahan pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Jelutih, Desa Olak Besar, Desa Paku Aji dan Desa Hajran. 4. Daerah Penyangga Bagian Barat terdiri atas areal transmigrasi Kuamang Kuning (SP.A, SP.E dan SP.G), areal transmigrasi Hitam Ulu (SP.B), areal perkebunan sawit PT. SAL, Areal Penggunaan Lain (APL), dan kawasan hidup komunitas adat Orang Rimba yang berada di luar kawasan TNBD.¹⁰

Pada kawasan Daerah penyangga TNBD terdapat desa asli dan desa yang berasal dari program transmigrasi, terdapat 23 desa yang termasuk dalam 6 kecamatan dan tiga kabupaten. Total jumlah penduduk dikawasan penyangga sebanyak 42.312 jiwa terdiri dari 21.317 Laki-laki dan 20.995 perempuan. Kawasan daerah penyangga TNBD yang saat ini diperuntukkan areal transmigrasi, areal HTI dan areal perkebunan kelapa sawit sebelumnya adalah merupakan kawasan hutan sebagai ruang hidup Orang Rimba. Pada saat dimulainya pembukaan kawasan hutan oleh perusahaan HPH pada pertengahan tahun 1970-an sebenarnya telah mulai terjadi pengurangan dan tekanan terhadap wilayah kehidupan Orang Rimba, karena banyak pohon dan wilayah hutan yang memiliki fungsi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat adat Orang Rimba yang hilang.

¹⁰ Op.Cit.Balai TNBD, 2007

Keberadaan Orang Rimba di kawasan hutan Bukit Dua Belas, jauh lebih dulu sebelum kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan konservasi. Orang Rimba sudah mendiami hutan-hutan di Sumatera Tengah selama beberapa abad hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisan (Forbes 1884: 124, Van Dongen, 1850; Damsté 1901: 281-284 *dalam* Weintré, 2003). Sejak ratusan tahun lalu, paling tidak sejak tahun 1500-an sesuai catatan para penjelajah eropa, Orang Rimba telah melakukan hubungan dagang dan menjalin hubungan kekuasaan dengan kerajaan Jambi. Orang Rimba membayar upeti (jajah) kepada kerajaan berupa barang yang bisa didagangkan dan hasil kerajinan agar keberadaan Orang Rimba diakui dan tidak diusik.¹²



Sumber Photo : Johan Weintre

Gambar 4.4. Photo Kelompok Orang Rimba TNBD Tahun 1915

Kawasan hutan Bukit Dua Belas pertama sekali ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada tahun 1987 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.461/Kpts-II/1987 tanggal 12 Pebruari 1987, dalam surat keputusan penetapan Cagar Biosfer (CB) tersebut salah satu pertimbangan penetapan kawasan adalah bahwa kawasan tersebut untuk melindungi kehidupan Orang Rimba.

Status kawasan konservasi Cagar Biosfer Bukit Dua Belas kemudian dirubah menjadi kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) pada tahun

¹² Lebih jauh lihat http://www.goodreads.com/story/show/2412.Orang_Rimba_Menantang_Zaman_Achmanto_Mendatu diakses 16 Oktober 2009 11.00 WIB.

2000 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 258/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, salah satu tujuan penetapan kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas secara khusus adalah melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya Orang Rimba (Suku Anak Dalam) yang sejak lama berada di Kawasan TNBD.¹³

Peningkatan status kawasan cagar biosfer menjadi taman nasional, salah satu faktor yang mendorong adalah adanya usulan forum LSM lingkungan di Provinsi Jambi yang tergabung dalam Forum Penyelamat Hutan Jambi(FPHJ) yang dimotori oleh KKI-WARSI sebagai LSM yang telah melakukan kegiatan konservasi dan pengembangan masyarakat adat Orang Rimba di kawasan Bukit Dua Belas kepada Menteri Kehutanan untuk memperluas kawasan konservasi Cagar Biosfer. Ide perluasan Cagar Biosfer dilatar belakangi dari hasil identifikasi wilayah kehidupan Orang Rimba oleh KKI-WARSI yang menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar aktivitas kehidupan mereka berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas, kawasan Hutan Produksi Tetap serta kawasan hutan sekunder yang tersisa diluar kawasan hutan Cagar Biosfer.

Hasil sejumlah wawancara mendalam menunjukkan bahwa di wilayah hutan yang dikelola HPH dan wilayah pemukiman transmigrasi tersebut terdapat tanah kelahiran (*tano peranokon*), tanah pemakaman (*tano pasohon*) dan lahan pohon buah-buahan (*banuaron*) yang telah di tanam oleh nenek moyang mereka.¹⁴

Penetapan kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas pada hakikatnya adalah sebagai upaya untuk melindungi kawasan hidup dan kehidupan Orang Rimba yang tengah mengalami berbagai tekanan dari kegiatan perusahaan swasta di bidang kehutanan dan perkebunan serta pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi. Selain itu tujuan khusus penetapan kawasan TNBD lainnya adalah melindungi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan kawasan Hutan Hujan Tropika Dataran Rendah yang memiliki keanekaragaman flora, fauna dan ekosistem yang tinggi dari ancaman kepunahan.

Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas merupakan kawasan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan komunitas adat

¹³ Op.Cit. Balai TNBD, 2007.

¹⁴ Op.Cit Wawancara dengan TR dan NG.

Orang Rimba, dikarenakan kawasan hutan ini merupakan satu-satunya sumber kehidupan mereka. Meskipun sudah ada beberapa “rombong” (kelompok) yang sudah tinggal menetap diluar kawasan hutan tetapi sumber matapencaharian mereka masih tergantung pada Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dan aktivitas berburu dari kawasan hutan TNBD. Bagi kelompok yang sudah *bediom* tinggal di hutan masih lebih baik karena tidak memerlukan uang dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal ini dapat disimpulkan dari ungkapan beberapa informan sebagai berikut : “masih lapang (lebih baik) dirimba, diluar ini semua harus beli tapi kalau dirimba tidak”, “kadang masuk ke rimbo gara-gara ekonomi tidak terjamin”.¹⁵

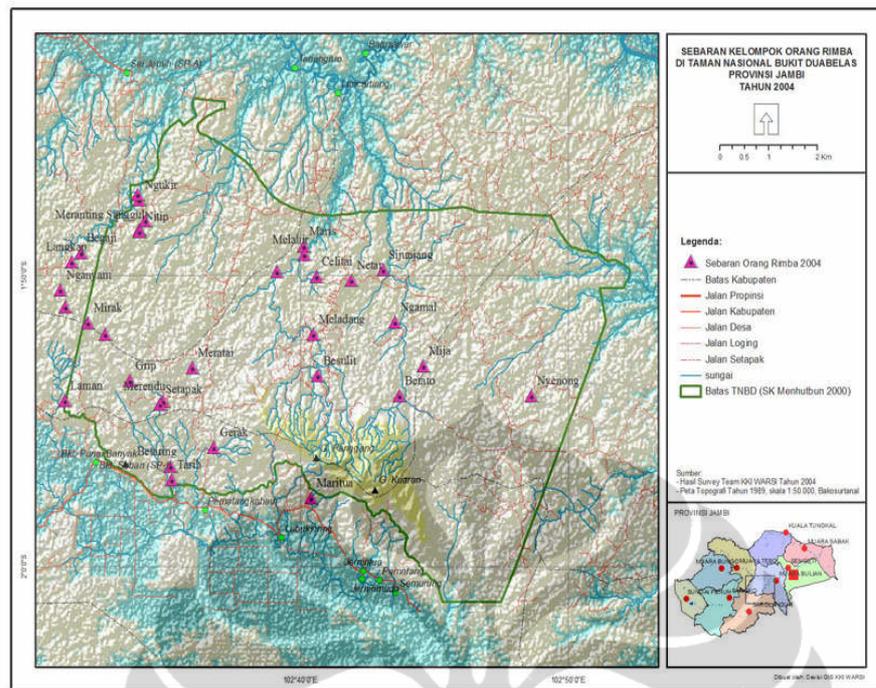
Kawasan hutan TNBD bagi orang rimba merupakan benteng terakhir bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan. Setelah sebagian kawasan hutan yang sebelumnya menjadi ruang hidup mereka di jadikan areal perkebunan, areal HTI dan areal pemukiman transmigrasi mereka akhirnya menyingkir ke arah lebih dalam yaitu kawasan hutan TNBD. Hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan Orang Rimba kawasan hutan TNBD merupakan satu-satunya harapan bagi kelanjutan hidup anak cucu mereka.¹⁶

Hutan bagi Orang Rimba adalah seluruh hidup mereka, selain sebagai tempat tinggal hutan memiliki fungsi sosial, budaya dan ekonomi bagi Orang Rimba. Orang Rimba memanfaatkan seluruh ruang hutan bagi kehidupan. Filosofi hidup mereka pun bersumber pada kehidupan hutan. Bagi Orang Rimba di kawasan TNBD memang terjadi dua pandangan mengenai kelangsungan hidup mereka di dalam hutan, sebagian mereka akan tetap bertahan sementara sebagian yang lain sudah mulai berpikir untuk menetap diluar hutan, seperti ungkapan informan berikut ini :

“Selagi ado rimbo tetap hidup dirimbo karena kito nak ninggalkan adat dirimbo itu dak bisa nian sejak terlahir dari nenek moyang kami sampai sekarang ini kami hidup di rimbo adat yang dipakai adat rimba. Jadi selagi ada hutan tetap memakai adat rimba”

¹⁵ Hasil Wawancara dengan MD dan SM, 1 Desember 2009.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan TR, NG, MB, BT, 19, 29 Nopember dan 9 Desember 2009.



Sumber Peta : KKI-WARSI

Gambar 4.5. Peta Sebaran Kelompok Orang Rimba di TNBD

Pernyataan diatas mewakili kelompok yang masih ingin menetap di dalam hutan, pertimbangan mereka adalah keterikatan akan tradisi budaya nenek moyang mereka. Tetapi lain halnya dengan Orang Rimba yang telah sering berinteraksi dengan warga desa dan masyarakat luar, terutama bagi individu yang telah memiliki tingkat ekonomi yang baik, mereka sudah berpikir untuk dapat menetap diluar, kelompok ini juga di dukung oleh kalangan anak-anak remaja yang interkaksinya dengan masyarakat luar sudah begitu tinggi. Sikap ini terlihat dari ungkapan informan sebagai berikut :

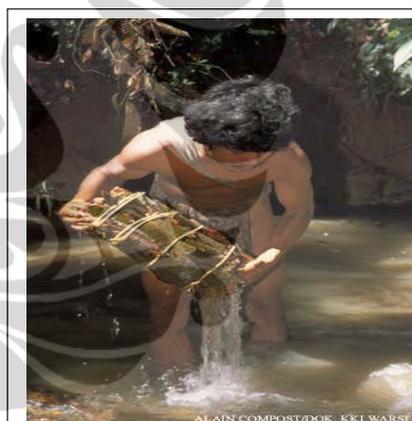
“Sebenarnya tergantung dengan orangnya jago, bagi orang yang punya pengalaman di rimba tetap masih dirimba, tapi kalau orang yang telah melepas adat di rimba akan hidup diluar. Kami orang rimba kalau ada orang 100, paling orang 20-30 yang masih dirimba yang lain sudah keluar semua. Orang Air Panas semuanya Orang Rimbo, orang Singosari semuanya Orang Rimbo, mereka lebih senang diluar”.

4.1.2.2 Karakteristik Rombongan Orang Rimba

Orang Rimba yang hidup secara berkelompok dalam rombongan terus diterpa oleh proses perubahan sosial yang disebabkan berbagai pengaruh perubahan lingkungan hidupnya baik fisik, sosial budaya, ekonomi bahkan politik. Dalam menghadapi proses perubahan sosial itu setiap rombongan menyikapi atau melakukan adaptasi secara berbeda. Pola adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitarnya berpengaruh pada sikap dan perilaku anggota rombongan dan akhirnya menjadi sikap dan perilaku rombongan dalam menghadapi perubahan yang ada.

Berdasarkan sikap dan perilaku, dan kemampuan adaptasi rombongan dalam menghadapi perubahan lingkungan hidupnya Orang Rimba dapat dibagi dalam beberapa kelompok karakter berdasarkan bentuk interaksi sosial, sumber matapencarian, konsistensi dan komitmen pada adat-istiadat, ketergantungan terhadap hutan, dan lokasi pemukiman dapat dibedakan menjadi karakter kelompok sebagai berikut¹⁷ :

1. ***Kelompok Tradisional***, kelompok ini yang masih sangat ajeg dan sangat kuat mempertahankan adat-istiadat dan norma sosial Orang Rimba, kelompok ini sangat jarang melakukan interaksi dengan orang luar dan warga desa, lokasi pemukiman terletak jauh ditengah kawasan TNBD. Sumber matapencarian sangat tergantung dengan berburu dan meramu HHNK, rombongan akan tetap bermukim di dalam hutan selamanya. Jumlah mereka saat ini hanya sebagian kecil hanya 3-5 kelompok kecil dengan jumlah anggota keluarga 15-20 kepala keluarga.



Sumber Photo : KKI-WARSI

Gbr. 4.6.
Kelompok OR Tradisional
Mencari Ikan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan RD, NG, HH, dan TR, 12 Oktober, 16, 21,29 Nopember ,2009.

2. **Kelompok Transisi**, kelompok ini sedang mengalami proses adaptasi dengan berbagai pengaruh dari luar, interaksi dengan masyarakat luar sangat intensif baik untuk keperluan ekonomi, sosial, dan politik, anggota rombongan sebagian masih bermukim di dalam hutan, sudah mengenal barang sekunder seperti HP, motor, arloji, senjata rakit (*kecepek*), sumber matapencaharian berburu, meramu dan berkebun karet di hutan dan dipasarkan keluar, kepatuhan terhadap norma dan adat-istiadat sudah mulai longgar. Anggota rombongan ada yang ingin menetap diluar dan ada juga yang menginginkan tetap hidup di hutan selamanya. Sebagian besar Orang Rimba di kawasan TNBD ada dalam kelompok ini.



Sumber Photo : www.film4.org

Gbr. 4.7. Kelompok Transisi

3. **Kelompok Pengembara**, kelompok ini memilih tinggal di kebun-kebun sawit dan karet milik warga desa atau perusahaan, mobilitas berpindah-pindah tinggi, tidak memiliki lahan, tidak memiliki pekerjaan tetap, ada yang menjadi pengemis, masih berburu, potensi konflik dengan warga desa dan perusahaan cukup tinggi karena memungut berondolan dan mencari hasil kebun warga, komitmen kepada adat istiadat sudah longgar bahkan sudah mulai dilupakan, tidak memiliki akses terhadap hutan, tidak terdaftar secara administratif sebagai penduduk desa. Kelompok ini secara ekonomi, sosial dan budaya paling marjinal dari kelompok lainnya.



Sumber Photo : KKI-WARSI

Gbr. 4.8.
Kelompok Pengembara di HTI

4. **Kelompok Bediom**, kelompok ini sudah bertempat tinggal di luar kawasan hutan, sumber matapencaharian masih tergantung pada HHNK, sumber pendapatan diluar dari bekerja sebagai buruh harian membersihkan kebun

warga desa dan perusahaan, kaum perempuan dan anak-anak mengumpulkan *berondolan* (buah sawit matang yang jatuh ke tanah), beberapa orang bekerja sebagai satpam di perusahaan sawit, sebagian besar kondisi ekonomi anggota sangat marjinal termasuk kelompok miskin karena tidak memiliki lahan kebun dan pekerjaan tetap. Sudah memeluk agama (Islam dan Kristen) Anggota rombongan ada yang berpikir tetap bertahan diluar hutan, namun masih ada anggota yang berpikir akan balik kehutan bila kondisi ekonomi mereka semakin sulit, sebagian besar tinggal di lokasi perumahan dari program bantuan pemerintah (KEMENSOS RI dan KPDT).



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr.4.9.
Kelompok Bediom

3. ***Kelompok Berkampung***, kelompok ini sudah menetap di desa, mulai membangun rumah sendiri, berkebun karet atau sawit, interaksi dengan warga desa baik walaupun masih ada stereotipe warga desa, sudah memakai adat-istiadat melayu umumnya, telah memeluk agama, sudah terdaftar sebagai warga desa, kondisi ekonomi relatif mapan.

4.1.2.3. Sejarah Asal Usul Orang Rimba

Studi orang Rimba pernah dilakukan oleh Johan Weintré pada komunitas orang Rimba di wilayah Taman Nasional Bukit Dua Belas., tujuan penelitiannya untuk mengetahui sejarah asal-usul dan prasejarah kawasan/wilayah hidup orang Kubu dan orang Rimba, memahami budaya, tindakan dan filosofi masyarakat orang Rimba, serta untuk mengetahui mengenai konsep atau pola pikir dan kosmos orang Rimba dan keinginan mereka pada masa depan.

Hasil penelitiannya Weintre menunjukkan sejarah asal usul orang Rimba yang memiliki tiga versi yaitu versi *pertama*, berdasarkan tulisan antropologi Belanda diantaranya adalah Forbes yang pernah menulis tentang orang Rimba. Forbes menggambarkan menurut cerita yang dia dengar, orang Rimba berasal dari

keturunan dari saudara termuda yang tidak disunat, sebab di sekitarnya tidak ada alat yang cukup tajam untuk melakukan penyunatan. Pemuda merasa malu, sehingga dia mengungsi ke hutan dan berpisah dari kelompoknya serta dua saudara laki-lakinya yang sudah disunat. Menurut mitologi orang Kubu Sumatra tengah mereka memang keturunan dari saudara yang mengungsi ke hutan (Forbes 1884: 124).

Versi *kedua* orang Kubu menceritakan kepada Van Dongen bahwa mereka keturunan dari pasangan saudara dan saudari kapal bajak, yang dilepaskan oleh nahkoda waktu perempuan itu hamil muda di kapal. Mereka diturunkan di pantai hulu sungai di Sumatera. Pasangan tersebut memiliki banyak anak dan membangun kampung Ulu Kepajang dekat dusun Penamping di sungai Lalan. Menurut pendapat van Dongen Kubu atau *ngubu* artinya hutan. Masih ada banyak orang Kubu yang tinggal sekitar lokasi Ulu Kepajang. (Van Dongen, 1850).

Versi *ketiga*, mitos mengenai garis keturunan orang Kubu yang diceritakan kepada Damsté oleh kepala laras Datoeq Padoeko Soetan yang ceritanya berikut ini: Konon peristiwa pada waktu lampau Daulat yang dipertuan dari Pagaruyung duduk di batu di pinggir sungai setelah dia sholat. Dia masukkan sirih ke dalam mulut, kemudian dia mengeluarkannya, selanjutnya batu yang dia duduki bergerak dan dia sadar bahwa sebenarnya dia duduk di atas kura-kura besar yang ada di sungai. Dengan kekuasaan Allah, kura-kura tersebut bunting dan melahirkan anak manusia laki-laki, sebab kura-kura menelan sirih yang dikeluarkan oleh raja. Tiap hari beberapa anak kampung bermain di sungai dan anak manusia laki-laki itu ikut bermain dengan mereka. Setelah bosan bermain, anak manusia kura-kura itu pulang ke ibunya.

Kabar mengenai anak kura-kura didengar raja kemudian raja menyuruh mencari anak tersebut supaya dibawa ke istananya. Raja Pagaruyung bertanya kepada anak siapa bapaknya. Anak langsung menunjuk kepada raja, dia sangat heran dan bertanya kepada anak tersebut bagaimana dia menjadi bapak anak kura-kura. Anak tersebut menjawab bahwa menurut ibunya, waktu raja duduk di atasnya dan mengeluarkan sirihnya yang ditelan ibunya, dia langsung hamil dan melahirkan dia. Raja berpikir beberapa saat dan berkata bahwa sebetulnya anak

itu benar dan peristiwa itu terjadi. Lalu raja mengumumkan kepada rakyat bahwa anak tersebut, yang ibunya tenggelam waktu bajir, adalah benar-benar anaknya.

Beberapa tahun kemudian, raja Daulat yang dipertuan dari Pagaruyung, menjelaskan kepada kepala daerah, bahwa anaknya akan menjadi raja negeri dari kota Tujuh, Sembilan Kota, Pitajin Muara Sebo, Sembilan Lurah sampai daerah terpencil Jambi. Mereka semua senang, tetapi pada waktu singkat mereka mendapat kabar bahwa anak tersebut adalah keturunan dari kura-kura. Setelah mereka tahu asal usul raja, mereka tidak setuju dan tidak menerima raja yang berketurunan kura-kura sebagai rajamereka. Lalu mereka menyingkir ke hutan dan hidup disana. Itu cerita sejarah orang Kubu (Damsté 1901: 281-284).

Versi lain mengenai asal muasal keturunan Orang Rimba dari hasil wawancara dengan informan mengenai asal-usul Orang Rimba di kawasan hutan Bukit Dua Belas terungkap ketika peneliti menanyakan tentang asal mula institusi lembaga Waris dan Jenang. Menurut Orang Rimba Waris yang berada di desa atau kampung adalah memiliki ikatan keturunan yang sama yaitu berasal dari buah gelumpang yang terdiri dari tiga bersaudara. Satu perempuan dan dua laki-laki. Saudara yang laki-laki memilih tinggal di dusun sedangkan yg perempuan tetap di dalam hutan. Satu orang saudara laki-laki tinggal di Desa Tanah Garo disebut Pangkal Waris sedangkan yg satu orang lagi tinggal di Desa Paku Aji disebut Ujung Waris.¹⁸

Menurut Weintre (2001) kebudayaan orang Rimba selalu dipengaruhi oleh perubahan pola pikir individu dan *input* perubahan dari luar, artinya budaya orang asing. Sejak lama orang Rimba disamping sebagai *hunters and gatherers* juga terlibat perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti alat dapur serta pisau dan tombak. Kelihatannya bahwa membayar upeti (*tribute*), ke kerajaan atau tukar barang kepada pengantar atau pedagang, supaya orang *Terang* dari hilir sungai tidak perlu masuk dan mengganggu orang Rimba di kawasan tradisional.

Sistem kekerabatan orang Rimba adalah *matrilineal* yang sama dengan sistem kekerabatan budaya Minangkabau. Tempat hidup pasca pernikahan adalah *uxorilokal*, artinya saudara perempuan tetap tinggal didalam satu pekarangan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan SR 17 Des 2009.

sebagai sebuah keluarga luas *uxorilokal*. Sedangkan saudara laki-laki dari keluarga luas tersebut harus mencari istri diluar pekarangan tempat tinggal.

4.1.3. Demografi Orang Rimba

Data demografi Orang Rimba yang akurat memang tidak mudah diperoleh karena tingginya mobilitas kelompok berpindah lokasi pemukiman karena perilaku hidup Orang Rimba yang nomaden. Ada 3 faktor yang menyebabkan Orang Rimba berperilaku nomaden yaitu : (1) adanya budaya *melangun*; (2) aktifitas membuka ladang baru; (3) menghindari dari ancaman musuh atau lawan. Disamping perilaku nomaden, yang juga mempengaruhi sulitnya pendataan demografi Orang Rimba adalah adanya tabu dalam norma adat Orang Rimba yang tidak boleh menghitung jumlah anggota rombongan dikarenakan bisa terkena sial.¹⁹ Sehingga jika pendataan dilakukan dengan menanyakan jumlah anggota kelompok pada Informan Orang Rimba, maka informasinya cukup diragukan keakuratannya.

Berikut ini disajikan data demografi yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber baik hasil survey dan laporan penelitian yang dilakukan oleh pihak LSM dan peneliti, serta data informasi langsung dari Orang Rimba yang berhasil dicatat. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh tokoh tokoh masyarakat Orang Rimba pada pertemuan adat dikota Bangko bulan April 2006, paling sedikit terdapat 59 rombongan atau kelompok Orang Rimba yang hidup di kawasan hutan Bukit 12. Diantara 59 rombongan tersebut, beberapa ada yang mulai hidup dan menyatukan diri dengan kehidupan desa di sekitarnya.

Secara rinci wilayah dan rombongan Orang Rimba di kawasan TNBD terbagi atas : Wilayah Air Hitam terdiri dari 13 rombongan yaitu Ninjo, Temenggung Segrip, Mlara, Betaring, Nyujut, Tumenggung Tarib, Tumenggung Mbiring, Tumenggung Majid, Nyurung, Ngerak, Melapak, Perusik, dan Laman. Wilayah Kejasung Besar terdiri dari 4 rombongan yaitu Meladang, Ngamal Celitai, Bepak Celitai. Wilayah Kejasung Kecil terdiri dari 6 rombongan yaitu Ngelisau, Tumenggung Kecik, Nyenong, Mulung, Besulit, dan Nekan. Wilayah Sungai

¹⁹ Op.Cit. Wawancara dengan TR.

Terap terdiri dari 4 rombongan yaitu Marituha, Nyamping, Mlino, Tampung, dan Pelida.

Wilayah Makekal Hulu terdiri dari 22 rombongan yaitu Tumenggung Mirak, Beramal, Bepak Kluhu, Setapak, Bepak Nulis, Bepak Ternong Bepak Belajar Nyejuk Pengusai Tengganaï langkap Depati Begaji Bepak Marak Begangso Bepak Berambu Tengganaï Ngembar Bepak Nguncang Bepak Bedayung Tumenggung Bayu Pembebar Gaek patoh Bepak Besadu Bepak Ketalo. Wilayah Makekal Hilir terdiri dari 10 rombongan yaitu terdiri dari Tumenggung Ngukir, Bepak Bepiun, Kepala Adat, Wakil Mentiko, Depati Nangkabah, Depati Pengelam, Depati Laman Senjo, Bepak Bekatar, Wakil Tuha Pelindung, dan Wakil Ngadap.²⁰

Berdasarkan pendataan LSM Warsi pada tahun 2002 menyebutkan, yang bermukim di TNBD ada sebanyak 1.300 jiwa, di TNBT 364 jiwa dan di sepanjang jalan Lintas Sumatera 1.259 jiwa, sehingga jumlah keseluruhan 2.923 jiwa. Sedangkan hasil pendataan KKI Warsi tahun 2008 menyebutkan, jumlah Orang Rimba di TNBD tetap 1.300 jiwa, di TNBT 434 jiwa dan di sepanjang jalan Lintas Sumatera sebanyak 1.375 jiwa. Jumlah keseluruhan 3.109 jiwa. Artinya, hanya ada penambahan 186 jiwa sejak tujuh tahun terakhir.²¹

Data populasi Orang Rimba tahun 2009 dikawasan TNBD berdasarkan pendataan dalam laporan penelitian berjumlah 263 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 971.²² Data ini diperoleh berdasarkan informasi dari para Temenggung yang di data oleh peneliti. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

²⁰ Pengendum dan KOPERHAM, Jejak Langkah Orang Rimba, 2006.

²¹ http://oase.kompas.com/read/xml/2009/03/18/0136059/kesehatan.orang.rimbaterancam_di_download_pada_tanggal_21_Juli_2009_13.38_Wib.

²² Karno Sasmita, Etnoekologi Perladangan Orang Rimba, Tesis Sekolah Pascasarjana Ilmu Kehutanan UGM, 2009.

Tabel 4.1.
Data Demografi Orang Rimba di Kawasan TNBD Tahun 2009

No.	Kelompok	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Temenggung Tarib	20	97	
2	Temenggung Grib	56	260	
3	Temenggung Din	12	69	
4	Temenggung Marituha	30	144	
5	Temenggung Majid	17	70	
6	Air Panas	40	112	
7	Singosari	12	47	
8	Temenggung Ngukir	34	128	Belum terdata semua
9	Temenggung Celitay	42	144	Belum terdata semua
	Jumlah	263	971	1 kelompok temenggung belum terdata

Sumber : Karno Sasmita, 2009.

Data demografi Orang Rimba selanjutnya diperoleh dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESOS dan KESBANGLINMAS) Kabupaten Sarolangun yang berhasil melakukan pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT) istilah DEPSOS terhadap masyarakat adat Orang Rimba berdasarkan kelompok yang tersebar dalam wilayah kecamatan Kabupaten Sarolangun. Hasil pendataan tercatat total jumlah sebanyak 407 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 1.830. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Berdasarkan data berbagai pihak yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa populasi terbesar Orang Rimba terdapat di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, besarnya populasi Orang Rimba dikawasan tersebut disebabkan masih relatif tingginya ketersediaan sumber-sumber kehidupan bagi Orang Rimba seperti rotan, getah, jernang, kayu dan buah-buahan, hal ini diperkuat dari informasi cerita sejarah asal-usulnya Orang Rimba bahwa mereka bermukim di kawasan hutan TNBD. Air Hitam Tanah Berajo Bejenang, Pangkal Waris di Tanah Garo dan Ujung Waris di Serengam, saat ini wilayah tersebut dikenal menjadi wilayah pemukiman 3 kelompok besar komunitas adat Orang Rimba yaitu Makekal, Kejasung dan Air Hitam.

Data demografi Orang Rimba yang tersedia hanya sebatas pada jumlah Kepala Keluarga (KK) dan jumlah jiwa tidak diperoleh data berdasarkan jenis kelamin, dan kelompok usia. Hal ini cukup menyulitkan dalam proses pembuatan perencanaan program yang memiliki sasaran kelompok perempuan dan anak-anak khususnya usia balita dan usia sekolah.

Tabel 4.2.
Data Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Sarolangun Thn.2007

No.	Kecamatan	Desa	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Bathin VIII	Tanjung Pulau Lintang	Sei. Pelakar	20	85
			Sei. Surian	20	83
2.	Pelawan Singkut	Lubuk Sepuh	Sei. Pingai	35	145
3.	Pauh	Sepintun	Sei. Telisik	105	396
4.	Air Hitam	Pematang Kabau Bukit Suban	Singo Sari	35	165
			Paku Aji	40	187
			Air Panas	50	270
			Punti Kayu	41	216
5.	Limun	Lubuk Bedorong	Renah Manas	25	135
			Sei. Sipa	16	66
6.	Cerminan Gedang	Kampung Tujuh	Sikamis	20	88
	Jumlah	8	11	407	1.830

Sumber : Dinas Kesos dan Kesbanglinmas Kabupaten Sarolangun.

4.2. Karakteristik Sosial, Budaya, dan Ekonomi Orang Rimba

4.2.1. Struktur Sosial Orang Rimba

Dalam melihat struktur sosial Orang Rimba yang menjadi acuan adalah organisasi sosial dan struktur sosial dalam pengertian jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Hal ini mengacu pada konsep struktur sosial yang dikemukakan Oleh Soerjono Soekanto yang melihat unsur-unsur pokok dari struktur sosial suatu masyarakat terdiri dari : kelompok sosial, lembaga sosial atau institusi sosial, kaidah atau norma sosial dan lapisan atau stratifikasi sosial.²³

²³ Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

4.2.1.1. Organisasi dan Kelompok Sosial Orang Rimba

Orang Rimba selalu hidup dalam kelompok (*rombong*), anggota kelompok terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki ikatan kekerabatan melalui keturunan dan hasil perkawinan. Contohnya anggota rombongan terdiri dari Orang tua, anak, menantu, saudara, ipar dan besan. Dalam kelompok terdiri dari keluarga inti dan keluarga luas, masing-masing keluarga memiliki rumah tersendiri dalam wilayah pemukiman dan memiliki ikatan emosional yang kuat karena mereka masih memiliki ikatan kekerabatan. Secara teori rombongan dalam masyarakat adat Orang Rimba dapat dikatakan sebagai kelompok sosial.²⁴



Sumber Photo : <http://matanews.com>

Gambar 4.10.
Orang Rimba selalu hidup secara Kelompok (Rombongan)

Rombongan Orang Rimba dapat dikatakan sebagai kelompok sosial karena memenuhi persyaratan ciri-ciri kelompok sosial antara lain adanya hubungan timbal balik secara sadar antara individu anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan baik fisik dan non fisik, seluruh anggota memiliki kepercayaan yang sama, hal terpenting dari ciri kelompok sosial adalah seluruh anggota meyakini dan mematuhi norma dan nilai yang disepakati bersama oleh setiap individu anggota kelompok. Ciri ini ada pada kelompok atau rombongan Orang Rimba.

Orang Rimba hidup secara berkelompok atau *rombong* yang terdiri dari beberapa keluarga luas atau *pesaken*. Setiap kelompok besar diketuai oleh seorang

²⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi 4, CV. Rajawali-Jakarta, 1990.

Temenggung. Orang Rimba di mendiami Kawasan TNBD terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Kelompok Air Hitam, Kelompok Makekal dan Kelompok Kejasung. Pembagian kelompok besar berdasarkan wilayah pemukiman dan ruang hidup kelompok yang selalu bermukim di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan aliran anak-anak sungai (Sub-DAS). Jadi pembagian kelompok tersebut berdasarkan nama-nama sungai yaitu Sungai Air Hitam di bagian Selatan TNBD, Sungai Makekal di bagian Barat TNBD dan Sungai Kejasung di bagian Timur TNBD.

Orang Rimba mempunyai organisasi sosial kepengurusan hidup di dalam kelompok yang dikenal dengan *pengulu*. Pengulu merupakan organisasi sosial yang bertugas mengurus dan memimpin kehidupan Orang Rimba. Susunan penghulu di masyarakat adat Orang Rimba terdiri dari, Temenggung, Wakil Temenggung, Depati, Mangku, Menti, Dubalang Batin (Hulu Balang) dan Anak Dalam. Dalam adat masyarakat Orang Rimba dikenal dengan “*empat diatas yaitu Temenggung, Wakil Temenggung, Mangku dan Depati*”.

Masing-masing memiliki peran dan tugas sesuai dengan tingkat kepemimpinan di dalam kelompok.²⁵ Meskipun berposisi pemimpin, mereka tidak bisa dianggap menduduki lapisan sosial tertinggi, hal ini dikarenakan stratifikasi sosial di masyarakat adat Orang Rimba tidak terlalu besar. Posisi mereka secara sosial relatif setara saja dengan yang lainnya. Tidak banyak keistimewaan yang mereka miliki. Paling-paling mereka berhak untuk mendapat bagian bila suatu denda dijatuhkan kepada pelanggar adat. Mereka bahkan akan didenda dua kali lipat bila melakukan pelanggaran karena dianggap lebih faham dengan aturan adat. Di luar institusi pengulu terdapat tengganai dan malim yang memiliki posisi relatif sama kuat dengan temenggung tetapi mengurus urusan khusus.

Temenggung adalah ketua kelompok, kedudukannya paling tinggi di pemerintahan, tugas utama seorang Tumenggung adalah memastikan dipatuhinya hukum adat oleh anggota-anggota rombongnya dan menyelesaikan perselisihan

²⁵ Hasil wawancara dengan SR, 17 Desember 2009.

sesama Orang Rimba maupun antara Orang Rimba dengan orang luar dan mewakili Orang Rimba kelompoknya dalam setiap forum. Temenggung memiliki kewenangan memberikan izin bagi siapapun yang mau masuk dan berinteraksi dengan Orang Rimba dan memberikan sanksi atau denda adat bagi para pelanggar adat baik itu Orang Rimba maupun Orang Terang. *Wakil Temenggung* tugasnya sama dengan Temenggung, bertugas ketika Temenggung tidak hadir atau berhalangan.



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr.4.11.

Peneliti dan Pak Temenggung Tarib

Kedudukan Temenggung dalam masyarakat Orang Rimba selain harus memenuhi persyaratan tertentu, faktor lain yang menentukan adalah hubungan garis keturunan. Jabatan Temenggung biasanya selalu diturunkan kepada anak laki-laki di dalam keluarga, apabila seorang Temenggung tidak mempunyai anak laki-laki dia dapat mewariskan jabatan temenggungnya kepada menantu laki-laki dari anak perempuan yang tertua.

Peran temenggung terhadap kelompok pada zaman dahulu sangat kuat, misalnya jika ada permasalahan di kelompok maka berkumpul beberapa depati dan satu wakil temenggung, antara depati dan wakil temenggung tidak bisa menyelesaikan masalah sebelum temenggung hadir jadi temenggung harus hadir dalam memutuskan persoalan adat.²⁶ Saat ini peran temenggung semakin melemah terhadap kelompok, dikarenakan adanya pengaruh interaksi dengan masyarakat luar yang frekwensinya semakin tinggi. Hal ini terungkap dari wawancara dengan informan sebagai berikut :

“kalau dulu diseluruh kawasan Bukit 12 ada 3 temenggung yaitu satu di Air Hitam, satu di Makekal dan satu di Kejasung. Tapi kalau sekarang sudah ada 12 Temenggung.. tapi kalau sekarang ini pengaruhnya lebih banyak sekali jadi makanya temenggungnya lebih banyak, mungkin seperti awak

²⁶ Op Cit, Wawancara SR.

asli temenggung mungkin bapak bukan..tapi bapak ngaku-ngaku temenggung nah begitulah sekarang ini”²⁷

“di Makekal Hilir ada 3 depati yang datang ke saya mereka ini sepakat untuk mengganti temenggung mereka Ngukir, sebab apa mereka ingin mengganti karena Ngukir sudah menjual lahan, takut nantinya..kalau mereka bilang itu masyarakatnya sekarang sekarat..”²⁸

Depati bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum adat. Kedudukan *Depati* berdasarkan aliran sungai dimana kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 keluarga. Satu keluarga sering disebut juga *pesaken* yang terdiri dari orang tua, anak dan menantu. Satu keluarga juga sering disebut satu *bubung*. *Bubung* adalah sebutan bagi rumah orang rimba. Jadi *depati* mengetuai dari beberapa kepala keluarga (*pesaken*) atau *bubung*.

Mangku adalah penegak adat tugasnya menyelesaikan masalah pelanggaran adat di dalam kelompok. Tugas *Mangku* hampir sama dengan *Depati* yaitu mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Bedanya kasus-kasus hukum yang ditangani oleh *Mangku* biasanya lebih kecil bobotnya apabila dibandingkan dengan kasus-kasus hukum yang ditangani oleh seorang *depati*.



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr.4.12.
Betaring (Wakil Temenggung) & Besmen (Mangku) adalah Pengulu Orang Rimba

Menti bertugas menyampaikan informasi kepada seluruh anggota kelompok, misalnya informasi untuk berkumpul pada waktu tertentu atau pesan-pesan penting dari *Temenggung* dan para pengulu lainnya. Dalam bertugas seorang *menti* bisa meminta bantuan kepada anak dalam. *Debalang Batin* atau *Hulu*

²⁷ Op.Cit. Wawancara TR.

²⁸ Ibid. Wawancara SR.

Balang bertugas menjaga stabilitas keamanan masyarakat, dia sering disebut komandan perang Orang Rimba.

Selain institusi pengulu, ada dua institusi sosial lain yang juga cukup penting yaitu *Tengganai* dan *Malim* (dukun), masing-masing bertugas memberikan nasehat dan melayani anggota rombongan dibidang masalah kekeluargaan dan masalah spiritual.²⁹ *Tengganai* bertugas sebagai penasihat warga dalam urusan rumah tangga dan masalah hubungan antar anggota kelompok rombongan. Seorang tengganai pada saat saat tertentu bisa memberi nasehat atau masukan pada Tumenggung disaat Tumenggung harus menghadapi tugas yang sangat berat.

Tengganai merupakan para tetua atau orang tua di dalam kelompok Orang Rimba, biasanya setelah menjabat sebagai temenggung orang tersebut biasanya menjadi tengganai. Tengganai berperan dalam memberikan nasehat adat, meredakan perselisihan di dalam kelompok dan berbagai persoalan keluarga lainnya. Dalam bidang pengaturan adat-istiadat, tengganai memiliki peranan yang lebih besar dan lebih tinggi daripada temenggung. Karena umumnya para tengganai berumur lebih tua dan memiliki pengalaman yang banyak dan luas. Fenomena mantan temenggung menjadi tengganai dan anaknya menjadi temenggung memperkuat pendapat bahwa tengganai adalah jabatan yang lebih bergengsi. Lagipula seorang tengganai memang dituntut untuk faham betul persoalan adat.

Malim atau *Alim* adalah pemimpin spiritual Orang Rimba. Peran dan pengaruhnya cukup besar. Dukun dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan berhubungan dengan makhluk halus. Petunjuk seorang dukun, juga diperlukan oleh warga yang akan membuka ladang. Malim adalah pemimpin dalam upacara sale dalam perkawinan, kelahiran maupun kematian. Ia dipercaya sebagai orang yang sanggup berhubungan dengan roh nenek moyang. Oleh karena itu malim sangat dihormati.

Saat ini peran malim sebagai orang yang dapat mengobati penyakit semakin berkurang dalam komunitas Orang Rimba, khususnya bagi kelompok

²⁹ Muntholib Soetomo, *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal*, Disertasi UNPAD, Bandung, 1995.

Orang Rimba di Air Panas, Air Hitam dan Singosari karena mereka sudah mengenal pengobatan medis yang diperkenalkan oleh para pendamping atau fasilitator lapangan LSM/NGO. Selain itu program Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan kegiatan Pos Yandu setiap bulan dan pelayanan pengobatan gratis di Puskesmas Pematang Kabau dan Bukit Suban bagi Orang Rimba juga menjadi faktor melemahnya peran malim dalam proses pengobatan di kelompok Orang Rimba.

4.2.1.2. Institusi Sosial dan Norma Sosial Orang Rimba

Institusi Sosial³⁰ merupakan wujud abstrak dari suatu lembaga merupakan sekumpulan norma-norma pengaturan perilaku dalam aktivitas kehidupan suatu masyarakat. Selanjutnya Bertrand (1980) mengemukakan institusi sosial pada hakekatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur sosial) yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat.

Dalam masyarakat adat Orang Rimba selain institusi atau lembaga sosial pengulu, dikenal pula lembaga sosial keluarga, perkawinan, berburu, berladang, religi atau agama dan pola pemanfaatan



Sumber Photo : www.peopleandplanet.net

Gbr.4.13. Keluarga (*pesaken*) OR

hutan. Institusi sosial dalam masyarakat Orang Rimba belum banyak mengalami perubahan terkecuali institusi berladang yang proses internalisasinya dipengaruhi oleh orang terang sebagai dampak interaksi yang terjadi.

Secara teori fungsi keluarga dalam masyarakat adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu diantaranya adalah fungsi sosialisasi, fungsi afeksi dan fungsi perlindungan.³¹ Dalam aspek fungsi institusi keluarga, dalam komunitas Orang Rimba adalah lemahnya fungsi perlindungan dan afeksi

³⁰ Sugiyanto, Lembaga Sosial, Global Pustaka Utama-Yogyakarta, 2002.

³¹ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, Sosiologi, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga-Jakarta, 1987.

keluarga terhadap anak. Hal ini terlihat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, bagi anak-anak Orang Rimba setelah mereka sudah bisa mengenakan *cawot* atau *cawat* yang merupakan pakaian tradisional laki-laki Orang Rimba, maka si anak harus mencari makanan sendiri. Dalam artian orang tua tidak begitu memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan makanan anak secara cukup layaknya keluarga biasa, anak-anak harus mencari makanan sendiri dengan cara mencari umbi-umbian hutan, berburu binatang atau mencari buah hutan yang dapat dimakan. Orang tua hanya mengurus anak-anak yang masih berumur balita atau yang belum bisa menggunakan *cawot*.

Lemahnya fungsi institusi keluarga ini berpengaruh pada proses kehidupan anak, anak-anak remaja Orang Rimba sudah terbiasa pergi merantau meninggalkan keluarga, mereka merantau ke desa-desa terdekat dari kawasan hutan tempat mereka bermukim. Alasan mereka meninggalkan keluarga adalah karena tersinggung tidak mendapatkan pembagian daging hasil buruan secara adil dari orang tua, tidak jarang karena kemauan sendiri sebab di keluarga Orang Rimba para orang tua tidak mempunyai beban pemikiran yang jauh akan masa depan anak-anak mereka. Hal ini mungkin dikarenakan tuntutan kehidupan yang masih sederhana. Lemahnya beberapa fungsi keluarga juga terlihat dari sulitnya melakukan proses pendidikan bagi anak-anak Orang Rimba yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM terhadap anak-anak Orang Rimba di kawasan TNBD.

Hal ini dikuatkan dari beberapa informan yang diwawancarai, misalnya dalam proses pelaksanaan belajar secara alternatif di dalam rimba atau dalam proses belajar disekolah formal. Dalam proses ini peran orang tua boleh dikatakan belum maksimal untuk memberikan motivasi kepada anak agar dapat mengikuti proses belajar atau bersekolah.³²

Institusi sosial berburu, berladang dan pola pemanfaatan hutan yang berlaku di masyarakat Orang Rimba memiliki kearifan terhadap kelestarian sumberdaya alam yang berada di kawasan hutan TNBD. Institusi sosial ini perlu dibangun untuk tujuan agar lebih efisien dan multiguna. Kearifan lokal yang dimiliki komunitas Orang Rimba khususnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya

³² Hasil Wawancara dengan RD dan AR, 17 Nopember 2009.

alam dapat dijadikan titik masuk dalam proses perencanaan pembangunan sosial bagi Orang Rimba.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas Orang Rimba perlu dikuatkan agar tidak hilang atau melemah sebagai dampak dari proses interaksi dengan masyarakat luar atau Orang Terang. Tentunya proses penguatan kearifan lokal ini harus dilakukan dengan memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam komunitas Orang Rimba agar tidak memberikan dampak negatif terhadap nilai budaya yang dimiliki Orang Rimba. Proses penguatan kearifan lokal ini sejalan dengan pendapat Sugiyanto mengenai pembangunan lembaga sosial adalah suatu



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr. 4.14
Pohon Tenggeris Anak
Didenda Adat Jika Ditebang

perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan didampingi. Pembangunan lembaga sosial adalah perencanaan, penataan dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru.³³

Hal penting yang harus diperhatikan bahwa proses perubahan sosial yang direncanakan bagi komunitas Orang Rimba perlu untuk didampingi dan difasilitasi agar dapat berjalan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang dimiliki Orang Rimba.

Secara teori para sosiolog menjelaskan norma sosial menggunakan konsep kebudayaan. Karena kebudayaan mengandung standar normatif untuk perilaku. Secara khusus kebudayaan dapat dipandang sebagai cara hidup (*way of life*) yang harus dipelajari dan diharapkan dan sama-sama harus diikuti oleh para warga masyarakat tertentu atau para anggota dari suatu kelompok tertentu.³⁴ Norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Orang Rimba dapat

³³ Op.Cit.Sugiyanto,2002.

³⁴ Op.Cit. Soleman B. Taneko, 1984.

dilihat dari berbagai aspek budaya yang mereka miliki yang berkaitan dengan larangan dan denda adat yang membatasi dan mengendalikan perilaku mereka. Dalam adat Orang Rimba denda atau sanksi harus ditebus atau dibayar dengan “*kain*”. Kain mempunyai nilai sosial dan nilai ekonomi yang tinggi dalam komunitas adat Orang Rimba.

Norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Orang Rimba terkait dalam hubungan kehidupan mereka dalam pemanfaatan ruang kawasan hutan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan, dan norma sosial yang mengatur hubungan dengan sesama Orang Rimba. Contoh dalam hal ini adalah larangan menebang hutan di kawasan tanah kelahiran, tanah pasohon, larangan menebang pohon sialang, pohon tenggeris dan pohon sentubung. Pelanggaran terhadap norma sosial tersebut akan di denda dengan kewajiban membayar dengan sejumlah kain. Mulai dari denda kecil 60 kain sampai dengan besar 500 kain.

4.2.1.3. Stratifikasi Sosial Orang Rimba

Stratifikasi Sosial dalam masyarakat adat Orang Rimba tidak terlalu luas dan kompleks, stratifikasi yang ada di masyarakat Orang Rimba terjadi karena adanya kedudukan atau jabatan *pengulu* dalam stuktur pengurusan masyarakat Orang Rimba. Para pengulu yang terdiri dari Temenggung, Depati, Mangku, Menti dan Tenganai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam kelompok atau komunitas Orang Rimba. Anggota kelompok yang terdiri para kepala keluarga dan anggota keluarga lebih menghormati para pengulu di kelompok mereka. Kedudukan Temenggung memiliki posisi yang lebih tinggi di mata masyarakat adat Orang Rimba disebabkan karena tugas dan kewenangan yang dimiliki serta harta kekayaan berupa kebun yang lebih luas dibandingkan para anggota kelompok membuat Temenggung lebih dihormati dan menjadi teladan bagi anggota kelompok.

Selain Temenggung, kedudukan Tenganai dalam masyarakat Orang Rimba juga berada pada posisi di lapisan lebih tinggi karena selain mempunyai kewenangan menasehati Temenggung dan anggota kelompok lainnya, umumnya para Tenganai adalah kelompok orang tua yang dulunya pernah menjabat sebagai Temenggung, Depati, Mangku dan jabatan pengulu lainnya, para

tengganai khususnya yang pernah menjadi Temenggung beberapa diantaranya juga memiliki lahan kebun karet yang lebih luas dibandingkan para anggota kelompok.

Adanya sistem pelapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya sama halnya yang terjadi dengan masyarakat adat Orang Rimba. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa aspek terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (lebih tua), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat dan kepemilikan harta dalam batas tertentu.³⁵ Alasan terbentuknya stratifikasi sosial yang telah dikemukakan juga dapat menjadi determinasi dalam stratifikasi sosial masyarakat adat Orang Rimba di Kawasan TNBD.

Adanya pembagian tugas dan kewenangan di antara *pengulu* pada komunitas adat Orang Rimba dapat dijadikan salah satu unsur terjadinya stratifikasi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan (1964), bahwa apabila masyarakat itu hendak hidup teratur, maka kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi vertikal maupun horisontal.³⁶

Terkait dengan kekuasaan dan wewenang yang dimaksud diatas dalam komunitas Orang Rimba seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam institusi *pengulu* kedudukan *temenggung* merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari fungsi lainnya seperti *mangku*, *menti*, dan *dubalang*. Tetapi sebenarnya secara vertikal ada peran Orang Tua atau *Tengganai* yang memiliki kewenangan dan kekuasaan pada stratifikasi yang lebih tinggi. Karena para *tengganai* adalah para Orang Tua di dalam kelompok, pada umumnya para *tengganai* pernah memegang peran dalam institusi *pengulu* semasa mudanya, sehingga mereka dianggap memiliki cukup pengalaman dalam menangani permasalahan dan pelayanan dalam komunitas Orang Rimba. Berdasarkan pembagian wewenang dan kekuasaan dan tugas dalam institusi *pengulu* stratifikasi sosial vertikal terlihat dari hubungan anggota dengan *temenggung* dan *tengganai* kelompok, hubungan ini

³⁵ Op.Cit. Soerjono Soekanto.1990.

³⁶ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Penerbit Universitas Indonesia, Yayasan Penerbit FE-UI, Jakarta, 1964

memperlihatkan pola hubungan antara lapisan bawah (*grass root*) yang diwakili kelas anggota, dan para elite kelompok (temenggung dan tengganai yang mewakili lapisan atas).

Selain itu terdapat pula hubungan stratifikasi horisontal berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing komponen dalam institusi pengulu, misalnya antara menti, dubalang batin, mangku dan malim mereka ini memiliki kedudukan yang sejajar di dalam kelompok dan memiliki status stratifikasi yang sama hanya dibedakan oleh tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu stratifikasi sosial komunitas Orang Rimba dapat didasari oleh kepemilikan kebun karet dapat dilihat dari dimensi ekonomi, dimana para *pengulu* memiliki kebun karet yang lebih luas dari anggota kelompok sehingga tingkat pendapat mereka lebih tinggi dari anggota kelompoknya. Pemilikan sebagai suatu sub dimensi dari stratifikasi, dikemukakan pula oleh James C. Scott bahwa pemilik tanah atau kebun karet dalam hal ini para *pengulu* lebih tinggi kedudukannya dari pada buruh sadap dalam hal ini anggota kelompoknya.³⁷

4.2.2. Proses Sosial Orang Rimba

Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh mempengaruhi antara berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan politik.³⁸ Proses sosial yang terjadi di komunitas Orang Rimba dapat terjadi diantara anggota dalam satu kelompok atau dengan kelompok lainnya. Proses sosial yang terjadi di komunitas Orang Rimba berpengaruh pada dinamika perubahan sosial yang terjadi baik dalam dampak positif misalnya dalam kehidupan sosial Orang Rimba telah dapat melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dari masyarakat luar, pola dan gaya hidup sudah mulai melakukan proses adaptasi dengan pola dan gaya hidup Orang Terang.

Secara teori bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial,³⁹ pada masyarakat adat Orang Rimba dapat dilihat bentuk-bentuk interaksi sosial yang

³⁷ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1981.

³⁸ Ibid. Selo Soemardjan dan Soleman Soemardi, 1964.

³⁹ Op.Cit.Soerjono Soekanto, 1990.

terjadi baik dalam masyarakat adat Orang rimba dan Orang Rimba atau dengan masyarakat Orang Terang atau orang luar. Dampak dari proses interaksi ini mempengaruhi proses perubahan sosial dalam komunitas Orang Rimba, baik dalam aspek pola dan gaya hidup, perilaku individu maupun aspek perubahan norma dan nilai yang berlaku di komunitas Orang Rimba.

Bentuk-bentuk interaksi pada komunitas Orang Rimba sejalan dengan yang bentuk interaksi yang dikemukakan oleh Soeleman (1984) terdiri dari kerjasama, pertikaian (konflik), persaingan dan akomodasi.⁴⁰ Orang Rimba telah lama memiliki interaksi sosial dengan masyarakat luar sudah sejak lama namun sifatnya terbatas. Interaksi sosial awal Orang Rimba dan Orang Luar dapat dilihat dari relasi sosial mereka dengan Jenang dan Waris.

Orang Rimba mengenal apa yang disebut dalam *tambo adat* mereka dengan Waris. Menurut "*tambo*" silsilah garis keturunan orang Rimba mengenal nenek moyang mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang laki-laki memilih keluar dari hutan dan tinggal di desa sedangkan yang perempuan tetap hidup di dalam hutan. Keturunan dari anak laki-laki yang tinggal di desa ini kemudian yang disebut Waris. Waris terbagi dua yaitu Pangkal Waris di Tanah Garo dan Ujung Waris di Paku Aji. Relasi sosial Waris berdasarkan ikatan kekerabatan karena berasal dari satu nenek moyang yang sama.

Waris memiliki peran ekonomi, sosial dan politik terhadap Orang Rimba. Peran ekonomi waris terlihat dari kerjasama dalam jual-beli hasil hutan dan penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari Orang Rimba seperti makanan, kain, tembakau, peralatan berladang dan sebagainya. Peran sosial waris terlihat dari mediasi perselisihan yang terjadi diantara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok Orang rimba maupun antara Orang Rimba dan Orang Terang. Misalnya pada zaman pembukaan hutan oleh perusahaan HPH banyak terjadi pertikaian (konflik) antara Orang Rimba dan perusahaan yang diakibatkan oleh penebangan pohon-pohon dan areal hutan yang memiliki nilai penting bagi Orang Rimba seperti pohon sialang, pohon tenggeris dan pohon sentubung serta

⁴⁰ Op.Cit.Soeleman B. Taneko, 1984.

areal tanah kelahiran dan pemakaman. Dalam pertikaian ini peran Waris cukup penting dalam memediasi dan melindungi kepentingan Orang Rimba dalam melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.

Peran politik Waris terlihat dari kewenangannya dalam hal menyetujui atau menolak hasil musyawarah Orang Rimba dalam hal menentukan temenggung. Dalam beberapa kasus yang berhubungan dengan peran temenggung yang menyimpang misalnya dalam hal pemberian izin temenggung kepada perusahaan HPH untuk menebang kawasan hutan dan kasus penjualan lahan waris dapat mengumpulkan anggota kelompok Orang Rimba untuk melakukan musyawarah penetapan sanksi adat dan pergantian temenggung.

Hasil wawancara mendalam dengan informan menjelaskan bahwa konsep waris memang didasari dari garis keturunan yang diyakini oleh masyarakat desa dan Orang Rimba sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat. Relasi sosial antara Waris dengan Orang Rimba pada saat ini sebenarnya mulai melemah, hal ini disebabkan karena meningkatnya frekuensi relasi sosial orang rimba dengan masyarakat yang berada di luar hutan. Kondisi hubungan yang mulai melemah ini dimulai dari hadirnya perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di sekeliling pemukiman orang Rimba sekitar tahun 1990-an.⁴¹

Selain dengan waris, bentuk relasi sosial Orang Rimba dan Orang Luar dilakukan dengan *Jenang*. Jenang adalah orang luar yang dipilih dan dipercayai oleh Orang Rimba sebagai perantara atau penghubung interaksi dengan Orang Terang. Jenang menurut Orang Rimba dianggap sebagai raja yang siap melindungi dan membela mereka ketika terjadi perselisihan dengan orang luar. Peran jenang yang lain adalah membeli hasil hutan dan hasil kebun Orang Rimba dan menyediakan segala barang kebutuhan hidup bagi Orang Rimba.

Ada perbedaan peran waris dan jenang khususnya dalam hal politik, dimana Jenang tidak terlibat dalam urusan proses penentuan dan pemberian sanksi bagi temenggung yang melanggar adat, dalam masyarakat Orang Rimba jenang hanya memiliki peran ekonomi dan sosial. Sama halnya dengan peran waris, saat ini peran jenang sudah tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena Orang

⁴¹ Op.Cit.Wawancara dengan SR.

Rimba sudah lebih terbuka untuk berinteraksi dengan orang luar. Penyebab lain adalah, peran Jenang yang diwariskan kepada anak keturunan tidak dapat dijalankan oleh individu yang berhak memegang kedudukan sebagai Jenang. Misalnya seperti Jenang di Air Hitam, orang yang seharusnya berhak memegang status sebagai Jenang tidak lagi tinggal di Air Hitam melainkan di Kota Jambi. Sehingga peran jenang saat ini tidak lagi fungsional di kalangan masyarakat adat Orang Rimba Air Hitam.

Proses sosial lainnya yang terdapat dalam masyarakat adat Orang Rimba adalah kerjasama dalam membuat ladang, menanam dan memanen (mengetam padi), membuat rumah, melaksanakan upacara besale yaitu upacara pengobatan bagi anggota keluarga yang sedang sakit, kegiatan berburu dan melaksanakan pesta perkawinan. Semua kegiatan yang disebutkan diatas melibatkan seluruh anggota kelompok dalam proses pelaksanaannya. Contoh dalam kegiatan berburu seluruh anggota kelompok laki-laki baik tua maupun muda akan pergi bersama, setelah memperoleh hasil buruan mereka akan melaksanakan pembagian kepada seluruh anggota kelompok. Demikian halnya dalam pelaksanaan upacara besale atau pembangunan balai untuk upacara perkawinan semua anggota kelompok baik perempuan, laki-laki, tua maupun muda secara bersama melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan kegiatan upacara. Pihak laki-laki umumnya bekerjasama mendirikan bangunan atau balai tempat upacara, sementara pihak perempuan mencari bahan obat-obatan atau bunga untuk upacara.

Secara teori sosiologi menurut pendapat Soeleman (1984) kerjasama yang ada dalam masyarakat orang rimba disebut dengan “cooperation”, lebih khusus kerjasama dalam membuat ladang, menanam dan memanen padi termasuk *spontaneous cooperatation*, sedangkan kerjasama dalam upacara besale dan pesta perkawinan termasuk dalam “traditional cooperation”.⁴² Hal serupa dikemukakan oleh Soejono Seokanto (1981) bahwa kerjasama dalam masyarakat adat Orang Rimba dapat pula dikatakan sebagai “gotong-royong, karena kerjasama tersebut dilakukan secara spontan oleh anggota kelompok se-ladang yang sudah

⁴² Op.Cit.Soeleman B.Taneko, 1984.

terlembagakan yang mengandung unsur timbal-balik yang sukarela antara anggota kelompok.⁴³

Saat ini interaksi Orang Rimba dan warga desa sudah semakin luas, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dari segi ekonomi interaksi dapat dilihat dari kerjasama dalam hal pemasaran hasil produksi Orang Rimba seperti hasil hutan non kayu dan hasil kebun yang dibeli oleh para pedagang pengumpul (toke) desa. Interaksi lainnya adalah dalam penyediaan tenaga kerja di bidang perkebunan, khususnya tenaga kerja untuk menyadap atau memanen karet dan sawit. Kebun karet para pengulu Orang Rimba umumnya disadap oleh warga desa dengan sistem upah bagi hasil. Sistem bagi hasil yang berlaku adalah hasil dibagi tiga bagian, dimana dua bagian menjadi hak penyadap dan satu bagian menjadi hak pemilik kebun. Tetapi sebaliknya sangat jarang Orang Rimba yang menjadi penyadap kebun karet warga desa, hal ini disebabkan kurangnya ketrampilan Orang Rimba dalam menyadap pohon karet.

Secara sosial interaksi Orang Rimba dan warga desa terlihat dari kegiatan bersama seperti gotong-royong desa, perhelatan perkawinan dan kegiatan desa lainnya. Interaksi sosial yang terbina baik antara Orang Rimba dan warga desa serta pemerintahan desa berdampak pada mulai masuknya Orang Rimba yang menetap di hutan dalam daftar penduduk desa. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh keterangan bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Kelompok Orang Rimba Temenggung Grip telah terdaftar sebagai penduduk di Desa Bukit Suban sebanyak lebih kurang 100 KK. Orang Rimba yang telah terdaftar sebagai penduduk desa telah mendapat bantuan RASKIN, ASKESKIN dan JAMKESMAS. Demikian halnya di Desa Pematang Kabau Orang Rimba sudah mendapat raskin, meskipun mereka belum terdaftar secara administratif sebagai penduduk desa. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan sosial antara kepala desa dan pemimpin kelompok Orang Rimba, yang sudah bergaul sejak mulai pemukiman transmigrasi ditempat pada tahun 1986.

Interaksi Orang Rimba dan warga desa sampai sejauh ini berjalan cukup baik, terutama di tingkat pemimpin Orang Rimba dan warga desa. Dari hasil

⁴³ Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat. Alumni-Bandung, 1981.

wawancara dengan warga desa diperoleh informasi bahwa belum pernah terjadi pertikaian atau konflik antara warga desa dan Orang Rimba sampai saat ini.⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Orang Rimba, peluang terjadinya konflik dikemudian hari cukup besar karena adanya potensi laten konflik berupa faktor perasaan kecemburuan sosial dengan kehidupan ekonomi warga desa transmigrasi yang lebih baik, rasa ketidakadilan karena perlakuan berbeda pemerintah terhadap Orang Rimba dan warga transmigrasi dalam bantuan program, faktor keterbatasan lahan garapan, dan faktor ekonomi Orang Rimba yang marjinal. Faktor laten konflik ini teridentifikasi pada kelompok yang telah “bediom”.

Potensi laten konflik terbuka antara Orang Rimba yang telah bediom dengan warga desa dan perusahaan dapat dilihat dari ungkapan beberapa informan⁴⁵ sebagai berikut :

“Orang Rimba merasa kok tanah tumpah darah kita disini tapi orang dari luar masuk disini sudah mewah-mewah rumah sudah bagus-bagus keramik ditambah lagi dia cuek-cueki melihat kita, dio sombongi kita, mau memberi nasipun susah jadi terasa mau bentrokan antara kami dengan orang luar dan PT”.

“kami ini kan kehilangan tempat tinggal karena tanah ulayat kami di Bukit 12 ini sudah dirusak oleh pemerintah walaupun PT tapikan izin dari negara.. pemerintah ini harus mendukung Orang Rimba, itu seperti mendukung Suku Jawa dari seberang laut sana didatangkan ke Sumatera dikasih lahan dikasih rumah, itu oke, baru pemerintah tidak membedakan suku bangsa”

“mencari brondolan sawit, kadang dikejar-kejar satpam PT mau ditangkap, sebab ini kesalahan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada masyarakat tidak ada bantuan lain”.

“masuk ke rimbo lagi gara-gara ekonomi tidak terjamin, paling sekarang motong(menyadap) karet orang jawa. Masuk Islam ini bagus tapi kadang

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan MJ dan BJ, 19 dan 20 Nopember 2009

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan NG, MD, MK, SM, Nopember 2009.

terganggu oleh ekonomi “mau sholat tidak khusuk berpikir besok mau makan apa”

Orang Rimba sebenarnya memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi yaitu dengan cara “*menghindar*” dari konflik dan tekanan pihak luar. Ketika kawasan tempat *menghindar* semakin sempit, konflik terbuka tidak terelakkan. Dari hasil survey bioregion kehidupan Orang Rimba yang dilakukan oleh KKI-WARSI tahun 2008, diperoleh angka persentase konflik Orang Rimba dengan masyarakat umum 41,6%, Orang Rimba dengan Orang Rimba 25%, Orang Rimba dan pihak perusahaan 20,8%, Orang Rimba dan pemerintah 12,5%. Manifestasi konflik berupa pengusiran, pembakaran, dan penghilangan nyawa Orang Rimba.

Peristiwa konflik terbesar dan terjadi untuk yang pertama kali antara sesama Orang Rimba terjadi pada bulan Desember 2008, peristiwa konflik antara rombongan Temenggung Celitai dari wilayah Kejasung dan rombongan Majid di wilayah Air Hitam mengakibatkan 3 Orang Rimba tewas, 2 orang dari rombongan Majid dan 1 orang dari rombongan Temenggung Celitai. Faktor penyebab konflik adalah persoalan hutang piutang antara anggota kelompok. Tewasnya ketiga Orang Rimba diakibatkan masing-masing kelompok menggunakan senjata kecepek pada saat pertikaian terjadi. Peristiwa konflik ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang terjadi dalam perilaku hidup Orang Rimba dalam penyelesaian konflik yang biasanya selalu melakukan penghindaran terhadap kelompok lawan bertikai dan saling memutuskan kontak.

Penyelesaian konflik antara dua kelompok ini dilakukan secara adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat Orang Rimba. Untuk menengahi kedua kelompok yang bertikai masing-masing kelompok menunjuk Temenggung Tengah untuk menjadi juru runding dalam menyelesaikan konflik. Temenggung Tengah bertugas melakukan perundingan dan mengumpulkan pendapat dari kedua kelompok yang bertikai untuk menemukan penyelesaian secara adat. Hasil sidang adat memutuskan bahwa kedua belah sama-sama bersalah karena telah menghilangkan nyawa manusia, sehingga harus di kenakana sanksi adat berupa membayar denda “bangun”. Pembayaran denda bangun dilakukan kedua belah

pihak dimana kelompok Jelitai membayar sebanyak 1000 lembar kain dan kelompok Majid membayar 500 lembar kain dan kedua belah pihak harus saling memaafkan.

4.3. Aspek Budaya Orang Rimba

4.3.1. Pola Pemukiman

Pola pemukiman Orang Rimba tinggal berkelompok di sepanjang aliran sungai di dalam hutan, masing-masing keluarga (*pesaken*) membangun tempat tinggal berupa “*sesudungon*” yaitu rumah pondok dari kayu bulat. Ada beberapa bentuk pondok tempat tinggal Orang Rimba yaitu *rumo bepupu* atau *romah sampaeon* merupakan pondok tempat tinggal yang terbuat dari kayu bulat sebagai tiang rangka dan lantai pondok, atap pondok menggunakan daun pohon serdang atau benal, tapi sekarang atap pondok telah menggunakan plastik hitam yang lebih tahan bocor yang mudah dibeli pada hari pasar mingguan desa. Pondok tidak diberi dinding dibiarkan terbuka, lantai pondok disebut *gelogo* dibuat tinggi lebih kurang 50 cm dari permukaan tanah biasanya terbuat dari kayu belahan dan kayu bulat yang diikat rapat menggunakan rotan.

Pondok *rumo pupu* ini yang paling banyak penulis temui dilapangan sebagai tempat tinggal anggota kelompok dan keluarganya. Selain pondok *rumo pupu*, penulis juga menemukan pondok Orang Rimba yang lebih permanen. Pondok yang lebih permanen ini bagi Orang Rimba sering disebut *rumo godong* atau rumah besar. Pondok tempat tinggal atau *rumo godong* juga terbuat dari kayu bulat sebagai tiang dan rangka, hanya saja pondok sudah ditutup dengan dinding dan lantai yang terbuat dari kulit kayu (pelupuh) pohon meranti, atap pondok menggunakan seng.

Pondok lebih tinggi dari permukaan tanah sekitar lebih kurang 2-3 meter. Dari informan penulis mengetahui bahwa pondok tersebut milik seorang Mangku. Pondok yang lebih permanen ini biasanya dibangun oleh Orang Rimba yang berkedudukan sebagai *pengulu* dalam kelompok.



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.15. Rumah Pondok Orang



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.16. Rumah Bepupu Orang

Pola pemukiman Orang Rimba adalah tersebar dalam kelompok kecil yang membentuk satuan pemukiman yang terdiri dari beberapa pesaken, pengelompokan rumah ini berdasarkan atas ladang yang berdekatan yang sering disebut “*se-ladang*”. Pada umumnya dalam satu kelompok pemukiman beranggotakan kerabat dekat dari pihak keluarga isteri. Pada tingkat lebih luas kesatuan pemukiman yang terdiri dari beberapa ladang disebut dengan “*se-tubo*”, diketuai oleh ketua kelompok yaitu seorang laki-laki tertua dan yang dianggap paling bijaksana yang disebut “*kelebu*”, jika didalam kelompok terdapat seorang pengulu maka dia yang akan bertindak sebagai *kelebu*. Pada tingkat selanjutnya beberapa “*tubo*” bergabung menjadi “*rombong*” misalnya rombongan Air Hitam, rombongan Makekal dan rombongan Kejasung.⁴⁶Rombongan ini diketuai oleh Temenggung.

Apa yang dilakukan Orang Rimba pada masa lalu dan pada masa sekarang untuk penghidupan sudah berbeda. Pada waktu lalu tidak ada tradisi menanam. Oleh karena itu seluruh penghidupannya tergantung pada kegiatan berburu dan meramu. Kebutuhan yang berupa barang-barang dari luar dipenuhi dengan menukar hasil buruan dan hasil meramu mereka. Saat ini kegiatan berladang sudah mulai dilakukan. Orang Rimba mulai mau menanam berbagai jenis tanaman

⁴⁶ Op.Cit.Muntholib Soetomo, 1995.

yang menghasilkan. Menurut cerita, kegiatan berladang atau betalang pada Orang Rimba baru dimulai pada tahun 80-an.⁴⁷

4.3.2. Berladang dan Berkebun

Adat pembuatan ladang kalau zaman dulu di balikkan ke orang tua (*tengganai*), jadi setiap orang rimba yang mau berladang harus melapor ke ninik mamak atau tengganai dimana rencana lokasi akan berladang, kemudian tengganai atau *malim* (sebutan dukun Orang Rimba) akan *bedike* (memanggil dewa) kalau hasil amalan tengganai lokasi tersebut tidak bagus karena tanah dewa maka harus pindah lokasi.⁴⁸

Tidak semua kebutuhan hidup Orang Rimba dapat dipenuhi oleh hutan. Padi, umbi-umbian, cabe rawit, dan beberapa tanaman palawija tidak bisa di dapatkan dari hutan. Untuk memenuhi semua itu Orang Rimba harus menanamnya. Caranya adalah dengan membuka ladang. Langkah-langkah dalam sebuah pembukaan ladang adalah: 1. Memilih lokasi, 2. Meminta pendapat dari dukun, 3. Penebasan, 4. Pembakaran, 5. Pembersihan, 6. Penugalan, 7. Penanaman, 8. Pemeliharaan, dan 9. Pemanenan.

Dalam tradisi adat Orang Rimba disepanjang aliran sungai merupakan areal belukar atau sesap sehingga boleh dibuka untuk ladang, sedangkan areal yang jauh dari sungai mereka sebut hutan atau rimbo yang tidak boleh dijadikan ladang atau *humo* dalam bahasa Orang Rimbo. Selain itu alasan mereka membangun ladang dipinggir sungai, karena mudah memperoleh air sungai. Dalam pemanfaatan air sungai ini Orang Rimba mempunyai aturan atau norma yang ketat, aturan itu adalah bahwa setiap Orang Rimba tidak boleh membuang air besar di sungai, hal itu menurut bisa melanggar adat dan dapat dikenai sanksi.

Alasan logis yang dikemukakan oleh informan bahwa Orang Rimba selalu memanfaatkan air sungai untuk minum tanpa dimasak, sehingga kalau buang air besar di sungai tentu akan mengotori, disamping itu sungai merupakan tempat mencari ikan, kalau buang air besar ke sungai nanti akan dimakan ikan, sementara

⁴⁷ Op.Cit. www. www.goodreads.com.

⁴⁸ Op.Cit Wawancara TR.

ikan akan kita makan. Tradisi dan norma adat terhadap air sungai ini mengandung nilai positif bagi terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan sungai, namun saat ini Orang Rimba telah mengeluhkan tentang pencemaran yang terjadi pada sungai mereka karena penggunaan racun ikan (potas) dalam mencari ikan oleh warga desa dan Orang Rimba sendiri.⁴⁹



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.17.

Ladang Orang Rimba di Tanami Karet



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.18.

Ubi di Ladang Orang Rimba

Orang Rimba selalu membuka ladang dengan pola berpindah, waktu rotasi berpindah adalah selama lahan yang digunakan untuk berladang sudah hilang kesuburan tanahnya. Tradisi Orang Rimba sebidang lahan biasanya hanya digarap selama tiga kali masa tanam. Ladang yang sudah digarap selama tiga tahun berturut-turut, kesuburan tanahnya akan berkurang. Pohon karet dan pohon buah-buahan yang ditanam sudah mulai besar. Bahkan untuk pohon karet ada yang bisa mencapai tinggi empat meter. Menanam ubi atau padi sudah tidak lagi banyak hasil panennya. Sebagai jalan keluarnya Orang Rimba akan membuka ladang baru. Ladang yang terdahulu akan dibiarkan untuk menjadi kebun.

Dulu ladang Orang Rimba hanya untuk ditanam ubi kayu, ubi jalar, dan keladi sebagai sumber makanan utama, kemudian mereka baru menanam pohon karet dan pohon buah seperti durian, duku, dan mata kucing (*pedaro*). Tapi sekarang mereka menanam padi ladang yang benihnya di dapat dari orang desa.

⁴⁹ Op.Cit Wawancara SR dan TR.

Setelah persediaan makanan habis Orang Rimba kembali akan membuka ladang baru yang jaraknya relatif tidak terlalu jauh, tergantung ketersediaan sesap atau belukar tua.

Dalam pembukaan ladang ini sudah terjadi perubahan dalam teknologi peralatan membuka hutan, dulu membuka hutan untuk ladang hanya dengan menggunakan kapak beliung, tetapi sekarang mereka sudah mengenal gergaji mesin (*chain saw*) untuk menebang pohon. Hal ini yang mengkhawatirkan pihak pengelola TNBD, dikarenakan penggunaan gergaji mesin bisa berpotensi di salah gunakan untuk menebang pohon yang dilindungi di dalam kawasan. Meskipun belum pernah ditemukan secara langsung penggunaan gergaji mesin oleh Orang Rimba, namun berdasarkan informasi dari petugas lapangan Balai TNBD ditengarai sudah ada kerjasama antara pemilik modal dengan Orang Rimba untuk membuka kawasan hutan.⁵⁰

Terkait penggunaan berbagai macam peralatan moderen dalam sistem perladangan Orang Rimba saat ini sejalan dengan pendapat Wilkinson (1978) dalam Karno Sasmita (1999) bahwa masyarakat tradisional pada umumnya berupaya mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam dengan tetap memelihara keseimbangan ekologis (*ecologis equilibrium*). Upaya ini dilakukan dengan berbagai pantangan atau tabu tradisional. Namun demikian Wilkinson mengatakan bahwa keseimbangan ekologis itu akan rusak atau berubah apabila masyarakat tradisional itu secara terbuka mengadakan hubungan yang intensif dengan dunia luar atau sebaliknya.

⁵⁰ Op.Cit. Wawancara dengan RD.



Sumber Photo : Koper HAM

Gambar 4.19. Padi Ladang Orang Rimba Sebuah Perubahan

Hasil pengamatan penulis di lapangan menemukan pembukaan ladang oleh Orang Rimba di dalam kawasan hutan TNBD berada di daerah aliran sungai, lahan yang di buka lebih kurang 2 hektar, lahan telah ditanami pohon karet dan ubi. Ketika ditanyakan kepada informan lahan tersebut dibuka secara gotongroyong oleh 3 kepala keluarga. Artinya ladang tersebut milik 3 pesaken, masing-masing pesaken membuka ladang kurang dari satu hektar.

Aktifitas berladang ubi bagi Orang Rimba telah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan selain melakukan kegiatan meramu dan berburu. Sampai dengan saat ini kegiatan meramu masih tetap dilakukan untuk mencari umbi-umbian yang akan dijadikan bahan makanan, seperti banar, gadung dan buah-buahan hutan, meskipun umbi-umbian seperti banar dan gadung sudah sulit ditemukan karena tidak semua kawasan hutan TNBD ditumbuhi umbi tersebut.

Umbi-umbian merupakan sumber makanan pokok bagi Orang Rimba, walaupun mereka sudah mengenal beras dari hasil menanam padi atau membeli beras di pasar desa. Aktifitas berladang ubi oleh Orang Rimba dapat dilihat sebagai pengaruh dari interaksi dengan Orang Terang dan strategi adaptasi dari semakin berkurangnya ketersediaan umbi-umbian di dalam hutan, karena

menanam ubi tidak memerlukan teknologi menanam yang rumit dan ubi merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh di berbagai jenis tanah.

Kebutuhan sumber pangan pokok selain beras harus menjadi acuan dan harus tetap dipertahankan dalam pengembangan masyarakat adat Orang Rimba, agar tidak digantikan dengan sumber pangan lain seperti beras karena hal ini akan menyimpang dari pola konsumsi mereka. Selain itu pengalihan sumber pangan ke beras justru akan menyulitkan mereka dalam memproduksi sumber pangan karena memerlukan ketersediaan lahan, teknologi dan pengetahuan baru.

Orang Rimba saat ini sudah mulai cenderung berladang menetap karena pembukaan ladang ubi dibarengi dengan penanaman pohon karet. Penanaman pohon karet merupakan satu bentuk adaptasi untuk menunjang kebutuhan hidup, karena kegiatan berburu dan meramu sumber daya alam hutan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin bertambah.

4.3.3. Pola Pemanfaatan Hutan

Orang Rimba memiliki tradisi budaya dalam pemanfaatan ruang areal hutan terkait kelangsungan hidup mereka. Pentingnya hutan bagi kehidupan Orang Rimba tergambar dalam norma adat mereka sebagai berikut : “*tidak ada rimba tidak ada bunga tidak ada bunga tidak ada dewa*”. Norma sosial ini menunjukkan pentingnya hutan bagi Orang Rimbo. Hutan harus di jaga karena sebagai penyedia bunga yang akan digunakan untuk kegiatan spiritual memuja dewa yang disebut dengan “*bedike*” atau upacara penyembuhan penyakit disebut “*besale*” dan kegiatan upacara perkawinan. Adapun pembagian ruang areal pemanfaatan hutan berdasarkan adat Orang Rimba sebagai berikut :

1. **Tanah Dewa** merupakan hutan primer yang lebat tidak boleh dirusak baik oleh Orang Romba maupun Orang Terang menurut kepercayaan mereka di hutan lebat tersebut para dewa menggantungkan seluruh nyawa yang hidup di muka bumi di kawasan hutan tersebut. Tanah Dewa sering mereka sebut Tanah Bersetan, areal kawasan hutan ini biasanya terletak di pematang dan bukit.

2. **Tanah Peranokon**, merupakan areal hutan tempat melahirkan bagi Orang Rimba, lokasinya di pematang dan berdekatan dengan sungai. Areal ini digunakan keluarga untuk proses melahirkan anak, biasanya mereka datang ke tanah kelahiran satu bulan sebelum waktu melahirkan sampai dengan si ibu yang melahirkan sembuh dari proses persalinan, kemudian mereka akan kembali ke pemukiman semula. Menurut norma adat Orang Rimba areal kawasan hutan tempat melahirkan tidak boleh dirusak, setiap keluarga akan menjaga areal ini.



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.20
Tanah Peranokon Tempat
Melahirkan Orang Rimba

3. **Tanah Pasohon**, areal hutan ini merupakan tanah pemakaman Orang Rimba yang tidak boleh dirusak hutannya dan Orang Terang tidak boleh mengunjunginya, para kerabat akan selalu menjaga keutuhan kawasan hutan ini. Tradisi budaya Orang Rimba, orang yang mati tidak dikuburkan melainkan hanya di taruh di atas pondok kayu lalu ditinggalkan.
4. **Tanah Balai** merupakan areal hutan yang digunakan untuk mendirikan balai yang akan digunakan untuk upacara perkawinan, kelahiran dan kegiatan spiritual seperti "*besale*" dan "*badike*". Tanah balai ini tidak boleh diketahui orang luar letaknya sampai aktifitas bebalai selesai dilaksanakan. Kawasan hutan untuk mendirikan balai dilarang untuk dirusak atau ditebang pohonnya.
5. **Benuaron**, areal hutan yang di tanami pohon buah-buahan seperti durian, duku, rambutan, mata kucing (*pedaro*).
6. **Sesap** merupakan areal bekas tebasan atau bekas ladang baru yang berada dipinggir sungai, umumnya areal ini selalu digunakan untuk berladang ubi dan kebun karet.
7. **Belukar** merupakan areal hutan yang ditumbuhi pohon kayu muda dan bekas ladang yang telah ditinggalkan 3-4 tahun.
8. **Tanah Subon dan Inuman**, areal ini merupakan tempat minum dan sumber mata air di dalam hutan dan tempat berkumpulnya hewan hutan.

Orang Rimba telah sejak dulu membedakan berbagai area hutan yang memiliki nilai kemanfaatan berbeda. Misalnya ada area yang dinamakan halom bungaron, yaitu kawasan hutan yang masih utuh dan memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi. Area ini nyaris tidak dimanfaatkan oleh Orang Rimba. Lalu ada halom balolo dan ranah yang merupakan kawasan dimana Orang Rimba biasa berburu dan mengambil berbagai hasil hutan. Kemudian ada area halom benuaron dan humo yang dimanfaatkan untuk berladang.⁵¹

Pola pemanfaatan kawasan hutan dengan mengacu kepada norma sosial pada masyarakat adat Orang Rimba, merupakan satu aspek budaya Orang Rimba yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan zonasi oleh pihak Balai TNBD yang akan dituangkan dalam RPTN, sehingga sistem pengelolaan dapat mengakomodir pemenuhan kebutuhan hidup Orang Rimba, dan keberlanjutan kelestarian hutan di kawasan TNBD.

Selain adanya kearifan dalam pola pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan norma sosial komunitas adat Orang Rimba, dalam budaya mereka juga terdapat larangan menebang beberapa jenis pohon seperti pohon tenggeris, pohon sentubung, dan pohon sialang. Karena pohon-pohon tersebut memiliki nilai sosial dan nilai ekonomi bagi komunitas adat Orang Rimbo di kawasan TNBD. Pohon tenggeris (kempas) dan pohon sentubung merupakan dua pohon yang nilai sosial bagi Orang Rimba, karena kedua pohon tersebut dibutuhkan dalam prosesi melahirkan. Kulit kayu tenggeris digunakan untuk mengusap ubun-ubun bayi yang baru lahir. Setiap keluarga akan menjaga dan memelihara pohon kayu tersebut dengan cara memberi tanda dan membersihkan sekitar pohon. Hal ini mereka lakukan karena menjaga pohon tersebut jangan sampai mati atau ditebang, jika pohon tenggeris tersebut mati atau ditebang si anak juga akan mati.

Norma sosial yang berlaku adalah bahwa setiap Orang Rimba dilarang menebang pohon tenggeris yang ditandai, apabila melanggar ketentuan tersebut bisa dikenakan sanksi adat atau denda yang harus dibayar dengan "*kain*". Begitu juga dengan pohon sialang yang menjadi tempat sarang lebah yang menghasilkan

⁵¹ Op.Cit.www. www.goodreads.com.

madu hutan, setiap Orang Rimba dilarang menebang pohon sialang, bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi adat. Denda adat bagi yang menebang pohon sialang adalah 160 kain jika pohon rusak, tetapi jika pohon tersebut mati maka denda yang akan dijatuhkan adalah 500 kain. Proses penetapan denda diputuskan atau ditetapkan didepan orang banyak atau kelompok. Jadi orang yg banyak dengar apa yg jadi kesalahan misalnya membunuh atau menebang sialang orang di denda 160 kain.⁵²

Kearifan budaya lokal dalam perlindungan pohon yang dimiliki Orang Rimba merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung sistem pengelolaan TNBD. Tentunya harus dilakukan penguatan institusi atau lembaga sosialnya agar dapat lebih efektif dan berdayaguna dalam mendukung tujuan khusus pembangunan kawasan TNBD.

4.3.4. Pola Kepemilikan Lahan

Membuka ladang, bagi Orang Rimba juga merupakan cara bagi seseorang untuk memiliki tanah. Orang yang pertama membuka ladang akan dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Sementara hutan yang belum dibuka dipandang sebagai milik bersama Orang Rimba. Hukum ini sudah berlangsung lama, dan semua Orang Rimba mentaatinya. Bisa dikatakan tidak pernah ada perebutan tanah di antara Orang Rimba. Sebenarnya Orang Rimba tidak mengenal kepemilikan pribadi yang permanen terhadap lahan, kepemilikan lahan dimiliki oleh komunitas secara bersama, individu hanya memanfaatkan sampai mereka berpindah ke ladang yang baru. Tetapi karena pengaruh lahan yang semakin sempit, mereka mulai memiliki lahan secara keluarga.

Setiap Orang Rimba boleh membuka sesap dan belukar yang ada di sepanjang aliran sungai untuk dijadikan ladang, kemudian jika ladang tersebut tidak ada ditanami dengan tanaman tua misalnya pohon karet dan pohon buah-buahan maka ketika ladang itu ditinggalkan dan menjadi sesap atau belukar kembali setiap orang dibolehkan untuk membukanya menjadi ladang dengan seizin temenggung, tetapi jika ada tanaman tua maka tanaman itulah yang menjadi hak milik orang yang membuka pertama lahan tersebut. Pola kepemilikan lahan

⁵² Op.Cit.Wawancara dengan SR.

dan tanaman dapat diwariskan kepada anak keterunan, misalnya lahan bekas ladang dan pohon buah-buahan seperti durian, duku, pedaro atau pohon sialang yang menghasilkan madu hutan.⁵³

4.3.5. Budaya Melangun

Melangun adalah sebuah proses untuk menghilangkan kesedihan yang disebabkan atas meninggal dunia salah satu anggota keluarga atau kerabat dalam satu rombongan. Untuk menghilangkan rasa sedih seluruh anggota rombongan akan meninggalkan lokasi pemukiman atau tempat tinggal mereka dengan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Proses pindah pemukiman ini bertujuan agar tidak melihat tempat tinggal dan barang milik orang yang mati, jika masih terlihat akan menimbulkan rasa sedih.

Proses melangun dalam tradisi lama Orang Rimba memakan waktu 4-5 tahun, dengan jarak lokasi baru sangat jauh dari tempat pemukiman semula, bahkan proses melangun ini akan sampai di wilayah rombongan yang lain. Misalnya jika kelompok Air Hitam yang bermukiman di kawasan Selatan TNBD bisa saja melangun sampai ke wilayah kelompok Makekal di kawasan Utara TNBD. Dalam budaya melangun Orang Rimba tidak mengenal batas wilayah kelompok dan bebas pergi melangun ke wilayah mana saja yang disukai. Namun tradisi baru Orang Rimba saat ini waktu melangun tidak lagi lama, saat ini waktu melangun paling lama 3 (tiga) bulan mereka sudah kembali ketempat tinggalnya semula. Dalam budaya masyarakat Orang Rimba selama apa waktu dan sejauh apa jarak melangun yang pasti mereka akan kembali ketempat tinggalnya semula. Perubahan waktu melangun yang lebih pendek ini dipengaruhi oleh keberadaan ladang atau kebun karet mereka yang harus dijaga dan dipelihara atau yang harus disadap.⁵⁴

Budaya melangun di masyarakat adat Orang Rimba sering menjadi hambatan bagi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak lain terhadap Orang Rimba. Proses melangun disebabkan oleh

⁵³ Op.Cit.Wawancara dengan TR.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan TR, MB dan BT, 17 dan 19 Nopember 2009.

kematian anggota keluarga, tidak ada data akurat mengenai berapa angka kematian Orang Rimba dalam satu tahun, tetapi diperoleh informasi tentang penyebab kematian Orang Rimba. Sebagian besar Orang Rimba meninggal dunia karena terserang penyakit, penyakit yang banyak menyebabkan kematian adalah sakit perut (diare) dan demam.⁵⁵ Penyakit lain yang sering menyerang Orang Rimba adalah penyakit kulit, batuk, demam, sakit kepala, sakit gigi dan sakit mata. Namun ada beberapa penyakit lain yang di derita oleh Orang Rimba yaitu jantung, paru-paru, hernia, bisul.⁵⁶ Pada saat penulis di lapangan menemukan dua orang perempuan Orang Rimba yang sudah cukup tua sedang menderita demam chikungunya dan ginjal.

Untuk mengurangi terjadinya peristiwa melangun perlu dilakukan program peningkatan derajat kesehatan bagi Orang Rimba, berdasarkan pengamatan penulis lingkungan tempat tinggal Orang Rimba sangat rendah mutu sanitasinya, hal ini disebabkan perilaku hidup tidak sehat Orang Rimba seperti membuang sampah disekitar pondok tempat tinggal, minum air mentah, jarang mandi, dan tempat tinggal atau pondok yang tidak layak bagi kesehatan.

Salah satu faktor yang memperpendek waktu melangun adalah adalah kepemilikan kebun karet, dengan adanya aktivitas budidaya tanaman kebun dalam kehidupan Orang Rimba telah mempengaruhi perilaku mereka dalam hal melangun. Aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISOSNAKERTRANS) Kabupaten Sarolangun terhadap kelompok Orang Rimba yang berada diluar kawasan TNBD dengan melakukan penyadaran terbukti dapat merubah perilaku waktu melangun menjadi lebih pendek dan jarak melangun tidak lagi pindah ke lokasi yang jauh tetapi hanya beberapa kilometer dari tempat pemukiman semula.⁵⁷

4.3.6. Budaya Bedom

Bedom adalah istilah bagi Orang Rimba yang sudah pindah dari dalam hutan untuk tinggal menetap di luar hutan. Dalam budaya Orang Rimba tidak ada larangan atau pantangan adat bagi yang ingin menetap diluar hutan semua

⁵⁵ Hasil Wawancara BT dan MB, 19 Nopember 2009.

⁵⁶ Op.Cit.Karno Sasmita, 2009.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan JD, 7 Desember 2009.

tergantung dari keinginan masing-masing individu Orang Rimba. Hanya saja bagi Orang Rimba yang telah menetap di luar hutan dia kehilangan hak untuk mengaku Orang Rimba dan harus meninggalkan adat istiadat yang berlaku di hutan, tetapi Orang Rimba yang bediom masih diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan di kawasan hutan seperti berburu, mengumpulkan hasil hutan non kayu seperti getah jernang, getah damar, rotan, manau, tebu-tebu, dan buah-buahan.⁵⁸ Dalam adat Orang Rimba juga tidak melarang bagi individu yang ingin kembali hidup di hutan karena tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan diluar. Namun sebelum diijinkan Temenggung kembali ke kelompok di rimba, mereka harus melakukan ritus persiapan masuk rimba. Salah satunya adalah selama 3 bulan mereka tidak boleh lagi makan-makanan yang ditabukan.⁵⁹



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.21.
Peneliti bersama Orang Rimba Yang Sudah Menetap (Bediom)
Memeluk Agama dan Mulai Meninggalkan Tradisi Orang Rimba

Dalam budaya Orang Rimba terjadi semacam ketentuan bahwa adat dan tradisi mereka hanya berlaku di dalam rimba. Ketika keluar dari rimba maka yang berlaku dan harus diikuti adalah adat dan tradisi orang Melayu. Adat dan tradisi rimba tidak boleh lagi digunakan diluar rimba. Oleh karena itu syarat bediom

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan TR, BT, MB dan NG, 17 dan 19 Nopember 2009.

⁵⁹ Lebih jauh lihat http://www.goodreads.com/story/show/2412.Orang_Rimba_Menantang_Zaman_Achmanto Mendatu diakses 16 Oktober 2009 11.00 WIB.

adalah meninggalkan hal-hal terkait dengan kehidupan di dalam rimba dan mengadopsi seluruh tatacara berkampung. Mereka mesti merubah kepercayaan dari kepercayaan yang memuja banyak Dewa kepada kepercayaan monotheis. Mereka juga sudah diperbolehkan memakan makanan yang semula diharamkan yakni daging serta segala produk sampingan dari binatang ternak yang dipelihara orang Melayu. Sebaliknya daging babi dan binatang lain yang diharamkan tidak boleh lagi mereka makan. Dari sisi hukum mereka juga telah dikenai hukum formal kenegaraan, tidak lagi memakai hukum adat.⁶⁰

Ada dua kelompok Orang Rimba Air Hitam yang telah bediom yaitu kelompok Ngelam yang bermukim di Air Panas Desa Bukit Suban dan kelompok H. Helmi yang bermukim di Singosari Desa Pematang Kabau. Kelompok Air Panas terdiri dari 50 KK dan Kelompok Singosaari terdiri atas 25 KK. Dua kelompok ini merupakan contoh bagaimana Orang Rimba melakukan proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Ada beberapa alasan Orang Rimba memutuskan untuk bediom antara lain adalah untuk memikirkan masa depan anak dan cucu agar hidup lebih baik, ingin menyekolahkan anak-anak, adanya pengaruh orang luar sebagai dampak interaksi sosial, kemauan sendiri setelah memiliki pengalaman interaksi dengan orang luar, dan adanya program perumahan yang dibangun oleh pemerintah.

Proses bediom diluar kawasan hutan tidak mudah bagi Orang Rimba cukup banyak keluarga yang kembali kehutan karena tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan diluar hutan. Pada umumnya penyebab mereka kembali kehutan adalah karena kesulitan dalam dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang Rimba yang bediom sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki kebun yang dapat dikelola sehingga tidak ada pendapatan tetap yang dapat dijadikan penunjang kehidupan.

Kehidupan Orang Rimba yang bediom sangat memprihatinkan, meskipun sebagian besar mereka telah mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah pusat yaitu dari Departemen Sosial dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), namun dari tingkat kesejahteraan mereka tergolong penduduk

⁶⁰ Op.Cit.www. www.goodreads.com.

yang berada dibawah garis kemiskinan. Program bantuan perumahan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap Orang Rimba di kawasan TNBD telah berlangsung sejak tahun 1997, 1998, 2001, 2004, 2007 dan 2008.⁶¹

4.4. Sistem Ekonomi Orang Rimba

4.4.1. Sumber Matapencaharian

Sumber mata pencaharian Orang Rimba yang masih menetap di dalam hutan terdiri dari beberapa sumber diantaranya adalah :

1. **Berburu**, Orang Rimba berburu selain untuk memenuhi kebutuhan makanan adalah untuk mendapatkan uang sebagai hasil penjualan binatang buruan. Dulu Orang Rimba menggunakan peralatan tombak dan parang untuk berburu tetapi sekarang aktifitas berburu sudah menggunakan senjata rakitan yang disebut *kecepek*. Kecepek mereka peroleh dengan cara membeli dari warga desa dengan harga Rp. 200.000 hingga Rp.300.000. Ada juga Orang Rimba yang sudah mampu merakit sendiri senjata kecepek. Hewan buruan yang laku dijual adalah babi hutan, rusa, kijang, landak, trenggiling, ular, biawak dan labi-labi. Harga jual hewan buruan beragam, babi hutan harga jual per ekor Rp.100.000-Rp.150.000 harga daging Rp.2000 per Kg, harga kijang Rp.100.000-Rp.150.000 per ekor hidup, harga landak Rp.50.000-Rp.60.000, hewan buruan yang paling dicari adalah Trenggiling karena harganya per ekor hidup Rp.200.000-Rp.300.000.⁶²

Orang Rimba berburu hewan liar ini terutama pada waktu ada pembeli (toke) yang memesan terlebih dahulu. Untuk beberapa jenis hewan seperti labi-labi, ular, dan trenggiling memang sudah ada pembeli (toke) yang setiap saat bersedia membeli. Aktifitas berburu tidak dapat dilakukan secara rutin, saat ini hewan buruan sudah semakin sulit di dapat karena kawasan hidup hewan buruan semakin jauh ke dalam hutan dan jumlahnya semakin berkurang.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan MJ, BJ, TR, HH, NG, Nopember 2009.

⁶² Op.Cit.Karno Sasmita,2009.



Gambar 4.22. Berburu untuk bertahan hidup dan sumber ekonomi

2. ***Mencari Getah Jernang***, getah jernang adalah getah atau resin yang dihasilkan dari pengolahan buah jernang, jernang merupakan tanaman sejenis rotan terdapat di dalam kawasan hutan TNBD. Harga getah jernang murni bisa mencapai Rp.1.000.000 per Kg, tetapi Orang Rimba belum mengetahui teknologi pengolahan jernang sehingga mereka sering mencampur getah jernang dengan kulit buahnya sehingga harga jualnya hanya berkisar Rp.400.000 sampai Rp.600.000 per Kg. Mencari getah jernang juga tidak dapat dilakukan setiap waktu, dalam setahun biasanya hanya satu kali musim jernang berbuah. Saat ini pohon jernang sudah mulai berkurang di kawasan TNBD, lokasi pencarian sudah sangat jauh dari tempat bermukim. Orang Rimba membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan getah jernang.
3. ***Mencari Getah Damar***, mengumpulkan damar merupakan aktifitas Orang Rimba yang dilakukan bersamaan aktifitas lainnya, mencari damar tidak ada waktu khusus. Berbagai macam jenis getah damar terdapat di kawasan TNB antara lain damar sisip, damar sarang, damar kepala tupai, damar tulang, damar pulut, damar matakucing dan damar kelungkung.⁶³ Mencari getah damar sudah jarang dilakukan Orang Rimba karena membutuhkan waktu yang lama, sementara harga getah damar hanya Rp. 1000 per Kg.

⁶³ Op.Cit.Karno Sasmita, 2009.

4. **Mencari Rotan**, aktifitas ini merupakan sumber ekonomi utama bagi Orang Rimba yang tidak memiliki kebun karet ataupun bagi yang memiliki kebun karet tetapi belum disadap. Berbagai macam jenis rotan mempunyai nilai ekonomis tinggi dan banyak pembeli yang menampung jenis hasil hutan non kayu (HHNK) ini. Berbagai jenis rotan yang sering dijual adalah jenis tebu-tebu, manau, sega, getah, seni, semambu, dan udang. Saat penulis melakukan observasi langsung ke lokasi



Sumber Photo : Alain Compost/KKI-WARSI

Gambar 4.23.
Orang Rimba Panen Rotan

pemukiman Orang Rimba di Kedondong Muda dan Air Ban banyak ditemukan titik-titik pengumpulan tebu-tebu dan manau untuk kemudian dilangsir keluar hutan.

Aktifitas mencari rotan biasa dilakukan secara berkelompok atau sendiri. Dalam aktifitas mencari rotan ini biasanya seluruh anggota dilibatkan, kepala keluarga dan anak-anak laki remaja dan dewasa bertugas mencari dan mengumpulkan rotan di titik pengumpulan, kemudian yang bertugas melangsir keluar rimba dibantu oleh anggota keluarga perempuan yaitu ibu dan anak perempuan. Rotan manau dan tebu-tebu dijual dalam bentuk batangan dengan ukuran panjang masing-masing 3 dan 4 meter. Sedangkan jenis rotan sega, semambu,



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gambar 4.24.
Ibu dan Anak Perempuan Rimba
Melangsir Rotan ke Desa

getah dijual dalam satuan kilogram. Harga rotan manau dan tebu-tebu bervariasi berdasarkan ukuran diameter batang. Untuk ukuran kecil harga per

batang Rp.500-Rp.1000, ukuran sedang Rp.3000 dan ukuran besar Rp.7000,- per batang.⁶⁴ Harga rotan memang cukup ekonomis, tetapi karena lokasi pencarian yang cukup jauh sehingga cukup sulit untuk mengangkutnya keluar dari hutan. Pada umumnya mencari rotan, setiap hari bisa dapat 4 ikat beratnya 1 kwintal harganya Rp.70.000,-. Paling banyak yg bisa di bawa keluar dalam satu minggu hanya 4 kwintal jadi satu minggu hasilnya Rp. 280.000,-.⁶⁵

5. **Mengambil Madu**, bagi Orang Rimba madu merupakan penghasilan musiman yaitu ketika musim berbunganya pohon-pohon di hutan sekitar bulan Agustus-September, musim ini juga sering diiringi oleh musim buah-buahan di hutan. Orang Rimba menyebut madu dengan “maniy rapah”, madu diambil dari sarang lebah yang disebut “bambing” pada pohon sialang. Pohon sialang adalah sebutan untuk jenis pohon yang disenangi lebah untuk bersarang. Beberapa jenis pohon yang disenangi lebah untuk bersarang adalah pohon kedondong, pohon kawon, pohon keruing, dan pohon pulai.



Pohon sialang memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi Orang Rimba, kepemilikan pohon biasanya merupakan warisan keluarga. Begitu pentingnya nilai pohon ini bagi orang yang merusak akan didenda adat 160 lembar kain,

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan BT, 19 Nopember 2009.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan MD, 19 Nopember, 2009.

sedangkan jika pohon yang dirusak mati atau ditebang maka akan didenda adat sebanyak 500 lembar kain.

Proses mengambil madu dilakukan dengan cara memanjat pohon sialang dengan menggunakan tangga dari pasak kayu yang disebut “*lantak*” yang dipahatkan ke batang pohon sialang. Untuk mengambil madu lebah ini diperlukan keterampilan memanjat dan membaca mantera, oleh karenanya tidak semua laki-laki Orang Rimba mampu melakukannya. Satu pohon sialang biasanya terdapat 50-100 sarang lebah, dan madu yang dihasilkan bisa dari satu pohon sialang 300-500 kilogram bahkan bisa lebih. Harga madu per kilo Rp.10.000-Rp.15.000,-.

6. *Berkebun Karet dan Sawit*, berkebun karet saat ini merupakan sumber pendapatan paling utama bagi Orang Rimba, meskipun harga karet selalu berfluktuasi dan sangat dipengaruhi musim tetapi jika dibandingkan dengan sumber matapencaharian Orang Rimba lainnya berkebun karet jauh lebih menguntungkan dan lebih menjamin keberlanjutan sumber pendapatan ekonomi Orang Rimba. Harga jual karet Orang Rimba di lokasi penelitian rata-rata berkisar Rp.3000-Rp.8000,-. Selain berkebun karet saat ini beberapa Orang Rimba telah menanam sawit. Menanam kelapa sawit merupakan pengaruh dari masyarakat desa sekitar daerah penyangga TNBD yang umumnya memiliki kebun sawit dari program plasma perusahaan perkebunan. Ada 4 (empat) perusahaan perkebunan kebun kelapa sawit yang memiliki lahan kebun mengelilingi kawasan TNBD, yaitu PT.Sawit Desa Makmur, PT.Jambi Agro Wiyana, PT.Era Mitra Agro Lestari dan PT.Sari Aditya Loka.

Menanam karet bagi Orang Rimba yang bermukim di daerah bagian Utara kawasan TNBD khususnya di Kelompok Makekal dimulai sejak beroperasinya perusahaan HPH di kawasan hutan yang menjadi ruang hidup mereka, kegiatan menanam karet di mulai sekitar awal tahun 1970-an. Kegiatan berkebun karet merupakan strategi adaptasi bagi Orang Rimba dikarenakan rasa khawatir akan habisnya kawasan hutan ruang hidup mereka sebagai akibat aktifitas penebangan hutan oleh perusahaan HPH. Dorongan untuk menanam karet bagi Orang Rimba

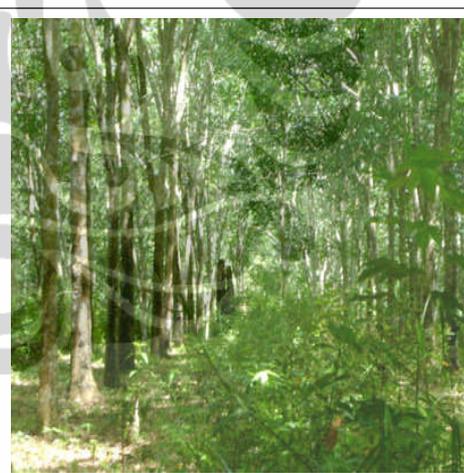
di kelompok Makekal juga datang dari seorang Rio (Kepala Desa) di Desa Tanah Garo yang berkedudukan sebagai Waris.⁶⁶

Orang Rimba di Kelompok Air Hitam mulai menanam karet sejak tahun 1984, sejak adanya pembangunan pemukiman transmigrasi ke kawasan hutan mereka. Aktifitas berkebun karet pada awalnya merupakan strategi bertahan dari tekanan pembukaan lahan hutan yang telah dijadikan pemukiman transmigrasi maupun pembukaan lahan kebun oleh Orang Terang, pembukaan kebun karet ditanam di lahan perbatasan antara kebun masyarakat desa dan kawasan hutan TNBD. Kebun karet yang ditanam ini disebut dengan “*hompongan*”. Dalam bahasa Orang Rimba “*hompongan*” berarti pagar.

Tujuan membuka kebun karet itu adalah untuk memagari atau menghadang Orang Terang agar tidak membuka lahan di kawasan hutan yang merupakan ruang kehidupan Orang Rimba. Selain pohon karet di dalam *hompongan* juga ditanam pohon buah-buahan seperti durian, duku, rambutan, pedaro (sejenis lengkeng), jengkol dan pohon buah lainnya.⁶⁷



Sumber Photo : Koleksi Pribadi



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr. 4.27.

Temenggung Tarib di Kebun Sawit

Gbr. 4.28.

Kebun Karet Berfungsi Sebagai Hompongan

Model kebun karet *hompongan* yang ditanami berbagai jenis pohon ini menjadikan *hompongan* lebih tepat disebut hutan karet, karena pola penanaman masih menggunakan bibit sapuan yang berasal dari kebun-kebun karet warga

⁶⁶ Op.Cit. Wawancara dengan SR.

⁶⁷ Op.Cit. Wawancara dengan TR.

desa. Hompongan yang ditanam secara polikultur ini mengacu pada sistem perkebunan hutan (*agroforestry*), berdasarkan banyak hasil penelitian bahwa sistem perkebunan ini dari aspek lingkungan memiliki nilai konservasi yang tinggi, dan juga dari aspek ekonomi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan, sebenarnya Orang Rimba yang memiliki kebun karet yang cukup luas terbatas pada golongan “pengulu” sedangkan anggota rombongan hanya sebatas sebagai buruh sadap di kebun karet para pengulu. Kalaupun ada anggota rombongan yang memiliki kebun karet luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektar, pohon karet yang ditanam tidak terlalu banyak rata-rata setiap orang hanya mampu menanam 200-300 pohon. tetapi ini hanya sebagian kecil, sebagian besar anggota rombongan belum mempunyai kebun karet dan masih menggantungkan hidup dari mencari hasil hutan non kayu di kawasan TNBD. Usaha pertanian karet ini telah membuat Orang Rimba telah melakukan intensifikasi sumber daya yang cukup nyata dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja mereka (Sandbukt & Warsi,1998,24). Permasalahan utama yang kemudian muncul kepada Orang Rimba yang bertanam karet ini adalah kualitas mutu getah karet mereka yang rendah dan jumlah produksi karet yang terbatas bila dibandingkan dengan karet orang warga desa.

4.4.2. Jaringan Pemasaran Hasil Hutan

Orang Rimba telah mengenal ekonomi uang melalui proses jual-beli dengan orang Terang. Umumnya mereka menjual hasil buru dan meramu. Mereka menjual berbagai hasil hutan di desa-desa sekitar. Demikian juga mereka memperoleh berbagai alat kebutuhan yang tidak dihasilkan di hutan dari desa-desa sekitar. Pada masa lalu perdagangan dengan orang luar adalah untuk memperoleh alat-alat serta keperluan Orang Rimba yang tidak bisa dibuat di dalam hutan. Alat-alat yang dibeli dari luar misalnya alat-alat dari besi, seperti parang, tembilang, tombak, pisau, kuali dan periuk. Selain itu mereka juga memperoleh kain yang digunakan sebagai pakaian, mas kawin, pembayar denda dan sebagai simpanan. Saat ini keadaan itu mulai berubah, barang-barang diatas masih tetap didapatkan dari luar. Akan tetapi saat ini semakin banyak barang kebutuhan sekunder yang

dibeli dari luar. Barang yang dibeli misalnya, handphone, minyak wangi, senapan (kecepek), dan berbagai jenis jajanan pabrik.

Sudah sejak lama Orang Rimba memiliki jaringan pemasaran dengan Orang Terang, mereka menjual hasil hutan dan hasil kebun ke pembeli yang sering disebut “toke” yang berada di desa sekitar bahkan untuk beberapa jenis hasil hutan para pembeli berasal dari luar desa sekitar. Dalam jaringan pemasaran hasil hutan dan hasil kebun Orang Rimba dikenal adanya peran “jenang”. Jenang adalah orang luar yang dipercaya dan ditunjuk secara resmi oleh Orang Rimba sebagai perantara perdagangan. Orang Rimba akan membawa hasil hutan dan hasil kebun kepada jenang, lalu jenang menaksir nilainya. Orang Rimba kemudian menukarnya dengan barang yang nilainya setara. Bersamaan dengan semakin terbukanya interaksi dengan orang luar, peran jenang semakin lemah, saat ini Orang Rimba tidak lagi hanya terfokus menjual hasil hutan dan hasil kebun kepada jenang, umumnya Orang Rimba secara langsung menjual hasil hutan kepada toke atau penduduk desa. Mereka membawa sendiri barang yang hendak dijual ke tempat dimana toke menunggu dengan mobil pengangkut.

4.5. Aspek Politik Orang Rimba

Orang Rimba di kawasan TNBD sudah mulai menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Pemilihan Presiden. Meskipun baru sebagian kecil yang menggunakan hak pilihnya, umumnya yang telah menggunakan hak pilih adalah kelompok Orang Rimba yang telah didampingi oleh LSM. Menarik untuk menyimak alasan mereka di dalam menggunakan hak pilih pada proses PILPRES 2009 sebagai berikut :

*“Dari pemilihan rajo (presiden, red) ini, kami berharap akan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun Pemkab Merangin,” ujarnya sambil mengisap rokok dalam-dalam”.*⁶⁸

“Kami harop bepak yang terpilih nantinyo menjago hutan kami, agar supayo adat istiadat kami jangan helang. Hutan tergantung adat istiadat,

⁶⁸ [http://www.jambiindependent.co.id/jio/index.php?option=comcontent&view=article&id=156:suasana-pilpres-di-perkampungan-orang-rimba-merangin-dansarolangun&catid=1:metrojambi&](http://www.jambiindependent.co.id/jio/index.php?option=comcontent&view=article&id=156:suasana-pilpres-di-perkampungan-orang-rimba-merangin-dansarolangun&catid=1:metrojambi& di download 4 agustus 2009 1.15 Wib.) di download 4 agustus 2009 1.15 Wib.

bertahankan hutan, bertahan adat kami. Kalau hutan tidak terbuka kan adat istiadat kito tak berubah. Itu yang kami harapkan ikut milih.”

“yang dipilih adalah rajo yang mau memikirkan nasib mereka yang tidak dipilih yang tidak mau berpikir untuk orang rimba. Kami sudah ikut pemilihan kades, bupati, gubernur dan presiden”⁶⁹

Sebenarnya Orang Rimba belum memiliki kesadaran politik, partisipasi politik mereka muncul disebabkan adanya mobilisasi dan dorongan pihak LSM dan pemerintah, sehingga partisipasi politik mereka masih rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis para pihak. Hal ini terungkap dari wawancara informan, beberapa kelompok Orang Rimba dilakukan pendataan sebagai calon pemilih pada saat menjelang dilaksanakan pemilihan kepala desa dan pada saat menjelang PILKADES dan PEMILU.

Sebelumnya tidak pernah dilakukan pendataan, misalnya untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pendataan warga miskin. Justru mereka mendapatkan bantuan bagi masyarakat miskin setelah didata untuk kepentingan PEMILU dan PILKADES. Beberapa ungkapan berikut menguatkan hal tersebut, ”pemilihan KADES kalau tidak ada suara dari SAD tidak akan jadi KADES”, “pendataan dilakukan utk pemilihan kades dan Pilpres, tapi kami sudah konsultasikan mereka sudah mau utk didaftarkan sebagai warga resmi desa”.⁷⁰

Aspek politik Orang Rimba di kawasan TNBD, dapat dilihat dari peristiwa penolakan Rencana Pengelolaan TNBD sering disingkat dengan RPTNBD yang disusun oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi sebagai pihak pengelola TNBD sebelum beralih menjadi Balai TNBD pada tahun 2006. Penolakan Orang Rimba ini dilakukan setelah adanya diskusi mengenai dokumen RPTNBD bersama LSM SOKOLA, dari hasil diskusi tersebut disimpulkan bahwa RPTNBD yang dibuat oleh BKSDA Jambi akan mengancam masa depan dan merugikan Orang Rimba Bukit bukit 12 karena tidak mengakomodir kebiasaan hidup dan tradisi adat Orang Rimba. Aksi penolakan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan MK, 16 Nopember 2009

⁷⁰ Hasil Wawancara ED dan BJ, 16 dan 20 Nopember 2009

RPTNBD ini dilakukan bersama Orang Rimba dengan dukungan dari aliansi beberapa LSM yang tergabung dalam Koper HAM.⁷¹

4.6. Identifikasi Masalah dan Isu Penting Terkait Masyarakat Adat Orang Rimba

4.6.1. Marjinalisasi Ekonomi

Proses marjinalisasi ekonomi masyarakat adat Orang Rimba telah berlangsung lama, dimulai dari aktifitas pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan menambah devisa negara. Kebijakan pemerintah dalam pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada pertengahan tahun 70-an kepada kurang lebih 28 perusahaan HPH di Provinsi dengan total luas lahan konsesi lebih kurang 2,6 juta hektar. 14 perusahaan HPH diantaranya memiliki izin konsesi di kawasan hidup Orang Rimba.⁷² Dampak langsung dari eksploitasi kawasan hutan oleh perusahaan HPH telah menghancurkan kawasan dan sumber-sumber kehidupan Orang Rimba.

Eksplorasi kawasan hutan yang menjadi kawasan dan sumber hidup Orang Rimba terus berlanjut dengan adanya kebijakan transmigrasi pada dekade tahun 80-an, Provinsi Jambi termasuk salah satu tujuan transmigrasi utama di Pulau Sumatera. Lebih kurang 7 kawasan pemukiman transmigrasi dibangun pemerintah di sepanjang jalur lintas Sumatera selama satu dasawarsa tahun 80-an, kawasan transmigrasi tersebut adalah (1) Trans Singkut, (2) Trans Kubang Ujo, (3) Trans Pamenang, (4) Trans Air Hitam, (5) Trans Hitam Ulu, (6) Trans Kuamang Kuning dan (7) Trans Rimbo Bujang. Program pembukaan jalan lintas/Trans Sumatera dan pembangunan kawasan transmigrasi ini menyebabkan berkurangnya secara drastis kawasan hidup Orang Rimba.



Sumber Photo : KKI-WARSI

Gbr. 4.29. Pemukiman Transmigrasi

⁷¹ Op.Cit. Pengendum dan KoperHAM, 2006.

⁷² Robert Aritonang, Hutan Dataran Rendah Propinsi Jambi dan Kehidupan Orang Rimba. Buletin Alam Sumatera Edisi 1/tahun VIII, Juli. KKI-WARSI, 2009.

Eksplorasi kawasan hidup Orang Rimba tidak segera berhenti setelah pembukaan kawasan transmigrasi, tetapi terus berlanjut pada dasawarsa tahun 90-an dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal pemberian izin pembukaan perkebunan swasta besar dan izin pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI), inilah puncak eksploitasi hutan kawasan hidup Orang Rimba secara masif. Alih fungsi kawasan hutan ini



Sumber Photo : www.film4.org

Gbr. 4.30.
Ruang Hidup OR berubah
Menjadi Kebun Sawit dan HTI

menyebabkan Orang Rimba kehilangan tanah/lahan tempat bermukim, sumber-sumber ekonomi dan sumber kehidupan mereka seperti rotan, jernang, getah balam, getah damar, hewan buruan, buah-buahan dan umbi-umbian yang merupakan sumber pangan bagi Orang Rimba serta kehilangan tatanan sosial budaya.

Dampak dari hilangnya kawasan hutan secara masif tersebut mereka hadapi dengan melakukan proses adaptasi dengan strategi mencari atau berpindah ke kawasan hutan yang masih tersisa di daerah penyangga atau di dalam kawasan Taman Nasional (TNKS, TNBT, dan TNBD). Secara ekonomi kelompok Orang Rimba yang memilih tinggal di kawasan sekitar dan dalam kawasan hutan masih lebih baik dari kelompok Orang Rimba yang memilih menetap diluar hutan meskipun pada taraf ekonomi yang masih dibawah standar layak hidup dan pas-pasan. Kelompok yang memilih tetap tinggal di kawasan hutan memiliki sumber ekonomi dari hasil menjual hasil hutan non kayu (HHNK) seperti rotan, jernang, getah-getahan, madu, hasil buruan, serta hasil kebun karet.

Secara ekonomis pendapatan dari hasil penjualan HHNK tidaklah dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak dan kontinu, hal ini dikarenakan pendapatan berasal dari kegiatan mengekstraktif sumberdaya hutan yang tergantung dari musim dan ketersediaan yang terbatas. Sementara hasil kebun karet yang tidak dilakukan dengan budidaya yang intensif hanya menghasilkan

produksi yang rendah. Sebagian besar anggota kelompok yang memilih tinggal di dalam kawasan hutan menggantungkan sumber ekonomi dari kegiatan berburu dan meramu. Hanya sebagian kecil terutama para pengulu Orang Rimba yang memiliki kebun karet yang cukup luas, sehingga mereka memiliki tingkat ekonomi yang relatif lebih baik.

Beberapa individu pengulu memiliki lahan kebun karet yang luasnya diatas 5 hektar. Para pengulu ini memiliki penghasilan dari kebun karet berkisar Rp.3.000.000 sampai Rp.5.000.000 per bulan. Bagi anggota kelompok yang berburu dan meramu penghasilan tidak tetap per bulan diperkirakan hanya berkisar Rp.500.000 sampai Rp.750.000,-. Angka pendapatan ini bukanlah suatu angka yang dapat memenuhi standar hidup minimal.

Semenjak dibangunnya proyek pemukiman transmigrasi Air Hitam dan Hitam pada tahun 1986 di kawasan penyangga TNBD Orang Rimba Air Hitam mulai mengenal ekonomi uang dan melakukan aktifitas jual beli.⁷³ Barang-barang yang biasa dibeli oleh adalah garam, gula, tembakau, kopi, rokok, minyak sayur, batu baterai, beras, dll. Untuk barang-barang tersebut rata-rata mereka membelanjakan uang sebesar Rp.125.000 per minggu.⁷⁴ Kelompok ini masih memiliki sumber bahan pangan yang mereka produksi sendiri dari hasil ladang berupa umbi-umbian, pisang, cabe dan buah-buahan hutan, sehingga mereka tidak memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Beberapa ungkapan informan mengenai pendapatan mereka terungkap sebagai berikut : “semua orang tetap bisa bikin kebon, cuma itu belum ada mencukupi.. macam mana membantu ekonomi kami orang rimba supaya dia maju sendiri”, “sekarang masih tetap miskin bahkan bisa-bisa mati”, “masalah ekonomi yg kurang makanya terjadi jual lahan itu”.⁷⁵ Ungkapan ini menggambarkan tingkat kesulitan ekonomi kelompok ini. Faktor lain yang semakin menekan pendapatan Orang Rimba adalah rendahnya harga jual HHNK oleh para toke desa, sebagaimana alasan yang diungkapkan informan sebagai berikut :

⁷³ Op.Cit.Wawancara dengan TR, 17 Nopember 2009.

⁷⁴ Op.Cit.Karno Sasmita, 2009.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan TR, MB, 17 dan 19 Nopember 2009.

“Yang pertama dia (toke desa) makan otak kita, yang kedua kito dapat bunga (untung) sedikit. Enaknya kita jual secara langsung saja secara bebas supaya dapat lebih banyak”⁷⁶

Kelompok Orang Rimba yang memilih strategi adaptasi dengan cara “bediom” tingkat ekonomi mereka lebih sulit, meskipun mereka dapat mencari sumber ekonomi dari HHNK dan berburu tetapi karena mereka sudah menetap di luar kawasan hutan mereka mengalami kesulitan karena jarak yang jauh dari sumber ekonomi. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dan jarak tempuh yang jauh untuk mengeluarkan HHNK, sehingga jumlah yang dapat diangkut untuk dijual relatif kecil dan hasil penjualan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang dikeluarkan. Mereka tidak memiliki lahan untuk memproduksi dan cukup sulit untuk mendapatkan kerja harian. Ironisnya tingkat kebutuhan mereka sudah cenderung sama dengan masyarakat biasa, sementara mereka tidak dapat memproduksi sumber pangan sendiri dikarenakan tidak memiliki lahan yang bisa ditanami. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh kelompok bediom ini hanyalah sebagai buruh sadap karet, buruh terbas, memungut berondolan sawit dan berburu hewan liar.⁷⁷

Kelompok Orang Rimba yang memilih cara tetap bertahan di kawasan perkebunan warga desa dan perusahaan meskipun dengan kondisi yang sangat termarginalisasi karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak memiliki sumber kehidupan. Kelompok ini mempertahankan hidup dengan cara berburu babi, memungut berondolan sawit. Kelompok kecil yang tinggal dipinggiran kota mempertahankan hidup dengan cara mengemis, menjadi pemulung serta menjual benda-benda eksotis. Hanya sebagian kecil saja dari kelompok Orang Rimba yang mampu beradaptasi dengan melakukan penanaman intensif lahan kebun, merubah adat-istiadat dan memeluk agama.⁷⁸

Sampai saat dilakukan penelitian ini belum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan marginalisasi ekonomi yang

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan MB, 19 Nopember 2009.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan MK, ED, NG, MJ, 16 dan 19 Nopember 2009.

⁷⁸ Op.Cit. Robert Aritonang, 2009.

dihadapi oleh masyarakat adat Orang Rimba. Marjinalisasi ekonomi Orang Rimba saat ini juga disebabkan oleh persaingan yang ketat dengan warga desa Orang Melayu dan warga desa transmigrasi terhadap akses kepemilikan dan pembukaan lahan-lahan yang dapat dijadikan kebun.

Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan Orang Rimba membuat mereka sulit untuk dapat bekerja sebagaimana layaknya masyarakat biasa. Masih adanya stereotip negatif terhadap Orang Rimba membuat komunitas ini tidak memiliki akses dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

4.6.2. Melemahnya Adat Istiadat

Melemahnya adat-istiadat di komunitas Orang Rimba dipengaruhi oleh semakin terbukanya interaksi dengan masyarakat luar sehingga banyak menerima berbagai pengaruh dan informasi, saat ini sudah terjadi perubahan pola pikir pada Orang Rimba seiring perubahan zaman, Orang Rimba sudah ada yang memeluk agama yang dulu bagi mereka bicara agama adalah tabu adat. Bertambahnya pengetahuan, tuntutan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup semakin tinggi, kurangnya manfaat yang dirasakan oleh mereka apabila masih tetap mempertahankan adat. Proses perubahan sosial ini cenderung memperlonggar aturan adat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pola pikir mereka yang mana adat tersebut kurang bermanfaat bagi mereka. Meskipun demikian mereka tetap terus menjaga dan memegang kuat aturan norma adat yang terkait dengan kepercayaan dewa dan leluhur.

Beberapa sanksi adat terhadap pelanggaran norma, misalnya menjual lahan dikenakan denda 500 kain tetapi saat ini denda tersebut tidak diindahkan lagi. Melemahnya adat-istiadat komunitas Orang Rimba lebih kepada pengaruh adanya tekanan dan proses adaptasi masyarakat adat Orang Rimba. Contoh lain adalah dari aspek pengobatan, Orang Rimba mengenal tradisi besale yaitu suatu proses upacara untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tradisi ini sudah mulai jarang mereka lakukan karena mereka sudah mengenal obat-obatan kimia untuk proses penyembuhan.

Saat ini anggota kelompok perempuan sudah bebas berinteraksi dengan orang luar, mereka sudah bebas pergi ke pasar mingguan di desa-desa terdekat tanpa rasa ketakutan lagi. Dulu perempuan Orang Rimba tidak boleh bertemu orang luar, jika orang luar bertemu dengan perempuan Orang sementara pihak laki-laki Rimba tidak ada bisa dikenakan sanksi adat. Semenjak pemukiman transmigrasi dibuka kaum perempuan sudah bebas bepergian dan bertemu dengan masyarakat luar. Kebiasaan makan untuk kalangan muda sudah tidak ada pantangan, kecuali kalangan orang tua dan penghulu yang masih mempertahankan adat tidak memakan daging binatang peliharaan orang desa.

Antar kelompok Orang Rimba memiliki wilayah pemukiman yang disepakati mengenai batas-batasnya dan tidak boleh dilanggar, pelanggaran tata batas merupakan pelanggaran adat, tetapi sekarang dengan semakin bertambahnya anggota kelompok maka kebutuhan lahan semakin meningkat sementara lahan semakin berkurang sehingga telah terjadi pelanggaran wilayah, melewati batas wilayah kelompok lainnya. Pelanggaran ini tidak lagi bisa diberi sanksi karena khawatir akan menjadi sengketa dan pertikaian. Pelanggaran wilayah ini disebabkan oleh munculnya pengakuan hak milik terhadap lahan individu, yang pada masa lalu hak kepemilikan adalah hak milik bersama keluarga dan rombongan. Munculnya hak kepemilikan individu terhadap lahan karena maraknya pembelian tanah Orang Rimba oleh masyarakat luar.

4.6.3. Desakan Okupasi dan Jual Beli Lahan

Desakan melakukan okupasi lahan di kawasan TNBD oleh masyarakat luar dan Orang Rimba merupakan isu penting yang akan berpengaruh kepada kelangsungan kehidupan Orang Rimba dan kelestarian kawasan hutan TNBD. Sejak dua tahun terakhir okupasi lahan untuk diperjual belikan semakin marak di kalangan masyarakat Orang Rimba.



Sumber Photo : www.lightstalkers.org

Gbr.4.31.
Orang Rimba dan Motor Baru

Dalam proses okupasi dan jual beli ini ditengarai ada kerjasama antara pihak pemilik modal dari Orang Luar dan Orang Rimba sebagai pelaku okupasi lahan untuk kepentingan masyarakat luar. Status kawasan TNBD sebagai kawasan hidup Orang Rimba dapat dijadikan perlindungan bagi masyarakat luar untuk membuka lahan di kawasan TNBD.⁷⁹

Bagi Orang Rimba, okupasi lahan untuk dijual jelas sekali motifnya adalah untuk kepentingan memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor dan handphone serta selebihnya baru untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Jika hal ini dibiarkan maka hal ini akan berdampak pada berkurangnya sumberdaya lahan bagi Orang Rimba. Sebuah perubahan yang mengkhawatirkan. Maraknya jual beli lahan ini karena sudah semakin meningkatnya daya beli warga desa sekitar kawasan TNBD dan kebutuhan memperluas lahan kebun yang telah menghasilkan. Alasan lain dari maraknya proses jual beli lahan ini adalah semakin sulitnya sumber ekonomi Orang Rimba, sehingga untuk mempertahankan hidup salah satu alternatif yang dilakukan adalah dengan melakukan okupasi lahan di kawasan TNBD kemudian dijual kepada warga desa.⁸⁰

Adanya aktifitas jual beli lahan ini sebenarnya banyak ditolak oleh kelompok Orang Rimba lainnya yang berada di kawasan TNBD, bagi mereka menjual lahan tidak akan memberi keuntungan tapi justru merugikan.⁸¹ Jual beli lahan di kawasan hutan daerah penyangga TNBD mulai ada semenjak adanya pemukiman transmigrasi, mengalami peningkatan semenjak dua tahun terakhir. Perkiraan penulis tingginya tekanan akan pembukaan lahan dikawasan TNBD karena dampak perkebunan sawit yang lebih menguntungkan jika diusahakan secara pribadi daripada dengan pola kemitraan.

4.6.4. Sistem Pengelolaan Kawasan TNBD

Adanya dua tujuan khusus keberadaan TNBD menyebabkan kondisi yang dilematis bagi pihak pengelola kawasan yaitu Balai TNBD. Disatu sisi tugas mereka adalah mempertahankan ruang hidup dan meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba, disisi lain mereka harus menjaga kelestarian kawasan dengan cara

⁷⁹ Op.Cit. Wawancara dengan TR, 17 Nopember 2009.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan TR, BT, MB, 17 dan 19 Nopember 2009.

⁸¹ Ibid Wawancara dengan TR,BT,MB, 2009.

mengurangi dan membatasi aktivitas manusia di dalam kawasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang menjadi dasar pengelolaan kawasan. Dua tujuan ini menimbulkan konflik kepentingan yang laten antara pihak pengelola TN dan komunitas Orang Rimba

Berdasarkan peraturan pengelolaan yang ada yaitu UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, UU 41/1999 tentang Kehutanan dan peraturan lainnya, keberadaan komunitas masyarakat adat dapat berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Namun disatu sisi ada peraturan (SK.Meunhutbun258/Kpts-II/2000) yang memberikan kewenangan pihak pengelola untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba.

Hasil wawancara mendalam dengan informan mengungkapkan dilematis pengelolaan kawasan TN disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas dan sesuai dengan kondisi lapangan kawasan yang di dalamnya terdapat kehidupan komunitas masyarakat adat Orang Rimba. Kondisi dilematis dapat dilihat dari ungkapan berikut : “Ada 2 persimpangan satu sisi kelestarian kawasan harus utuh disisi lain kualitas hidup orang rimba harus meningkat”, “kalau kualitas hidupnya relatif kalau ingin sejajar dengan masyarakat di luar tidak akan bisa tercapai karena tetap akan bertabrakan dengan aturan UU”.⁸²

Pola pengelolaan kawasan TNBD yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat Orang Rimba yang belum baku dan tata batas TN merupakan satu hal pokok yang menjadi persoalan dan perhatian para pihak baik

kalangan pemerintah dalam hal ini Balai TNBD, PEMDA (tingkat kabupaten, kecamatan dan desa), kalangan LSM, masyarakat desa disekitar kawasan, dan



Sumber Photo : KOPER HAM

Gbr. 4.32.
Orang Rimba Demonstrasi
Menolak RPTNBD

⁸² Hasil Wawancara dengan RD, 7 Nopember 2009

Orang Rimba. Berbagai pihak tersebut memiliki agenda kepentingan masing-masing terkait sistem pengelolaan kawasan.

Sistem pengelolaan kawasan, sudah pernah disusun dalam rencana pengelolaan taman nasional (RPTN) oleh Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) pada tahun 2005, waktu itu BKSDA sebagai pengelola kawasan sebelum terbentuknya Balai TNBD, namun rencana pengelolaan tersebut di tolak oleh pihak aliansi LSM (KOPERHAM) dan komunitas adat Orang Rimba dengan alasan bahwa RPTNBD tersebut tidak mengakomodir kepentingan Orang Rimba. Dampak dari adanya RPTNBD yang ditetapkan pada tahun 2005 tersebut, telah menyebabkan terjadinya perusakan tanaman dan penebangan pohon karet Orang Rimba oleh staff BKSDA, sehingga memicu konflik terbuka. Penolakan RPTNBD pada tahun 2006 dilakukan secara demonstrasi ke kantor BKSDA dan bertemu dengan beberapa fraksi di DPR-RI untuk memperjuangkan penolakan diterapkannya RPTNBD.

Saat ini telah disusun kembali RPTNBD oleh pihak Balai TNBD sebagai rujukan dalam pengelolaan kawasan TNBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai TNBD, sistem pengelolaan kawasan akan di kelola dengan “sistem zonasi” karena hal ini sesuai dengan peraturan pengelolaan TN. Hanya saja RPTN yang baru ini akan mengakomodir kepentingan Orang Rimba. Konsep RPTN ini akan disosialisasikan dan didiskusikan bersama para pihak terutama masyarakat adat Orang Rimba.

Sejauh mana RPTN ini akan mengakomodir kepentingan Orang Rimba memang harus dilakukan pembahasan bersama yang melibatkan para pihak agar RPTN Bukit Dua Belas yang dihasilkan dapat mengakomodir kepentingan peningkatan kesejahteraan Orang Rimba dan kelestarian sumber daya hayati kawasan TNBD.

4.6.5. Rekonstruksi Tata Batas TNBD

Rekonstruksi tata batas TNBD yang sedang dilakukan pihak yang berwenang merupakan isu penting di kalangan Orang Rimba dan pihak LSM pendamping, dikarenakan proses rekonstruksi ini akan berkaitan dengan wilayah sumberdaya milik Orang Rimba berupa “*benuaron*” atau kebun buah-buahan

yang berada diantara garis batas TNBD dan batas wilayah desa. Keberadaan benuaron ini membuat terjadinya gesekan kepentingan akan penguasaan lahan antara kelompok Orang Rimba dan masyarakat desa. Masing-masing merasa berhak akan areal hutan tersebut.

Hal yang paling penting dari proses rekonstruksi ini selain memperjelas wilayah kawasan TNBD, adalah mensiasati ketersediaan lahan bagi Orang Rimba guna menunjang sumber ekonomi mereka. Rekonstruksi tata batas tidak hanya akan melindungi kawasan hidup Orang Rimba saat ini, tetapi juga harus dipertimbangkan ketersediaan lahan bagi Orang Rimba yang akan menjadi jaminan kelangsungan hidup mereka. Artinya rekonstruksi tata batas TNBD tidak mengarah pada mempersempit luas fisik kawasan hutan tetapi juga harus mempertimbangkan perluasan ruang kehidupan Orang Rimba dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas HTI yang berada di daerah penyangga TNBD. Pencadangan lahan disekitar daerah penyangga TNBD yang dimasukkan dalam kawasan TNBD merupakan suatu strategi untuk mengatasi persoalan semakin menyempitnya kawasan ruang hidup Orang Rimba.

4.7. Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemerintah Bagi Orang Rimba.

4.7.1. Program Pendidikan

Masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD sudah mulai dapat menerima proses pendidikan. Pengenalan akan proses pendidikan pada awalnya diperoleh dari pihak LSM dan individu masyarakat yang memiliki program pemberdayaan dan kepedulian terhadap Orang Rimba.

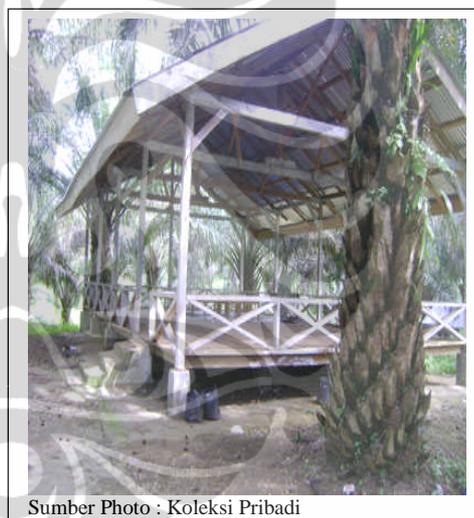
Proses pendidikan bagi kelompok Orang Rimba wilayah Air Hitam dimulai dari adanya inisiatif individu warga masyarakat desa dan pengulu Orang Rimba pada tahun 1993 untuk melakukan proses belajar mengajar bagi anak-anak Orang Rimba. Pada tahap awal lebih kurang 50 anak mengikuti proses belajar ini, kegiatan belajar dilakukan di pondok kayu yang dibuat secara swadaya oleh kelompok Orang Rimba, guru yang mengajar adalah warga desa. Kemudian ide ini diteruskan untuk meminta pembangunan gedung sekolah kepada pihak Pemerintah Kabupaten (waktu itu masih Sarolangun Bangko). Pemkab segera

setuju untuk membangunkan gedung sekolah pada tahun 1984 yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak Orang Rimba, pada awalnya sekolah tersebut dikelola oleh Dinas Sosial kemudian karena menyangkut permasalahan kurikulum dan kelanjutan proses belajar mengajar maka akhirnya pengelolaan diserahkan ke Dinas Pendidikan.⁸³

Kebijakan pemerintah membangun sarana fisik gedung sekolah dan menerapkan metode proses belajar mengajar layaknya sekolah formal, ternyata tidak mudah diterapkan terhadap anak-anak Orang Rimba. Ketika para pengulu Orang Rimba yang menjadi inisiator terlaksananya proses pendidikan meninggal dunia dan adanya pergantian guru yang pertama memberi pelajaran kepada anak-anak Orang Rimba, hal ini menyebabkan mulai berkurangnya jumlah anak yang mengikuti proses belajar di sekolah.⁸⁴



Sumber Photo : Koleksi Pribadi



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr. 4.33.
Pondok Belajar Anak Rimba
Dibangun Swadaya Orang Rimba

Gbr. 4.34.
Saung Belajar Anak Rimba
Dibangun Oleh Perusahaan

Sejak berdirinya sekolah khusus bagi anak Orang Rimba pada tahun 1994, sampai dengan tahun 2009 jumlah siswa Orang Rimba yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebanyak 15 orang.⁸⁵ Kecilnya jumlah siswa Orang Rimba yang

⁸³ Hasil Wawancara dengan RB, 17 Nopember 2009.

⁸⁴ Achmanto Mendatu, Sekolah Orang Rimba, artikel pada <http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/sekolah-orang-rimba.html> di download 27-08-2009 10.39 pm

⁸⁵ Op.Cit.Wawancara dengan RB,2009.

berhasil menamatkan sekolah menunjukkan bahwa program pendidikan bagi masyarakat adat Orang Rimba menyimpan sejumlah permasalahan.



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr. 4.35.

SDN 191 Awal Pendiriannya Khusus Bagi Anak Orang Rimba

Hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan berhasil mengidentifikasi permasalahan dalam proses pelaksanaan pendidikan secara formal bagi Orang Rimba sebagai berikut : (1) rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di tingkat orang tua dan anak; (2) adanya budaya melangun yang menyebabkan anak usia sekolah ikut berpindah; (3) lemahnya fungsi institusi keluarga; (4) perceraian orang tua; (5) masalah ekonomi keluarga; (6) perilaku anak yang tidak bisa terikat waktu dan tempat; dan (7) rendahnya gizi anak.⁸⁶

Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan bagi masyarakat adat Orang Rimba. Tidak terpenuhinya program pelayanan pendidikan dasar bagi Orang Rimba oleh pemerintah merupakan suatu pengabaian terhadap hak azazi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan RB, AR, PR, 17 Nopember 2009.

Pihak PEMDA Kabupaten Sarolangun sejak dua tahun terakhir telah membentuk satu seksi khusus pembinaan dan pendidikan Suku Anak Dalam di Dinas Pendidikan, namun belum ada program yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan bagi Orang Rimba. Program yang telah dilakukan PEMDA adalah memberikan bantuan seragam sekolah bagi 125 siswa Orang Rimba. Belum adanya kebijakan dan program yang dapat memberikan solusi bagi pendidikan Orang Rimba disebabkan kendala pendanaan dan belum adanya petunjuk teknis (JUKNIS) dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) mengenai pendidikan Orang Rimba.⁸⁷

Pada tataran pelaksana teknis proses pendidikan di tingkat paling bawah dalam hal ini pihak sekolah dasar, sudah ada upaya-upaya melakukan terobosan untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar bagi anak Orang Rimba. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak LSM dan perusahaan yang memiliki program pemberdayaan pendidikan bagi Orang Rimba. Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa metode proses pembelajaran yang dikenal dengan kelas jauh, metode ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan proses belajar ditempat pemukiman Orang Rimba dengan jadwal belajar yang tentatif. Selanjutnya anak-anak Orang Rimba yang telah mengikuti proses pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh pihak LSM dan pihak perusahaan diikutkan dalam proses belajar di sekolah formal dalam rangka persiapan untuk mengikuti ujian akhir SD. Kerjasama ini telah menghasilkan lulusan sebanyak 15 siswa Orang Rimba.⁸⁸

Upaya yang cukup signifikan untuk memberikan akses pendidikan bagi Orang Rimba di kawasan TNBD telah dilakukan oleh LSM WARSI sejak tahun 1997 melalui program pendidikan alternatif bagi Orang Rimba, program ini masih berlangsung hingga saat ini. Pendidikan alternatif ini kurikulumnya hanya sebatas pada memberikan kemampuan Baca, Tulis, Hitung (BTH) bagi anak-anak Orang Rimba. Metode belajar yang dilakukan adalah dengan mendatangi pemukiman kelompok Orang Rimba di dalam kawasan TNBD membangun kesepakatan dengan orang tua dan anak untuk melakukan proses pendidikan. Setelah

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan AZ, 7 Desember 2009.

⁸⁸ Op.Cit.Wawancara RB, AR, PR, 2009.

kesepakatan tercapai kemudian disepakati tempat belajar dan waktu belajar yang sangat longgar tergantung kesediaan waktu dan keinginan anak untuk belajar.⁸⁹

Selain melakukan proses pendidikan alternatif, upaya lain yang dilakukan oleh LSM WARSI adalah memperluas akses pendidikan Orang Rimba untuk dapat mengikuti pendidikan secara formal baik pada jenjang SD maupun jenjang SMP atau program sederajat seperti PAKET B. Saat ini ada 3 orang anak Orang Rimba yang telah dipersiapkan untuk mengikuti program PAKET B. Selain kegiatan proses belajar yang langsung dilakukan, juga dilakukan kerjasama dengan program pendidikan non formal pemerintah seperti program PKBM yang ada ditingkat desa untuk memfasilitasi anak Orang Rimba agar dapat mengikuti proses belajar pada program tersebut.⁹⁰

Program pendidikan alternatif yang dilakukan oleh LSM WARSI sudah berhasil merubah pola pikir dan pandangan masyarakat adat Orang Rimba untuk memperbolehkan anak-anak mereka mengenal dan mengikuti proses pendidikan. Upaya ini tidak begitu mudah dilakukan, karena pada awalnya banyak mengalami penolakan dari para pengulu Orang Rimba, namun dengan pendekatan pendampingan yang dilakukan akhirnya sebagian besar kelompok Orang Rimba di TNBD sudah dapat menerima proses pendidikan bagi anak-anak mereka.

Sebagai upaya awal untuk melakukan penyadaran dan memberikan kemampuan dasar Baca Tulis Hitung program pendidikan alternatif ini cukup berhasil. Namun perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam hal metode pengajaran dan kurikulum yang diberikan agar dapat lebih memberikan hasil yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitas dari proses pendidikan yang dilaksanakan.

Hasil wawancara mendalam mengenai model pendidikan yang dibutuhkan oleh Orang Rimba terungkap bahwa mereka tidak hanya membutuhkan kemampuan BTH pada anak-anak mereka, tetapi mereka membutuhkan model pendidikan yang dapat menunjang keterampilan pengolahan hasil hutan non kayu

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan AR dan PR, 17 Nopember 2009.

⁹⁰ Op.Cit.Wawancara dengan AR dan PR,2009.

bagi anak-anak mereka. Kebutuhan model pendidikan ini untuk menunjang peningkatan perekonomian mereka.⁹¹

Pihak pemerintah khususnya PEMDA harus segera mengambil kebijakan dan menyusun grand desain model pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat Orang Rimba, sehingga akses pendidikan dasar bagi Orang Rimba dapat segera dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh berbagai tujuan program pendidikan nasional maupun internasional. Harus ada kebijakan khusus menyangkut program pendidikan Orang Rimba mengingat kondisi sosial budaya peserta didik yang berbeda dengan anak usia sekolah pada masyarakat umum.

4.7.2. Program Kesehatan

Masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD sudah lebih terbuka dengan pengobatan secara medis. Keterbukaan terhadap pengobatan secara medis dimulai sejak adanya program pembangunan pemukiman transmigrasi Air Hitam dan Hitam Ulu, yang juga membangun fasilitas sarana kesehatan berupa PUSKESMAS. Meskipun secara adat istiadat yang berlaku di masyarakat Orang Rimba melarang pengobatan dengan Orang Terang, tetapi sekarang pola pikir mereka sudah berubah ke lebih praktis dan lebih cepat menginginkan kesembuhan mereka lebih memilih ke puskesmas daripada melakukan ritual *besale* yang lebih lama dan lebih rumit.⁹²

Program pelayanan kesehatan yang telah dirasakan oleh Orang Rimba adalah program kesehatan secara nasional berupa JAMKESMAS dan ASKESKIN dari dana APBN berupa kartu sehat maupun kebijakan PEMDA untuk



Sumber Photo : KKI-WARSI

Gbr.4.36.
Fasilitator Kesehatan WARSI
melakukan Pengobatan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan MB, 19 Nopember 2009.

⁹² Op.Cit.Wawancara dengan TR,2009.

pelayanan pengobatan gratis. Secara khusus Dinas Kesehatan Kabupaten telah membangun 2 (dua) unit POS YANDU di Desa Pematang Kabau yang berlokasi di 2 tempat yaitu di Singosari dan Kutai, untuk melayani kegiatan penimbangan bayi dan konsultasi kesehatan ibu dan anak, dengan jadwal pelayanan dilaksanakan sebulan sekali. Untuk pelayanan kesehatan umum lainnya bagi Orang Rimba dilayani di Puskesmas Pematang Kabau yg lokasinya tidak terlalu jauh hanya sekitar 1,5-3 KM dari tempat pemukiman mereka.⁹³

Dinas Kesehatan tidak membuat program secara khusus dan signifikan bagi Orang Rimba dikarenakan mereka sudah familiar dengan masalah kesehatan, dan DINKES menganggap bahwa mereka sudah seperti masyarakat awam pada umumnya untuk masalah kesehatan. Hanya ada beberapa program yang sifatnya agak khusus pernah dilakukan yaitu kegiatan Semalam Bersama SAD dengan memberikan program informasi melalui pemutaran film, itupun hanya kebijakan insidental tidak ada anggaran secara khusus yang pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan pihak LSM yang memiliki program kegiatan bersama Orang Rimba. Kemudian ada kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) bagi Orang Rimba yang dilakukan secara insidental.⁹⁴

Kebijakan secara terstruktur di dalam Rencana Kerja (RENJA) DINKES bagi Orang Rimba tidak ada, dengan alasan yang sama bahwa Orang Rimba dianggap sudah seperti masyarakat biasa jadi tidak perlu program khusus bagi mereka. Tetapi ada kebijakan bupati secara umum untuk semua pelayanan dasar seperti kesehatan dibebaskan dari biaya bagi semua masyarakat tidak terkecuali Orang Rimba.

Pada tahun 2005 DINKES Kabupaten Sarolangun pernah membuat program perubahan perilaku kesehatan dengan memberikan sabun, dan kain bagi Orang Rimba, tetapi tentunya program ini tidak dapat diukur sejauh mana pengaruh pemberian sabun akan merubah perilaku hidup sehat bagi Orang Rimba. Pihak DINKES juga mengungkapkan masalah keterbatasan anggaran sehingga

⁹³ Hasil Wawancara dengan MF, 7 Desember 2009.

⁹⁴ Op.Cit.Wawancara dengan MF, 2009.

tidak bisa lagi melaksanakan program secara optimal, hal ini berdampak pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dapat terpenuhi.

Pihak DINKES menyadari bahwa mereka belum dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat adat Orang Rimba, dikarenakan pemukiman kelompok yang menyebar. Sehingga strategi program yang dipilih adalah memprioritaskan pada kelompok-kelompok yang memiliki anggota cukup besar, tetapi untuk daerah yang kelompok Orang Rimba jumlahnya kecil hanya terdiri dari 2-3 Kepala Keluarga dan tersebar bahkan belum tersentuh sama sekali, hanya saja kalau ada kegiatan-kegiatan seperti Bulan Vitamin A, dan Pekan Imunisasi strategi yang dilaksanakan adalah dengan membuat instruksi kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan PUSKESMAS, Bidan Desa (BI DES) dan Puskesmas Pembantu untuk melakukan strategi jemput bola mendatangi lokasi-lokasi pemukiman Orang Rimba.⁹⁵

Kebijakan dan program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PEMDA Sarolangun sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi komunitas Orang Rimba. Tetapi anggapan bahwa Orang Rimba sudah sama pemahamannya tentang aspek kesehatan dengan masyarakat umum tidaklah sepenuhnya benar. Fakta lapangan yang penulis temukan ketika melakukan observasi ke pemukiman Orang Rimba menunjukkan bahwa dari segi kesehatan Orang Rimba sangat rentan terserang berbagai penyakit. Hal ini disebabkan mereka tinggal di kawasan hutan dengan membangun pondok yang sangat sederhana, sanitasi lingkungan tempat mereka tinggal sangat buruk, dan perilaku makan yang masih mengkonsumsi bahan makan yang tidak dimasak secara sempurna.

Hasil wawancara dengan informan dan pengamatan langsung terhadap perilaku dan tempat tinggal beberapa masalah kesehatan Orang rimba yang dapat diidentifikasi adalah perilaku hidup tidak sehat seperti perokok berat dan jarang mandi, sanitasi lingkungan tempat tinggal yang buruk dan pengetahuan yang minim akan pola hidup sehat dan bersih, tingginya angka kematian bayi dan ibu

⁹⁵ Op.Cit.Wawancara dengan MF, 2009.

pada saat melakukan persalinan, rendahnya angka harapan hidup, dan pola pengobatan yang tradisional.

Meskipun tidak ada data-data kuantitatif mengenai angka kematian dan angka kelahiran, karena ini memang sulit diperoleh dari instansi terkait yang juga kesulitan didalam melakukan pencatatan bagi komunitas Orang Rimba. Namun kondisi kesehatan komunitas adat Orang Rimba ini juga diperoleh dari beberapa informasi sekunder dari lembaga LSM yang melakukan program advokasi kesehatan bagi Orang Rimba yang menyatakan bahwa tingkat harapan hidup Orang Rimba rendah dan tingkat kematian bayi dan ibu yang melahirkan tinggi hal ini disebabkan karena proses persalinan yang kurang baik.

Proses kelahiran masih dilakukan secara tradisional melalui dukun beranak di komunitas orang rimba itu sendiri. Proses kelahiran bagi orang rimba, menurut kepercayaannya, dianggap sebagai kesempatan mereka didatangi dewa. Karena itu, tak boleh ada orang lain di luar komunitas orang rimba ketika prosesi kelahiran terjadi. Tradisi ini merupakan faktor yang menjadi hambatan ketika akan melakukan penyadaran agar Orang Rimba melakukan persalinan di luar hutan. Disamping itu Orang Rimba memang melakukan sejumlah aktifitas ritual dan persiapan secara adat menjelang proses persalinan dan sesudah melahirkan. Sehingga memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan persalinan diluar kawasan hutan, menurut adat mereka proses melahirkan harus dilakukan di *tanoh peranokon* (tempat melahirkan).

Beberapa penyakit yang menyebabkan kematian menurut mereka adalah demam dan mencret.⁹⁶ Penyakit demam yang mereka maksud yang dapat menyebabkan kematian adalah penyakit demam malaria, secara klinis kawasan hutan di Provinsi Jambi merupakan daerah endemik nyamuk malaria. Sedangkan mencret adalah penyakit diare akut yang secara klinis dapat menyebabkan kematian karena karena kekurangan cairan atau dehidrasi.

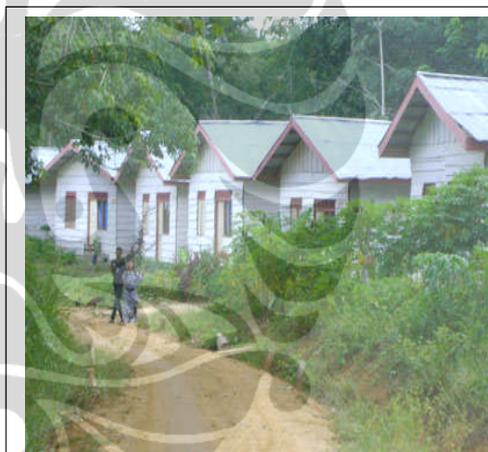
Prediksi tingginya angka kematian di komunitas adat Orang Rimba dapat diprediksi dari rendahnya jumlah pertumbuhan penduduk Orang Rimba.

⁹⁶ Op.Cit.Wawancara dengan MB, 2009.

Berdasarkan survey yang dilakukan LSM WARSI data tahun 2002 menyebutkan, orang rimba yang bermukim di TNBD sekitar 1.300 jiwa, di TNBT 364 jiwa, dan di sepanjang jalan lintas Sumatera 1.259 jiwa. Jumlah keseluruhan 2.923 jiwa. Adapun hasil pendataan KKI Warsi tahun 2008 menyebutkan, jumlah orang rimba di TNBD tetap 1.300 jiwa, di TNBT 434 jiwa, dan di sepanjang jalan lintas Sumatera sebanyak 1.375 jiwa. Jumlah keseluruhan 3.109 jiwa. Artinya, hanya ada penambahan 186 jiwa sejak tujuh tahun terakhir. Meskipun berapa angka kematian per tahun, KKI Warsi tak sempat mendatanya.⁹⁷

4.7.3. Program Perumahan

Program pemerintah yang paling sering diterima oleh Orang Rimba di kawasan TNBD adalah program perumahan, hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan program pemukiman kembali masyarakat terasing (PKMT) sejak pertengahan tahun 90-an. Tujuan program tersebut adalah untuk membina dan memukimkan masyarakat terasing seperti halnya masyarakat umum di Indonesia. Pembinaan yang dimaksudkan adalah mengarahkan mereka untuk memiliki sistem sosial, ideologi, teknologi serta kesejahteraan yang sesuai dengan ukuran masyarakat umum. Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) tersebut dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI melalui Dirjen Bina Masyarakat Terasing dengan membangun perumahan dan fasilitas sosial tanpa ada bantuan lahan usaha.⁹⁸



Sumber Photo : Koleksi Pribadi

Gbr.4.37.
Perumahan Bagi Orang Rimba
Yang Telah Bedom Dibangun Oleh
KPDT

Kebijakan Program PKMT yang diambil pemerintah tersebut tidak menyelesaikan permasalahan pembinaan masyarakat adat Orang Rimba yang

⁹⁷ Op.Cit. <http://oase.kompas.di> download pada tanggal 21 Juli 2009 13.38 Wib.

⁹⁸ <http://www.geografiana.com/sosial/di> akses 12-08-2009 8.37 WIB

berada di kawasan TNBD. Program ini belum sepenuhnya berhasil dalam memukimkan kembali Orang Rimba. Banyak Orang Rimba yang meninggalkan rumah yang baru ditempati atau bahkan ada rumah yang tidak pernah mereka tempati, hal ini disebabkan budaya *melangun* yang mereka miliki dan masih dilakukan hingga kini menyebabkan pembangunan perumahan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Sangat disayangkan, program serupa kembali dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang kembali memberikan bantuan perumahan bagi Orang Rimba kelompok Singosari dan kelompok Air Panas yang telah mulai menetap.

Bagi Orang Rimba mereka berpendapat bahwa sebenarnya perumahan bukanlah hal yang paling dibutuhkan, apalagi pembangunan rumah bantuan ini menurut mereka ada indikasi korupsi karena bahan-bahan rumah terdiri dari kayu yang kualitasnya tidak baik.⁹⁹ Pembangunan perumahan yang tidak disertai pembangunan lahan usaha produktif justru hanya akan melakukan proses marginalisasi secara terencana bagi Orang Rimba.

4.8. Analisis Teoritik Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba.

Kondisi sosial ekonomi budaya komunitas Adat Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas saat ini masih dalam kondisi yang marginal. Beberapa faktor penyebab terjadinya marginalisasi adalah belum optimalnya kebijakan pembangunan pemerintah dan rendahnya akses partisipasi komunitas adat Orang Rimba dalam proses pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan justru belum tercapai pada masyarakat adat Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Oleh karena itu konsep pembangunan sosial dapat dijadikan model alternatif untuk melaksanakan proses pembangunan bagi masyarakat adat Orang Rimba.

Mengutip mengenai konsep pembangunan sosial yang dikemukakan oleh Midgley dan Hardiman (1995) bahwa pembangunan sosial adalah sebuah proses

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan NG, MJ, SM, MK, ED, 16, 17 dan 19 Nopember 2009.

perencanaan sosial yang diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Secara kontekstual pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba dilakukan dengan lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial daripada pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus selama ini.

Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengentasan kemiskinan. Program-program ini yang sangat dibutuhkan oleh komunitas adat Orang Rimba, diantaranya program pendidikan. Kondisi pendidikan masyarakat adat Orang Rimba saat ini berada pada taraf yang sangat menyedihkan. Saat ini hanya ada satu unit sekolah dasar negeri yang memiliki murid yang berasal dari anak Orang Rimba. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah pada saat penelitian hana ada 5 orang anak Orang Rimba yang bersekolah pada semester ini yaitu 2 orang di kelas 5, 2 orang di kelas 4 dan 1 orang di kelas 3.

Demikian halnya kondisi kesehatan Orang Rimba, dikarenakan terbatasnya akses pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat adat Orang Rimba menyebabkan kualitas derajat kesehatan mereka rendah. Meskipun data akurat tentang kondisi derajat kualitas kesehatan Orang Rimba secara pasti sangat sulit diperoleh, disebabkan karena sulitnya melakukan pendataan demografi. Tetapi dari data laporan survey yang dilakukan pihak LSM yang memiliki program kesehatan di masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD diperoleh informasi mengenai buruknya derajat kesehatan masyarakat adat Orang Rimba.

Tingkat kemiskinan Orang Rimba dapat dilihat secara kasat mata dari lingkungan pemukiman dan sumber matapencaharian mereka yang sangat tergantung dari pola eksploitasi sumberdaya alam misalnya berburu dan meramu. Sementara cadangan sumberdaya alam yang menjadi sumber ekonomi Orang Rimba terus mengalami degradasi yang cukup signifikan.

Dari aspek sosial budaya masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD, saat ini sedang menghadapi perubahan sosial dan budaya yang cukup kuat sebagai akibat adanya proses interaksi yang terbuka antara masyarakat adat Orang Rimba dan masyarakat umum. Pola interaksi dari proses perdagangan hasil hutan dan lahan telah memberikan dampak yang bersifat negatif dan positif bagi komunitas adat Orang Rimba. Dampak positif misalnya mereka telah mengenal alat

transportasi, komunikasi, dan tumbuh motivasi dan keinginan untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dampak negatif misalnya munculnya perilaku konsumtif pada barang kebutuhan sekunder seperti kendaraan, handphone dan kecepek (senjata api rakitan) yang digunakan untuk berburu serta mulai maraknya terjadi penjualan lahan di kawasan penyangga TNBD kepada masyarakat umum (Orang Terang).

Berdasarkan beberapa kondisi marjinal dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat Orang Rimba yang telah dipaparkan diatas maka pendekatan pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba dapat dijadikan pendekatan alternatif pembangunan yang perlu dilakukan bagi Orang Rimba. Langkah awal proses pembangunan sosial harus diinisiasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan pendapat Midgley (1995) yang mengemukakan bentuk strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan yaitu melalui pemerintah dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*government agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Pembangunan sosial melalui pemerintah dirasa sangat tepat sesuai dengan era otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pemberdayaan komunitas adat yang dapat dilakukan melalui kegiatan operasional yaitu pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan, penyuluhan, bimbingan dan motivasi, pemberian bantuan serta perlindungan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) dalam bidang pendidikan, kesehatan serta pengembangan sumber ekonomi masyarakat adat Orang Rimba berbasis pengelolaan sumberdaya hutan non kayu dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Pendekatan pembangunan sosial oleh pemerintah sebaiknya juga dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lain yaitu dunia usaha dan masyarakat sipil, dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan dapat dikedepankan untuk membangun sinergi diantara para pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang

Rimba. Sehingga tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial. Masing-masing pihak terus menunjukkan kiprahnya bahkan bisa melakukan sinergi untuk mempercepat proses pembangunan sosial.

Masyarakat adat Orang Rimba memiliki pola hidup secara berkelompok yang terdiri dari beberapa keluarga kecil yang dalam bahasa Orang Rimba disebut “pesaken”. Beberapa keluarga kecil ini diikat oleh kekerabatan yang solid diantara anggota kelompok karena pada dasarnya mereka memiliki satu ikatan keturunan. Kelompok kecil atau pesaken ini tergabung dalam kelompok besar yang dalam bahasa Orang Rimba disebut dengan “*rombong*”. Rombongan membangun tempat pemukiman secara menyebar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Nama DAS ini biasanya yang keudian menjadi identitas setiap rombongan yang berada di kawasan hutan TNBD. Misalnya Kelompok Air Hitam, Kejasung Besar, Kejasung Kecil yang sebenarnya merupakan nama sungai tempat mereka membangun pemukiman dan perladangan.

Mengacu kepada pola kehidupan Orang Rimba yang berkelompok, maka secara teori pembangunan sosial yang dikemukakan Midgley (1995) strategi pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba dapat dilakukan melalui “komunitas” (*social development by community*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*), pendekatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (LSM).

Kondisi kemiskinan pada komunitas adat Orang Rimba di kawasan TNBD dapat di atasi dengan penerapan konsep pembangunan sosial, hal ini sejalan dengan pendapat Hardiman dan Midgley (1995) yang mengemukakan bahwa model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, dalam hal ini jelas Orang Rimba di kawasan TNBD hidup secara berkelompok dalam kondisi ekonomi yang marjinal karena tidak memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup. Pemberdayaan kelompok marjinal dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan potensi diri (produktivitas) Orang Rimba yang lemah secara ekonomi menjadi aset tenaga kerja, cara kedua adalah dengan

menyediakan dan memberikan pelayanan sosial khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Berbagai konsep teori pembangunan sosial dan kondisi sosial ekonomi budaya dan kemiskinan yang ada pada masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD, dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan sosial sangat dibutuhkan bagi masyarakat adat Orang Rimba dan dapat menjadi model alternatif pendekatan pembangunan yang dapat dipilih oleh para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (LSM/NGO).

